

Penerbit
Center for Academia Publications

DIKTAT MATA KULIAH

DASAR-DASAR PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM



Dr. Icol Dianto, S.Sos.I., M.Kom.I

DIKTAT MATA KULIAH
DASAR-DASAR PENGEMBANGAN MASYARAKAT
ISLAM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DISUSUN OLEH

Dr. Icol Dianto, M.Kom.I

2010038702

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor : 1831/Un.28/F/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Magdalena, M.Ag
NIP : 197403192000032001
Pangkat/Golongan : Pembina/IV a
Ruang/TMT : 01 Oktober 2013
Jabatan : Lektor Kepala/Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Unit Kerja : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

menerangkan bahwa :

Judul : Diktat Mata Kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam
Jenis : DIKTAT
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Penulis : Icol Dianto, M.Kom.I
NIP : 19870310 2018011001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. 1 / III-b

Telah memenuhi standar penulisan DIKTAT Mata Kuliah sebagaimana diatur dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit (PO-PAK) Tahun 2019.

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan, 19 Desember 2022

Dekan,



Dr. Magdalena, M.Ag. ✱
NIP. 197403192000032001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Hamdan wa Syukran Lillah. Sholatan wa Salaman 'ala Rasulillah. 'Ammma Ba'd. Beribu puja dan puji dilantunkan ke hadirat Allah Swt, atas segala rahmat-Nya yang diberikan kepada kita makhluk-Nya, terutama penulis. Berkat rahmat Allah jugalah DIKTAT ini dapat penulis selesaikan. Kemudian, sholawat dan salam senantiasa dipanjatkan doa kepada Allah agar junjungan kita, Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya mendapatkan syafaat darinya. Aamiin.

DIKTAT yang ada di tangan pembaca ini adalah pengembangan dari silabus mata kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keilmuan bagi mahasiswa pada Program studi Pengembangan Masyarakat Islam (Prodi PMI). Mata kuliah ini memuat kajian-kajian keilmuan dasar bagi kompetensi keilmuan Prodi PMI. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 3 dengan bobot kuliah sebanyak 2 SKS. Dalam DIKTAT ini terdapat 16 topik yang disesuaikan dengan jumlah pertemuan kuliah tatap muka selama satu semester. Untuk memudahkan mahasiswa menggunakan DIKTAT ini, maka setiap topik perkuliahan itu diuraikan sebanyak 16 bab. Asumsinya bahwa setiap pertemuan tatap muka (luring dan daring) menyajikan satu bab yang sudah dipilih.

DIKTAT ini disusun berdasarkan urutan sebagai berikut:

- Bab 1. Pembangunan Masyarakat
- Bab 2. Pengembangan Masyarakat
- Bab 3. Tahapan dan Proses Pengembangan Masyarakat
- Bab 4. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat
- Bab 5. Pengembangan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan
- Bab 6. Mendorong Partisipasi Masyarakat
- Bab 7. Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- Bab 8. Kebutuhan, Janji, dan Aksi Komunitas
- Bab 9. Dimensi Pengembangan Masyarakat Islam
- Bab 10. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam PMI
- Bab 11. Pengembangan Masyarakat Perspektif Keadilan Sosial dan HAM
- Bab 12. Pengembangan Masyarakat Perspektif Ekologi
- Bab 13. Model Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat
- Bab 14. Pemberdayaan Zakat dalam PMI
- Bab 15. Kepemimpinan Islam dalam PMI
- Bab 16. Tenaga Pendamping dalam Pengembangan Masyarakat Islam

Penulisan DIKTAT ini sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi yang penulis laksanakan, terutama dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Tujuan dari penulisan DIKTAT ini adalah untuk membuat pedoman perkuliahan terhadap tema-tema yang dikaji oleh dosen dan mahasiswa memiliki standar minimal pengetahuan. Meskipun mata kuliah ini diampu oleh dosen yang beragam, siapapun yang membimbing kelas dan mahasiswa angkatan berapapun yang menyajikan tema tersebut, masih memiliki standar keilmuan yang sama. Tentu saja DIKTAT ini bukanlah sumber

pengetahuan satu-satunya dan bukan pula referensi yang kaku. Dosen dan mahasiswa disunatkan untuk mengembangkan materi yang disajikan dalam DIKTAT ini.


Tujuan dari mata kuliah ini adalah, setelah mempelajari tema ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tema-tema utama yang berkaitan erat dalam Pengembangan Masyarakat Islam. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tema-tema tersebut secara teoretis dan menggunakan pengetahuan itu untuk menjelaskan dan menganalisis konteks dan realitas. Dengan demikian, mata kuliah ini diharapkan memberikan penguasaan KKNi level 4, yaitu mampu menganalisis konteks dan realitas dengan pendekatan keilmuan yang dipelajari dalam DIKTAT ini.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, para dosen Prodi PMI, mahasiswa PMI, dan semua pihak yang telah berjasa secara materi dan moril kepada penulis sehingga dukungan tersebut mengantarkan DIKTAT ini layak untuk dibaca.

Penulis menyadari bahwa DIKTAT ini masih jauh dari kata sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Atas kekurangan bahasa, referensi, dan kedalaman materi, penulis membuka diri untuk saran dan masukan dari para pembaca demi perbaikan DIKTAT ini. Akhir kalam, semoga DIKTAT Mata Kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam ini bermanfaat. Aamiin.

Padangsidempuan, 1 Desember 2022

Penulis



Dr. Icol Dianto, S.Sos.I., M.Kom.I

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
Bab I. Pembangunan Masyarakat.....	1
Bab 2. Pengembangan Masyarakat	14
Bab 3. Tahapan dan Proses Pengembangan Masyarakat	17
Bab 4. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat	21
Bab 5. Pengembangan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan.....	24
Bab 6. Mendorong Partisipasi Masyarakat	38
Bab 7. Perencanaan Pembangunan Partisipatif.....	45
Bab 8. Kebutuhan, Janji, dan Aksi Komunitas	50
Bab 9. Dimensi Pengembangan Masyarakat Islam	56
Bab 10. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam PMI.....	67
Bab 11. Pengembangan Masyarakat Perspektif Keadilan Sosial dan HAM	74
Bab 12. Pengembangan Masyarakat Perspektif Ekologi	84
Bab 13. Model Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat.....	99
Bab 14. Pemberdayaan Zakat dalam PMI	117
Bab 15. Kepemimpinan Islam dalam PMI.....	135
Bab 16. Tenaga Pendamping dalam Pengembangan Masyarakat Islam	142
DAFTAR PUSTAKA.....	150

BAB I

PEMBANGUNAN MASYARAKAT

A. Definisi Pembangunan

Menurut pemahaman penulis, antara kata pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan jelas berbeda. Hal itu dapat kita lihat dari munculnya tren kata pembangunan itu. Kata pembangunan menjadi populer setelah perang dunia kedua berakhir. Akibat dari perang dunia tersebut, menyebabkan di banyak negara terjadi kehancuran ekonomi. Maka, ahli-ahli ekonomi berupaya membangun kembali sistem ekonomi bangsa-bangsa. Jadi, orientasi kata pembangunan tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, kata pengembangan berorientasi pada perbaikan struktur-struktur sosial yang ada pada masyarakat untuk mengkoordinasikan seluruh kehidupan sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Dengan demikian, pengembangan berorientasi pada perubahan yang direncanakan (rekayasa sosial) untuk merubah sistem sosial yang selama ini merugikan kelompok tertindas, yang menyebabkan muncul upaya memiskinkan dan ketidakberdayaan dan ketidakadilan sosial.

Berbeda dengan kata pemberdayaan, yang ditandai dengan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia agar timbul kemandirian dalam mengambil keputusan-keputusan dan menentukan pilihan yang tepat secara *aktive-partisipative* dari masyarakat itu sendiri. Dapat saya simpulkan bahwa kata pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan, ketiga kata itu saling terkait dan muncul menjadi tren secara sistematis, yang mana kemunculan suatu tren merupakan pembenahan dari tren sebelumnya. *The Age of Development* menandakan puncak keemasan penggunaan kata pembangunan, suatu zaman yang mana gagasan mampu mendominasi dan memengaruhi pemikiran bangsa-bangsa secara global, menyangkut gagasan pembebasan masalah kemiskinan dan keterbelakangan bagi jutaan rakyat di belahan dunia ketiga.

Kata pembangunan padanannya dalam bahasa Inggris adalah *development* dari kata *to develop* yang berarti menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan atau mengubah secara bertahap (*to change gradually*). Dengan demikian pembangunan dapat diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui beberapa tahap secara terencana dan berkesinambungan. Pembangunan berarti proses sosial yang direncanakan atau direkayasa. *Development* adalah sebuah kata yang intinya juga merupakan perubahan

sosial yang direncanakan atau sejenis rekayasa sosial.¹ Pada buku yang sama, Abu Huraerah mengutip pendapat Weidner, mengartikan pembangunan adalah suatu pertumbuhan ke arah modernisasi atau nation building dan kemajuan sosio-ekonomi yang meliputi differensiasi substansi dan koordinasi. Sejalan dengan itu, Rakhmat dalam Abu Huraerah menyebutkan bahwa kata development berarti *the passing of tradisional society into a modern one*. Katzs dikutip Abu Huraerah, mengartikan pembangunan adalah perubahan yang lebih luas dari masyarakat terhadap suatu keadaan kehidupan yang kurang bernilai kepada keadaan yang lebih bernilai.

Menurut Rogers (1985:2), pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.² Kata pembangunan mula-mula dipakai untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

Pembangunan dipengaruhi oleh:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Pemerataan pendapatan
3. Kerusakan lingkungan
4. Keadilan sosial

Pembangunan adalah proses rekayasa sosial dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Pembangunan berkisar pada mengubah masyarakat melalui perubahan sistem ekonominya. Tokoh dalam aliran pembangunan ekonomi ini adalah Rostow.³

Teori pembangunan ekonomi ini, mendorong munculnya teori kebergantungan (*dependency theory*), oleh Raul Prebisch sekitar tahun 1950-an di Amerika Latin, yang membagi perekonomian sebuah Negara terdiri dari ekonomi masyarakat industri di pusat sedangkan di pinggiran berkembang perekonomian industri pertanian.

Penerapan pembangunan ekonomi ini ada kaitannya dengan Marshal Aid/ Marshal Plan yang diprogramkan oleh Amerika Serikat untuk membangun kembali perekonomian dunia barat setelah perang dunia kedua. Tujuan dari Marshal Aid adalah (1) untuk menyebarkan tata ekonomi tunggal dunia yang mana model ini mendasarkan diri pada

¹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2011), hlm. 11-12

² Rochajat Harun dan Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet.2, 2012), h. 2

³ Rochajat Harun dan Elvinaro Ardianto..., h. 4

mekanisme pasar dan liberalisme perdagangan. Rencana ini mengupayakan adanya integrasi setiap Negara dalam suatu ikatan perekonomian dan menimbulkan efisiensi sumber daya pada level internasional. (2) Melancarkan gagasan kapitalisme dan membendung ide/ gagasan komunisme yang dipelopori oleh Uni Soviet. Maka, didirikanlah dua lembaga keuangan untuk menopang implementasi gagasan tersebut, yaitu *International Monetary Fund* (IMF) dan *world bank* yang dibentuk saat berlangsungnya konferensi *Bretton Woods*.

Pembangunan tidak bisa dibiarkan dalam tangan kekuasaan yang terpusat, memberikan ruang gerak dan peluang lebih besar kepada rakyat untuk dapat berpartisipasi, lebih kreatif dan produktif. Cheveland dan Lubis, 1990:10-11, sebagaimana dikutip Rochajat Harun dan Elvinaro Ardianto (2012: 9), untuk menjadi kreatif manusia perlu berpikir kritis. Seseorang dapat berpikir kritis jika berlandaskan pada sistem pendidikan yang sehat. Pendidikan harus dipandang sebagai titik paling menentukan dalam pembangunan. Manusia yang tidak terdidik dan kurang informasi hanya menggapai-gapai dalam kegelapan mereka sendiri sedangkan dunia meluncur meninggalkan mereka. Hanya pendidikanlah yang akan memberikan mereka perlengkapan untuk berpikir bagi diri mereka sendiri dan dengan demikian pula dapat menolong diri mereka sendiri.

Pembangunan tidak hanya kegiatan untuk pertumbuhan ekonomi semata melainkan juga perlu memperhatikan kebutuhan kultural manusia, seperti pendidikan, informasi, martabat kemanusiaan dan kekayaan spiritual dalam berbagai bentuknya. Pembangunan dimaknai sebagai upaya yang menyeluruh untuk memenuhi semua kebutuhan dan aspirasi manusia untuk hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya, materil maupun spiritual, secara intelektual dan bahkan juga artistik.

Pembangunan adalah proses perubahan yang bersifat multidimensi menuju kondisi yang semakin mewujudkan hubungan yang serasi antara kebutuhan (*needs*) dengan sumber daya (*resources*) melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk melakukan proses pembangunan tersebut.⁴

Target pembangunan adalah tujuan-tujuan yang dirumuskan secara konkret, dipertimbangkan secara rasional, dan dapat direalisasikan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang tersedia yang ditegakan sebagai aspirasi antara suatu situasi yang ada dengan tujuan akhir pembangunan.⁵

⁴ Rochajat Harun dan Elvinaro Ardianto..., h. 14.

⁵ Rochajat Harun dan Elvinaro Ardianto..., h. 18.

Pembangunan Masyarakat dirumuskan sebagai suatu proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri ataupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. (*United Nations* dalam Dilla, 2007: 58-59).

Manajemen pembangunan saat ini telah beralih paradigma dari *government* (pemerintahan) ke *governance* (tata pemerintahan). Munculnya istilah tata pemerintahan ini karena adanya ketidakpuasan publik terhadap model pembangunan *social-economy* yang dimonopoli oleh peran negara (*state dominated*) di negara-negara sedang berkembang dan blok sosialis.

Bank dunia mendefinisikan tata pemerintahan sebagai cara menggunakan kekuasaan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi dari sebuah negara. Ada tiga aspek penting tata pemerintahan; (1) bentuk rezim politik, (2) proses menggunakan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi dari sebuah Negara untuk pembangunan, (3) kapasitas pemerintah untuk merancang dan menyusun, melaksanakan kebijakan dan menjalankan berbagai fungsi.

Institute of Governance, Ottawa, merinci bahwa tata pemerintahan itu meliputi berbagai lembaga, proses dan konvensi di suatu masyarakat yang menentukan bagaimana kekuasaan digunakan, bagaimana kebijakan yang memengaruhi masyarakat dibuat, dan bagaimana beragam kepentingan diakomodasikan dalam berbagai keputusan. Upaya-upaya pembangunan akan mencapai tujuannya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut; (a) administrasi negara yang sehat, efektif, jujur dan efisien; (b) adanya kapasitas birokrasi dalam merumuskan, menyerap dan melaksanakan program-program pembangunan; (c) struktur politik yang demokratis; (d) adanya iklim kultural yang mendukung tujuan-tujuan pembangunan, seperti keadilan sosial, pemerataan ekonomi dan demokrasi politik.

B. Teori-teori Pembangunan

Muhi megemukakan beberapa pendekatan teoritis tentang pembangunan, yaitu:

1. Teori Evolusi

Teori Evolusi yang mengacu kepada evolusi peradaban yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang menyebutkan bahwa setiap komunitas akan mengalami perubahan dari kehidupan yang sangat sederhana ke arah yang semakin kompleks, sebagai akibat dari perubahan-perubahan: sosial, ekonomi, kependudukan, geografi, rasial, teknologi maupun ideologi.

2. Teori Perubahan Sosial

Emile Durkheim (1964), yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perubahan struktur sosial dalam bentuk “pembagian pekerjaan”. Redfield (1947) menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena terjadinya perubahan masyarakat tradisional ke arah masyarakat perkotaan.

3. Teori Struktural Fungsional

Parsons (1851) mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial yang terjadi dalam:

- a. Adaptasi terhadap kebutuhan situasional.
- b. Pencapaian tujuan-tujuan.
- c. Integrasi atau pengaturan tata-hubungan.
- d. Pola pemeliharaan atau pengurangan ketegangan dari pola budaya tertentu.

4. Teori Ekonomi

Gunar Mrdal (1970) mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena beberapa kondisi ekonomi yang mencakup:

- a. Hasil dan pendapatan,
- b. Tingkat produktivitas,
- c. Tingkat kehidupan,
- d. Sikap dan pranata,
- e. Rasionalitas.

5. Teori Konflik

Teori Konflik dicetuskan oleh Karl Marx (1919-1983) yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya konflik atau pertentangan kepentingan ekonomi antar kelas antara kelas pemodal (yang berkuasa) dan kelas yang tertindas (buruh).

6. Teori Ekologi

Teori ini dikemukakan oleh Odum (1971) tentang hubungan antar manusia dengan lingkungannya (fisik dan sosial). Menurutnya, pembangunan terjadi sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah, maupun optimasi pemanfaatan sumberdaya yang semakin terbatas.

7. Teori Ketergantungan

Teori Ketergantungan berkembang di Amerika Latin sebagaimana dilaporkan oleh Frank (Wilber, 1979) dimana negara maju mendominasi negara yang belum berkembang,

sedemikian rupa sehingga pembangunan di negara yang belum maju sangat tergantung kepada kehendak/kebutuhan negara maju yang menjadi “penjajah”nya.

C. Pendekatan (Strategi) Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu konsep yang memiliki dimensi yang luas dan senantiasa berkembang seiring dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan dilihat dari aspek pendekatannya kian beragam karena itu pembangunan memiliki multi dimensi dalam pendekatannya.

1. Pendekatan pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth Approach*)

Konsep pembangunan pada tahun 1970-an bertumpu pada laju pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) yang perkapita cepat. Kenaikan GNP diharapkan akan menetes ke bawah (*trickle down effect*) ke masyarakat luas dalam bentuk pekerjaan dan kesempatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, masalah kemiskinan, pengangguran, pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat teratasi dengan sendirinya. Ketika itu, hampir seluruh konsep pembangunan secara keseluruhan dilihat sebagai fenomena ekonomi karena banyak negara dunia ketiga dengan konsep yang bertumpu pada pertumbuhan GNP hasilnya mencengangkan dunia.

Pendekatan ini mendapatkan kritik dari pemerhati sosial. Pembangunan yang hanya menggenjot pertumbuhan ekonomi, ternyata mengabaikan pembangunan sumber daya manusia. Ketimpangan terjadi antara pemilik modal dengan pekerja. Kekayaan tertumpu pada individu atau kelompok tertentu saja, sehingga pendekatan ini dinilai mengabaikan pembangunan sosial, dan tidak adanya pendistribusian pendapatan, manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas.

2. Pendekatan Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Approach*)

Pendekatan kebutuhan dasar telah banyak menarik perhatian di antara peminat studi pembangunan dan lembaga-lembaga internasional seperti ILO dan Bank Dunia. Conyers dalam Abu Huraerah⁶ menyebutkan bahwa pendekatan kebutuhan dasar adalah sebagai kebijaksanaan pembangunan baik dalam setiap negara khususnya maupun dunia pada umumnya seharusnya dapat dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh penduduknya. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini banyak mengundang perdebatan mengenai kenyataan apa yang disebut kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi tiga bagian, *pertama*, ada konsumsi bahan-bahan pokok tertentu seperti pangan, sandang, perumahan (papan) yang dapat dijangkau oleh setiap orang. *Kedua*, ada pelayanan pokok seperti pendidikan,

⁶ Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 16

kesehatan, air bersih yang setiap orang berhak untuk mempunyai akses yang sama. **Ketiga**, ada hak untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program yang berpengaruh terhadap pengembangan pribadi. Diasumsikan juga bahwa syarat tenaga kerja produktif merupakan komponen penting dalam memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk rasa kepuasan perorangan yang merupakan pelengkap bagi kebutuhan individu.

3. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Approach)

Konsep pembangunan berkelanjutan lahir dari sebuah proses evolusi. Evolusi dari isu lingkungan hidup global menjadi isu pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya masalah pencemaran yang makin luas dan meningkat, penduduk dunia barat yang makmur merasa kesejahteraannya terancam. Atas usul Swedia, majelis umum perserikatan bangsa-bangsa menyetujui untuk menyelenggarakan sebuah konferensi tentang lingkungan hidup. Konferensi itu diberi nama Conference on the human environment, terselenggara di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Konferensi ini terkenal sebagai Konferensi Stockholm.

Konferensi itu didesak karena adanya kerusakan lingkungan hidup, yakni mengenai pencemaran, maka tema yang diangkat dalam konferensi itu sarat dengan masalah-masalah pencemaran. Pihak negara maju, mengatakan bahwa kerusakan lingkungan global disebabkan hutan yang rusak akibat aktivitas masyarakat yang mengambil kayu api dari hutan. Akibatnya hutan kekurangan serapan air dan menyebabkan sejumlah bencana alam. Di lain pihak, kerusakan lingkungan itu dipicu oleh aktivitas pembangunan di negara maju yang telah berlebihan (*over development*), sementara di negara berkembang, karena kurangnya pembangunan sehingga tingkat pendidikan masyarakat rendah. Kondisi itu menyebabkan kemiskinan membelenggu masyarakat yang berujung pada penggantungan harapan hidup dan sumber-sumber ekonomi pada lingkungan. Akibatnya, eksploitasi lingkungan yang tidak terencana dan terkontrol menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan ini juga dipicu karena adanya penerapan teori sebelumnya, yakni pertumbuhan ekonomi. Pengurusan terhadap sumber daya alam sehingga menyisakan kerusakan lingkungan, misalnya saja bekas wilayah pertambangan. Oleh karena itu, munculnya pendekatan pembangunan berkelanjutan, agar sumber daya alam yang sudah dikuras itu tidak menyisakan kerusakan lingkungan. Bisa saja digalakkan eksploitasi sumber daya alam berbasis lingkungan, mengadakan penghijauan-penghijauan hutan, dan lain-lainnya.

Komisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development/ WCED)⁷ menyebutkan pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut WCED, pencapaian pembangunan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Peningkatan potensi produksi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan hidup.
- b. Menjamin terciptanya kesempatan yang merata dan adil bagi semua orang.

Pembangunan berkelanjutan menurut Soemarwoto dalam Abu Huraerah,⁸ harus bertumpu pada tiga pilar, yaitu pilar ekologi, ekonomi dan sosial. Ketiga pilar itu merupakan kekuatan yang menentukan bentuk dan sifat ekosistem Indonesia. Soemarwoto berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan harus bersifat holistik dengan mempertimbangkan ketiga pilar tersebut secara berimbang dan terintegrasi. Barbier dalam suharto, seperti dikutip kembali oleh Abu Huraerah, menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan proses dan upaya peningkatan kesejahteraan umat manusia yang mesti memperhatikan keselarasan proses interaksi dari tiga sistem, yakni sistem biologis, ekonomi dan sosial. Pada sistem biologis, penting menjaga keanekaragaman hayati, fleksibilitas dan produktivitas biologis. Sistem ekonomi dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemerataan penggunaan barang dan jasa. Sistem sosial maksudnya keanekaragaman budaya, berkelanjutan kelembagaan, keadilan sosial dan partisipasi.

4. Pendekatan pembangunan sosial (Social Development Approach)

Pembangunan sosial tidak terkait dengan individu baik dalam pemberian bantuan dan pelayanan, penyembuhan ataupun rehabilitasi melainkan memfokuskan pada komunitas atau masyarakat dan fokus pada proses dan struktur sosial secara luas. Pembangunan sosial berusaha membuat mata rantai antara usaha-usaha pembangunan sosial dengan pembangunan ekonomi, artinya secara eksplisit berusaha untuk mengintegrasikan proses sosial dan ekonomi. Pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi bagaikan dua sisi mata uang, tanpa ekonomi yang baik maka pembangunan sosial tidak bisa digerakan, dan tanpa sosial yang baik, ekonomipun tidak akan bergerak secara adil dan merata.

⁷ Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 18

⁸ Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 18

Pembangunan sosial bermakna bahwa pembangunan sosial itu sebagai pengadaan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi, sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat/ melakukan sesuatu. Pembangunan sosial harus memiliki ukuran yang jelas sehingga dapat dilakukan penilaian apakah suatu negara telah berhasil atau gagal dalam melaksanakan pembangunan sosial. Adapun pengukuran pembangunan sosial menurut Moeljarto dan Prabowo sebagaimana dikutip Abu Huraerah⁹ :

- a. Menilai hasil dari pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan masyarakat.
- b. Memantau dampak sosial dari kebijaksanaan dan pengeluaran masyarakat serta untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi individu untuk berbagi jasa pelayanan masyarakat.
- c. Untuk mengukur kondisi/ keadaan dan trend kesejahteraan penduduk.
- d. Untuk menarik perhatian para perencana, umum, pembuat kebijakan dan masyarakat kebanyakan dalam mengukur dan membandingkan antara berbagai masalah-masalah sosial, kesenjangan sosial serta untuk memantau perkembangannya sepanjang waktu.
- e. Untuk memantau kondisi dari kelompok penduduk pada lapisan masyarakat tertentu yang mungkin masih memerlukan perhatian dan bantuan khusus.

Metode *Human Development Index* (HDI) yang dirumuskan sejak tahun 1990, sering juga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

- a. Angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*)
- b. Angka putus sekolah (*Education attainment*) yang terbagi menjadi adult literacy, primary and secondary enrollement ratio.
- c. Pendapatan (Income).

Adapun strategi yang digunakan dalam pembangunan sosial ini adalah:

- a. Strategi pembangunan sosial melalui pendekatan individu

Pendekatan individu menganggap bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika individu anggota masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri. Peran pemerintah masih diharapkan untuk membantu individu agar berpartisipasi efektif dalam kehidupan ekonomi pasar. Pendukung pendekatan ini tetap memandang perlunya intervensi yang berskala besar seperti kebijakan serta program-program yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan budaya usaha yang kondusif bagi individu maupun intervensi berskala kecil yang bertujuan untuk membantu keluarga-keluarga ekonomi

⁹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 22

lemah maupun kelompok usaha kecil atau sering disebut sektor informal untuk bekerja secara efektif dalam ekonomi pasar. Strategi ini dikembangkan dengan mengembangkan budaya wisata untuk meningkatkan kemajuan sosial, pengembangan usaha kecil dan pengembangan kesejahteraan sosial melalui peningkatan keberfungsian individu.

b. Strategi pembangunan sosial melalui masyarakat lokal

Pandangan ini beranggapan bahwa pembangunan sosial sebaiknya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau biasa disebut dengan pendekatan communitarian. Para pendukung strategi ini yakin bahwa masyarakat memiliki kemampuan dalam mengorganisir dirinya untuk memahami dan memecahkan masalahnya dalam memenuhi kebutuhannya serta mampu menciptakan kesempatan untuk mengembangkan diri. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka perlu saling bekerja sama. Dengan demikian, masyarakat mampu menguasai sumber, baik internal maupun eksternal secara lebih baik.

Ada tiga pengembangan dari strategi ini, yakni pengembangan komunitas dan pembangunan sosial, pemberdayaan kelompok rentan dan tertindas, strategi gender dan peningkatan kontribusi kaum perempuan dalam pembangunan sosial.

c. Strategi pembangunan sosial melalui pemerintahan

Strategi ini berkeyakinan bahwa pembangunan sosial sebaiknya dilakukan oleh pemerintahan yang terlaksana melalui para perencana kebijakannya, melalui lembaga-lembaga khusus serta para administratornya membentuk suatu landasan yang disebut pendekatan statis pada pembangunan sosial. Pendekatan ini berpendapat bahwa negara merupakan penjelmaan dari kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan dengan demikian pada pemerintahlah tanggungjawab untuk memenuhi kesejahteraan seluruh rakyatnya. Strategi ini dikembangkan menjadi beberapa strategi turunan, yakni strategi memajukan pembangunan sosial melalui perencanaan terpadu, strategi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan pemerataan, strategi kesejahteraan dan kebutuhan dasar, dan strategi pembangunan berkelanjutan.

5. Pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat

Tujuan pembangunan sosial menurut *Economic and Social Commission for Asia and Pacific/ ESCAP*, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (*development of the well being of the people*). Melihat tujuan tersebut, maka bagi ESCAP, pembangunan itu sesungguhnya menekankan pada pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dengan demikian, terlihat kesamaan pola gerak antara pembangunan sosial dengan pembangunan berpusat pada rakyat, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup

masyarakat dengan memokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri.

Arif Budiman dalam Abu Huraerah, menyebutkan bahwa bagaimanapun juga pembangunan itu pada akhirnya ditujukan untuk manusia. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, untuk bisa kreatif maka harus diciptakan rasa bahagia, aman dan bebas dari rasa takut. Pendapat Arif Budiman ini, memberikan sinyal kepada penggerak pembangunan bahwa untuk mewujudkan pembangunan hendaknya diciptakan suasana yang kondusif dengan rekayasa sosial sedemikian rupa, yang jauh dari intimidasi, intervensi dan penindasan kekuasaan. Menurut Korten dalam Abu Huraerah, pembangunan berbasis masyarakat itu menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumberdaya material dan non material yang penting melalui redistribusi dan kepemilikan. Senada dengan pendapat itu, Guy Grant dalam Abu Huraerah menyebutkan bahwa pandangan ini memberi peran kepada individu sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumberdaya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berwawasan masyarakat menghargai dan mempertimbangkan prakasa dan perbedaan lokal. Paradigma ini mendukung sistem-sistem swaorganisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala manusia dan komunitas-komunitas swadaya.

6. Pendekatan pembangunan kesejahteraan sosial (Social Welfare Approach)

James Midgley dalam bukunya *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*, sebagaimana dikutip oleh Abu Huraerah¹⁰ menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan manusia yang baik atau sejahtera yang wujudnya apabila masalah-masalah sosial terkendali, apabila kebutuhan-kebutuhan manusia terpenuhi, dan apabila kesempatan-kesempatan sosial dimaksimalkan. Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dikatakan sebagai orang yang tidak dapat mencapai kebahagiaan sosial.

Richard M. Titmuss dalam Abu Huraerah menyebutkan bahwa ketidakmampuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial melahirkan kondisi yang disebut dengan penyakit sosial (*social illfare*). Ketidaksanggupan dalam meraih kesempatan-kesempatan sosial juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit sosial.

¹⁰ Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 29

Ada tiga pendekatan dalam pencapaian kesejahteraan sosial, yakni **filantropi sosial**, yang dikenal dengan keshalehan sosial. Filantropi ini merupakan aksi suka rela dari kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial, baik secara individu, lembaga dan masyarakat. Ini merupakan sumbangan yang bersifat amal dan karitas (*charity*). Pendekatan pekerjaan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial sangat penting untuk membantu menangani masalah sosial yang terjadi. Dengan bekal pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan nilai-nilai (*value*) di bidang pekerjaan sosial, para pekerja sosial harus menunjukkan keprofesionalannya untuk turut serta bahu membahu membebaskan masyarakat dari kemiskinan, pengangguran, kelaparan, gizi buruk, putus sekolah dan bahkan kekerasan terhadap kelompok rentan masalah sosial lainnya. Pendekatan ketiga, yakni administrasi kebijakan sosial yang dijalankan oleh pemerintahan. Telah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat, hak atas kehidupan yang layak, hak pendidikan dan kesehatan, dan hak keadilan sosial lainnya. Dalam hal ini, maka pemerintah perlu melakukan langkah strategis sebagai berikut: menganalisis kebijakan sosial yang meliputi merumuskan seperangkat tindakan, mempersiapkan kerangka kerja, petunjuk dan rencana kerja, pemetaan dan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan sosial. **Langkah strategis kedua**, menyediakan anggaran yang memadai untuk program pelayanan sosial dan bantuan sosial lainnya, seperti program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, perluasan lapangan pekerjaan. Idealnya, negara berkembang dapat mengalokasikan dana sebesar 20 persen untuk program pembangunan sosial. **Langkah strategis ketiga**, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah agar tidak tumpang tindih kegiatan yang berujung pada mubazir anggaran sementara bidang sosial lainnya tidak terakomodir.

Selain dari tiga pendekatan dalam mencapai kesejahteraan sosial, masyarakat juga diberi peranan yang seluas-luasnya untuk ikut serta dalam mencapai kesejahteraan sosial. Di Indonesia, UU no. 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial disebutkan pada pasal 8 dan pasal 9, sebagai berikut:

Pasal 8

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk mencapai daya guna dan daya kerja yang sebesar-besarnya bagi usaha masyarakat di bidang kesejahteraan sosial ialah usaha kesejahteraan dan pemenuhan

jaminan sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak dapat dibentuk yayasan atau lembaga lain yang syarat-syarat dan cara-cara pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Jelaskan definisi pembangunan menurut bahasa (*etimology*) dan istilah (*terminology*) !
2. Jelaskan perbedaan Teori-Teori Pembangunan berikut ini :
 - Teori Evolusi
 - Teori Perubahan Sosial
 - Teori Struktural Fungsional
 - Teori Ekonomi
 - Teori Konflik
 - Teori Ekologi
 - Teori Ketergantungan
3. Jelaskan Pendekatan Pembangunan berikut ini :
 - Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi/ *Economic Growth Approach*
 - Pendekatan Kebutuhan Dasar/ *Basic Needs Approach*
 - Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Approach*
 - Pendekatan pembangunan sosial/ *Social Development Approach*
 - Pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat/ *People Centred Development*
 - Pendekatan pembangunan kesejahteraan sosial/ *Social Welfare Approach*
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *Trickle Down Effect* !
5. Kesejahteraan Sosial telah menjadi amanat konstitusi di Indonesia. Coba Anda jelaskan maksud dari pernyataan itu !

BAB II

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

A. Definisi Pengembangan Masyarakat

Secara istilah, pembangunan berarti membina dan meningkatkan kualitas.¹¹ Secara terminologi, pengembangan masyarakat Islam berarti menstransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (usrah), kelompok sosial (jamaah), dan masyarakat (ummah). Menurut Amrullah Ahmad (1999:9) seperti dikutip oleh Nanih dan Agus¹², menyebutkan pengembangan masyarakat Islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah *ummah* dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam.

Dengan demikian, pengembangan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal shaleh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu masyarakat Islam dengan orientasi sumber daya manusia, sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas masyarakat muslim dengan orientasi pengembangan sistem masyarakat, sasaran institusional adalah organisasi Islam dan pranata sosial kehidupan dengan orientasi pengembangan kualitas dan islamitas kelembagaan.

Masih menurut Nanih, singkatnya pengembangan masyarakat Islam itu adalah pengembangan sumber daya manusia, maksudnya memperluas horison pilihan bagi masyarakat banyak. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Dengan demikian, jelaslah kegiatan pengembangan dan pemberdayaan itu menyediakan sebuah ruang bagi masyarakat untuk melakukan pilihan-pilihan, dan hanya masyarakat yang berkualitaslah yang dapat menentukan pilihan yang terbaik.

Pengembangan masyarakat dipandang sebagai proses pembentukan atau pembentukan kembali struktur-struktur masyarakat manusia yang memungkinkan berbagai

¹¹ Nanih Nachendrawaty dan Agus Ahmad Syafei, *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 29

¹² Nanih Nachendrawaty dan Agus Ahmad Syafei, *Pengembangan...*, hlm. 29

cara baru dalam mengaitkan dan mengorganisasi kehidupan sosial serta pemenuhan kebutuhan manusia.

Dalam konteks ini, kerja masyarakat dilihat sebagai sebuah kegiatan atau praktik dari seseorang yang berusaha untuk memfasilitasi pengembangan masyarakat tersebut, baik orang itu dibayar maupun suka rela dalam melakukan peran tersebut. Sementara itu, layanan berbasis masyarakat dilihat sebagai struktur-struktur dan proses-proses untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mengerahkan sumber-sumber daya, keahlian dan kearifan dari komunitas tersebut. (Jim Ife: 3).

B. Asumsi Pengembangan Masyarakat Islam

Menurut A Halim dalam buku dakwah dan pemberdayaan masyarakat¹³ memiliki lima asumsi: *Pertama*, pada intinya upaya-upaya pengembangan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat tidak berwujud tawaran sebuah proyek usaha kepada masyarakat tetapi sebuah pembenahan struktur sosial yang mengedepankan keadilan. Pengembangan masyarakat pada dasarnya merencanakan dan menyiapkan suatu perubahan sosial yang berarti bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia.

Kedua, pengembangan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki kepada pihak yang tidak memiliki. Kerangka pemahaman ini akan menjerumuskan kepada usaha-usaha yang sekadar memberikan kesenangan sesaat dan bersifat tambal sulam. Misalnya, pemberian bantuan dana segar (*fresh money*) kepada masyarakat hanya akan mengakibatkan hilangnya kemandirian dalam masyarakat tersebut dan timbulnya ketergantungan. Akibat yang lebih buruk adalah tumbuhnya mental meminta. Padahal, dalam islam mental suka meminta itu tingkatannya beberapa derajat lebih rendah dari pemberi.

Ketiga, pengembangan masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Menurut soedjatmoko, ada suatu proses yang seringkali dilupakan bahwa pembangunan adalah *social learning*. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat sesungguhnya merupakan sebuah proses kolektif dimana

¹³ Moh. Ali Aziz, Rr Suhartini, A. Halim, *Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Surabaya: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 5-7

kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bernegara tidak sekedar menyiapkan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan sosial yang mereka lalui, tetapi secara aktif mengarahkan perubahan tersebut pada terpenuhinya kebutuhan bersama.

Keempat, pengembangan masyarakat tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekedar diartikan sebagai kehadiran mereka untuk mengikuti suatu kegiatan melainkan dipahami sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pengembangan masyarakat, terutama dalam tahapan perumusan kebutuhan masyarakat yang mesti dipenuhi. Asumsinya masyarakatlah yang paling tahu kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi.

Kelima, pengembangan masyarakat selalu ditenggarai dengan adanya pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*). Tidak mungkin rasanya tuntutan akan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup. Oleh karena itu, mesti ada suatu mekanisme dan sistem untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat harus diberi suatu kepercayaan bahwa tanpa ada keterlibatan mereka secara penuh perbaikan kualitas kehidupan mereka tidak akan membawa hasil yang berarti. Memang seringkali *people empowerment* diawali dengan mengubah dahulu cara pandang masyarakat dari *nrmo ing pandum* menjadi *aktive- partisipative*.

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan pengembangan masyarakat dan Pengembangan Masyarakat Islam ?
2. Jelaskan lima asumsi dakwah dan pengembangan masyarakat menurut A. Halim dalam buku dakwah dan pemberdayaan masyarakat !
3. Pengembangan Masyarakat merupakan proses pembelajaran sosial (*social learning*). Apa maksud dari pernyataan tersebut ?
4. Dalam pengembangan masyarakat seringkali diawali dengan mengubah dahulu cara pandang masyarakat dari *nrmo ing pandum* menjadi *aktive- partisipative*. Jelaskan maksud pernyataan tersebut.
5. Berdasarkan sejarah kemunculannya, teori pengembangan masyarakat merupakan perbaikan dari teori pembangunan yang telah ada sebelumnya, yakni pendekatan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Karena itu, Pengembangan Masyarakat menjadi pendekatan pembangunan yang memperbaiki pendekatan-pendekatan sebelumnya, mengapa demikian ?

BAB III

TAHAPAN DAN PROSES PENGEMBANGAN MASYARAKAT

A. Proses Pengembangan Masyarakat

Menurut Jim Ife¹⁴, pendekatan pembangunan yang berasal dari bawah (*bottom-up*) dan partisipasi merupakan prinsip-prinsip fundamental dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan lain yang mendapatkan perhatian dalam pengembangan masyarakat adalah kepentingan dan integritas hasil. Penekanan pengembangan masyarakat lebih menekankan proses bukan hasil semata. Banyak pekerja pendamping masyarakat yang keliru memahami pengembangan masyarakat. Kebanyakan memahami perlu adanya kesamaan pandang bahwa pengembangan masyarakat itu menekankan pada apa yang hendak dituju, sedangkan seharusnya pekerja pendamping masyarakat itu lebih memperhatikan bagaimana hasil itu dicapai. Pekerja pendamping masyarakat yang berorientasi pada hasil maka seringkali mengabaikan proses. Untuk mencapai hasil yang direncanakan, acapkali pendamping masyarakat mengabaikan partisipasi masyarakat, kontrol terhadap proses, dan determinasi arah pengembangan.

Dalam pandangan Jim Ife, proses itu memperhatikan sarana-sarana yang efektif dan efisien dalam pengembangan masyarakat. Ia mengemukakan tiga pandangan pakar pengembangan masyarakat tentang mana yang lebih penting, proses (sarana) atau hasil (tujuan). **Pertama**, menurut Fay, 1975, dalam Jim Ife, tujuan dapat menjadi sarana dan sarana dapat mencapai tujuan, sehingga identitas keduanya yang terpisah tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, ketika pekerja pengembangan masyarakat menginginkan kemandirian masyarakat maka ia berpikir bagaimana cara mewujudkan kemandirian masyarakat. Ketika itu, tujuan (kemandirian masyarakat) sudah menjadi sarana, yaitu berpikir cara efektif untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

Kedua, menolak perbedaan sarana dengan tujuan. Pilihan sarana tidak harus berupa keputusan yang bebas nilai, melainkan ditentukan berdasarkan cara menetapkan tujuan. Misalnya, untuk mengurangi kemiskinan (tujuan) maka harus menghabisi penangguran (sarana), maka menghabisi pengangguran dengan cara dibunuh tidak akan diterima oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, pilihan sarana juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Bukan apa yang dikemukakan oleh Alinsky, bahwa dalam aksi

¹⁴ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Edisi Bahasa Indonesia Cetakan Pertama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 335

kemasyarakatan etika seharusnya diabaikan, dan begitupun dalam pemecatan kerja dalam rangka proteksi industri dalam persaingan ekonomi, fleksibilitas, dan mempertahankan kompetisi.

Ketiga, menolak dikotomi antara sarana dengan tujuan. Sarana bisa saja menghambat untuk mencapai tujuan jika sarana yang digunakan itu tidak efektif dan efisien. Akan tetapi, keserasian sarana untuk mencapai tujuan sangat penting dalam pandangan ini. Misalkan saja, jika tujuan adalah meningkatkan kemandirian masyarakat maka sarana yang ditempuh adalah meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat itu sendiri.

Proses pengembangan masyarakat tidak dapat menerima pemisahan antara sarana dengan tujuan. Proses pengembangan masyarakat tidak dapat dilihat bahwa sarana untuk mencapai hasil saja, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana proses dijalankan dalam pencapaian hasil yang lebih baik. Proses merupakan perhatian yang penting, sehingga proses dan hasil harus disinergiskan. Dengan demikian, seharusnya pekerja pendamping masyarakat mengabaikan anggapan tentang dimana dia berada melainkan dia mesti mempercayai proses, kearifan dan keahlian masyarakat itu sendiri.

Ada banyak rintangan dalam kerja sosial yang memperhatikan proses. Seringkali pekerja pendamping itu tergesa-gesa mengambil kesimpulan dan memutuskan suatu kebijakan sehingga dia terlupa untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang akan menerima dampak dari kesimpulan itu dan telah mendidingi ruang keterlibatan masyarakat. Padahal, dalam pengembangan masyarakat yang memperhatikan proses yang menjadi aspek penting penekanannya adalah tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat.

B. Tahapan Pengembangan Masyarakat

Machendrawati dan Agus (2001: 31-32) memberikan rujukan kepada *action* yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., dalam membina umat Islam. Ada tiga tahapan yang harus dibangun, tahapan takwin, tanzim, dan taudi'. ***Tahap pertama***, menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, kemudian mengekspresikan dalam *ghirah* dan sikap membela keimanan dari tekanan struktural (*al-mala al-mutrafin*) kaum penindas. Pada tahap ini, rasul melaksanakan dakwah untuk pembebasan. Menurut Amrullah Ahmad (1996: 67), pada tahap takwin, fundamen sosial Islam dalam bentuk akidah, ukhuwah Islamiyah, ta'awwun, dan shalat sudah dapat diterapkan kepada masyarakat. Tauhid menjadi instrument sosiologis dalam mempersatukan para sahabat dan masyarakat muslim.

Kedua, tahap *tanzim* terfokus program pada pembinaan dan penataan masyarakat. Pada fase ini, internalisasi dan eksternalisasi Islam muncul dalam bentuk institusional Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Misalnya, peristiwa hijrah nabi dalam perspektif dakwah dilakukan ketika tekanan kultural, struktural, dan militer yang sangat mencekam sehingga jika tidak hijrah, bisa terjadi involusi kelembagaan dan menjadi lumpuh. Masyarakat yang sudah terkungkung dalam situasi sosio-kultural yang tidak mendukung, zalim dan merugikan karena diikat oleh tata nilai merendahkan sebagian golongan. Dengan berhijrah, masyarakat diajak meninggalkan kungkungan alam ini, menuju pandangan yang luas dan menyeluruh yang dapat menghilangkan kejumudan dan kemerosotan sosial, sehingga masyarakat yang jumud menjadi dinamis.

Ketiga, tahapan *taudi'* adalah keterlepasan dan kemandirian. Pada tahap ini, jamaah telah siap menjadi masyarakat mandiri, terutama secara manajerial. Bila ketiga tahap ini telah dijalankan, bolehlah berharap akan munculnya suatu masyarakat Islam yang memiliki kualitas yang siap dipertandingkan dalam kelompok-kelompok masyarakat lain.

Dalam perspektif pemberdayaan, jamaah terbentuk apabila kelompok tersebut menerima pengetahuan, menerima bujukan, putusan, mengimplementasikan, dan pemastian. Menerima pengetahuan maksudnya, sekumpulan orang yang akan dibina disadarkan akan potensi-potensi yang ada. Potensi jamaah adalah kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan kehidupan, seperti problema kehidupan sosial, agama, ekonomi, politik, dan budaya. Pada tahap ini, pemberdaya berupaya menumbuhkan kesadaran berpikir tentang potensi jamaah dalam menjaga kelestarian agama, sosial dan budaya, serta keuntungan-keuntungan yang mungkin dapat diperoleh melalui berjamaah.

Menerima bujukan, maksudnya pemberdaya harus sabar mengajak dan menasehati calon jamaah agar segera berbuat dan mengikuti saran-sarannya. Pada tahap ini diupayakan agar jamaah dengan kesadaran pribadinya terdorong untuk melakukan *action*. Inilah yang harus diputuskan oleh sekelompok orang, agar segera buat bukan sekedar berpendapat. Tahap ini disebut juga tahapan menumbuhkan kesadaran bertindak bagi masyarakat.

Tahap putusan yang dimaksud adalah tahap masyarakat untuk segera mengambil kesimpulan, memulai aksi atau tidak. Beberapa tahap sudah dilewati, penumbuhan kesadaran untuk merubah pendapat (kesadaran berpikir), persuasif atau membujuk untuk ber-*action*, dan kini saatnya untuk memutuskan segera ber-*action*.

Penjelasan-penjelasan yang menerpa masyarakat, semua diproses dalam otak, dan melahirkan gerak atau tidak, untuk mengambil tindakan yang tepat. Jika pesan-pesan pada

tahap sebelumnya berhasil menyentuh kesadaran masyarakat, maka kemungkinan besar pesan itu akan diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata.

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan proses pengembangan masyarakat ?
2. Dalam pengembangan masyarakat, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan yakni proses dan tujuan. Coba Anda jelaskan mana yang lebih penting proses atau tujuan ?
3. Coba Anda jelaskan tahapan-tahapan pengembangan masyarakat islam berikut ini :
 - Takwin
 - Tanzim
 - Taudi'
4. Jelaskan alasan perlunya tahapan Taudi' dalam pengembangan masyarakat dan bagaimana peran pendamping sosial pada tahapan ini !

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Mathews dalam Totok dan Poerwoko¹⁵ menyatakan bahwa prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Oleh karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan sebuah kegiatan. Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, leagans, 1961, dalam Totok dan Poerwoko,¹⁶ menilai bahwa setiap fasilitator atau penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang disepakati, maka mustahil dapat melaksanakan kegiatan dengan baik.

A. Prinsip-Prinsip Dakwah Pengembangan Masyarakat

Dua prinsip dasar dakwah pengembangan masyarakat Islam:

1. Dakwah pengembangan masyarakat Islam berorientasi pada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat luas. Dakwah tidak hanya untuk kebutuhan sesaat umat, tidak pula keinginan sekelompok umat, namun perlu direncanakan, disusun untuk tujuan jangka panjang untuk membenahi tata kehidupan sosial masyarakat. Kecuali kelompok elit yang jadi panutan dalam masyarakat, pengambil kebijakan, maka dakwah kepada mereka ini untuk menyadarkan dan mengingatkan terhadap persoalan-persoalan kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat.
2. Dakwah pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah upaya melakukan social engeneering/ rekayasa sosial untuk mendapatkan suatu perubahan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik. Dakwah pengembangan masyarakat merupakan suatu proses perencanaan perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Adapun prinsip-prinsip dalam Dakwah Pengembangan Masyarakat :

1. Prinsip kebutuhan

Program dakwah harus didasarkan atas dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena itu tujuan dakwah harus disusun bersama dengan masyarakat atau *key informan* masyarakat.

¹⁵ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development...*, hlm. 105

¹⁶ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development...*, hlm. 105

2. Prinsip partisipasi

Dakwah ini menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses dakwah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, penilaian dan pengembangannya. Prinsip ini bertujuan mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan, upaya meningkatkan kualitas peran masyarakat dari sekedar mendukung, menghadiri, menjadi kontributor program dakwah, dan meningkatkan efektivitas fungsi dan peran pemimpin lokal.

3. Prinsip Keterpaduan

Adanya upaya untuk memadukan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dai yang berpijak pada komitmen *development community*, maka dia adalah bagian dari dakwah pengembangan masyarakat. Ini pula perlunya dakwah lintas budaya, lintas sektoral dan *integrated or holistic strategy* merupakan pilihan yang tepat dalam proses dakwah model ini.

4. Prinsip berkelanjutan

Prinsip ini menekankan agar dakwah itu harus *sustainable*, artinya dakwah itu harus berkelanjutan yang tidak dibatasi oleh waktu. Ini disebut dalam al-Quran sebagai prinsip yang *istiqamah* yang mampu menciptakan kesejahteraan dan kedamaian lahir dan batin.

5. Prinsip keserasian

Program dakwah pengembangan masyarakat islam harus mempertimbangkan keserasian kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah, adanya keseimbangan kedua kebutuhan manusia tersebut.

6. Prinsip Kemampuan sendiri

Dakwah pengembangan ini menegaskan bahwa kegiatan dakwah disusun dan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan sumber-sumber yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Dai hanyalah *Training of Trainer* (ToT), dan *Training of Fasilitator*, merekrut dai-dai lokal. Kader-kader dakwah tersebut bertindak nantinya sebagai *agent of change*, dan *agent of development* masyarakat yang mencerminkan sikap dan perilaku partisipatif bagi kemajuan masyarakat di masa mendatang.

B. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat

Selain prinsip-prinsip dakwah pengembangan masyarakat di atas, Jim Ife¹⁷ menguraikan beberapa prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, berdasarkan perspektif pengembangan masyarakat yang ada.

1. Prinsip-prinsip ekologis
2. Prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia
3. Prinsip-prinsip proses
4. Prinsip-prinsip global dan lokal

Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip-prinsip ekologis (holisme, berkelanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, dan perkembangan yang seimbang), prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia (mengatasi struktur yang merugikan, mengatasi wacana-wacana yang merugikan, pemberdayaan, hak asasi manusia, definisi kebutuhan, menghargai pengetahuan lokal, menghargai budaya lokal, menghargai sumber daya lokal, menghargai keterampilan masyarakat lokal, menghargai proses lokal dan partisipasi), prinsip-prinsip proses (proses, hasil dan visi, integritas proses, menumbuhkan kesadaran, kerja sama dan konsensus, langkah pembangunan, perdamaian dan anti kekerasan, inklusivitas, membangun masyarakat), prinsip-prinsip global dan lokal (menghubungkan yang global dan lokal, praktik anti kolonialis).

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Apa yang Anda pahami tentang prinsip ?
2. Jelaskan dua prinsip dasar dakwah pengembangan masyarakat !
3. Jelaskan maksud dari prinsip-prinsip dakwah pengembangan masyarakat berikut :
 - Prinsip Kebutuhan
 - Prinsip Partisipasi
 - Prinsip Keterpaduan
 - Prinsip Keberlanjutan
 - Prinsip Keserasian
4. Jelaskan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat berikut ini :
 - Prinsip-prinsip ekologis
 - Prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia
 - Prinsip-prinsip proses
 - Prinsip-prinsip global dan lokal

¹⁷ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development...*, hlm. 494-544

BAB V

PENGEMBANGAN MASYARAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN

A. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Kata pemberdayaan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, pemerintah dan penggerak masyarakat yang bergerak pada sektor ekonomi sosial. Bahkan kata pemberdayaan menjadi acuan baru paradigma pembangunan sehingga pemberdayaan menjadi keharusan dalam setiap upaya pembangunan. Akhir-akhir ini, kata pemberdayaan sering digunakan oleh pejabat pemerintah. Pemberdayaan yang mereka pahami adalah mengarah pada membangkitkan, memfungsikan dan memanfaatkan kembali.

Pemberdayaan, secara etimologi merupakan kata benda yang berasal dari kata dasar “daya” yang mendapatkan imbuhan. Daya¹⁸ berarti kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna, sangkil atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik atau angka persen yang menunjukkan perbandingan antara tenaga yang diperoleh dengan tenaga yang diperlukan. Dalam KBBI,¹⁹ daya berarti (a) kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, (b) kekuatan; tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak, (c) muslihat dan (d) akal; ikhtiar; upaya. Kata daya mendapatkan awalan *ber* sehingga menjadi berdaya²⁰ berarti (a) berkekuatan; berkemampuan; bertenaga; (b) mempunyai akal untuk mengatasi sesuatu. Selanjutnya, kata berdaya kembali mendapatkan imbuhan *pe-an*, sehingga menjadi kata pemberdayaan. Pemberdayaan berarti *to give power or authority to* artinya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain atau *to give ability or enable* artinya upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata *empowerment* mulai ramai dibicarakan bersandingan dengan pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*). Theresia Aprillia et.al.,²¹ mengungkapkan bahwa penggunaan kata pemberdayaan yang selaku disematkan dengan program pengentasan kemiskinan, sejak digulirkannya program Inpres No.5/1993 yang kemudian dikenal dengan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dengan pengentasan kemiskinan menjadi saudara kembar yang selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan.

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Daya,” <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=daya&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel> (akses 17 Maret 2014).

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Arti Daya,” <http://kbbi.web.id/daya> (akses 17 Maret 2014).

²⁰<http://artikata.com/arti-362279-berdaya.html>

²¹Aprilia Theresia, et al. *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 115

Fear and Schwarzweller (1985) dalam Aprillia Theresia mengemukakan definisi pemberdayaan sebagai berikut *“A process in which increasingly more members of a given area or environment make and implement socially responsible decisions, where the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without a decrease (without deteriorating) in the life chances of others.”*²² Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dimana anggota semakin lebih dari daerah tertentu atau lingkungan membuat dan melaksanakan keputusan yang bertanggung jawab secara sosial, di mana kemungkinan konsekuensi yang adalah peningkatan peluang hidup beberapa orang tanpa penurunan (tanpa memburuk) dalam kesempatan hidup orang lain

Definisi yang dikemukakan Fear and Schwarzweller seperti yang dikemukakan Theresia et al., di atas mengandung kata kunci bahwa pemberdayaan merupakan proses menjadikan perubahan bagi kelompok sosial yang mana kehidupan satu kelompok menjadi lebih baik dengan tidak mengurangi mengganggu kelompok lainnya.

Dalam hubungan ini, Robbins, Chatterje dan Canda secara singkat mengemukakan bahwa pemberdayaan sebagai berikut *“Process by which individual and groups gain power, access to resources and control over their own lives. In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collective aspirations and goals.”*²³ Maksudnya, pemberdayaan adalah proses yang mana individu dan kelompok mendapatkan kekuasaan, akses ke sumber daya dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Dalam melakukannya, mereka mendapatkan kemampuan untuk mencapai aspirasi dan tujuan mereka tertinggi pribadi dan kolektif.

Definisi pemberdayaan berbeda dari satu pakar dengan pakar lainnya, tergantung pada konteks dan penekanannya. Berikut ini ditampilkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang telah berkontribusi memberi penjabaran pemberdayaan. Ife mengartikan pemberdayaan, *“Empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skill to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and effect of their community.”*²⁴ Pendapat ini ditranslit oleh Nanang Martono mengartikan bahwa pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan/peluang, pengetahuan dan keahlian untuk

²²Aprilia Theresia, et al. *Pembangunan Berbasis...*, hlm. 115

²³Aprilia Theresia, et al. *Pembangunan Berbasis...*, hlm. 115

²⁴Agus Sjaferi dan Kandung Sapto Nugroho, *Perubahan Sosial: Sebuah Bunga Rampai*, (Serang: FISIP Untirta, 2012), hlm. 12

meningkatkan kapasitas diri masyarakat itu dalam menentukan masa depan mereka serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.²⁵

Mas'ood mengartikan pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Sumodiningrat mengartikan pemberdayaan adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Pranarka mendefinisikan pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Rappaport mengartikan pemberdayaan sebagai berikut *"Empowerment is viewed as a process the mechanism by which people, organization and communities gain mastery over their lives."* Pengertian ini maksudnya pemberdayaan dipandang sebagai suatu proses mekanisme yang orang, organisasi dan masyarakat memperoleh penguasaan atas kehidupan mereka. Schneider mengartikan pemberdayaan sebagai berikut.

*"Empowerment goes well beyond the narrow realm of political power, and differs from the classical definition of power by Max Weber. Empowerment is used to describe the gaining of strength in the various ways necessary to be able to move out of poverty, rather than literally taking over power from somebody else at the purely political level. This mean, it includes knowledge, education, organization, rights, and voice as well as financial and material resources."*²⁶

Pengertian yang diberikan oleh Schneider yang mengartikan pemberdayaan merupakan upaya untuk keluar dari kehidupan yang sempit dari kekuasaan politik. Berbeda dari definisi klasik kekuasaan oleh Max Weber. Pemberdayaan digunakan untuk menggambarkan memperoleh kekuatan dalam berbagai cara yang diperlukan untuk dapat keluar dari kemiskinan, ketimbang benar-benar mengambil alih kekuasaan dari orang lain. Ini berarti, pengetahuan, pendidikan, organisasi, hak, dan suara serta sumber daya keuangan dan material.

Hacker mengartikan pemberdayaan sebagai berikut, *"Empowerment may be understood as a process of transformation. This includes the transformation of the unequal power relationship, unjust structures of society, and development policies. Empowerment also means transformation in the sense of changing and widening of individual's opportunities."* Hacker menyebutkan bahwa pemberdayaan itu sebagai proses transformasi.

²⁵ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)

²⁶ Aprilia Theresia, et al. *Pembangunan Berbasis....*, hlm. 116

Ini termasuk transformasi kekuatan hubungan, struktur yang tidak adil dari masyarakat, dan kebijakan pembangunan. Osmani mengemukakan definisi pemberdayaan sebagai berikut, *“Empowerment may socio-politically be viewed as a condition where powerless people make a situation so that they can exercise their voice in the affairs of governance.* Osmani mencoba mendefinisikan pemberdayaan dari sisi sosio-politik, kondisi dimana sekelompok orang-orang yang tidak berdaya membuat suatu gerakan dan merubah situasi sehingga mereka dapat menyuarakan aspirasi mereka dalam pemerintahan. Dharmawan mengartikan pemberdayaan sebagai berikut *“A process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions and to more easily access to a source of better living.”* Pendapat dharmawan ini mencoba mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses yang maksimal untuk meraih kekuatan yang memungkinkan sekelompok orang untuk memperluas kemampuan, memiliki daya tawar yang lebih besar, ikut serta dalam membuat keputusan dan mempermudah akses ke sumber penghidupan yang lebih baik.

Subejo dan Narimo menyebutkan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelolah sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Swift dan Levin (1987) seperti yang dikutip Theresia, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk (1) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan (2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll. World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau

menyuarakan pendapat, ide atau gagasan-gagasannya serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Pengertian yang dikemukakan *World Bank*, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti perbaikan ekonomi terutama kecukupan pangan, perbaikan kesejahteraan sosial, kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, terjaminnya keamanan, terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Maksudnya, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang pemberdayaan dalam menghadapi yang kuat.²⁷

Istilah pemberdayaan lahir dari kata bahasa Inggris yaitu *empower* yang artinya memberi kuasa atau wewenang kepada (orang lain). Menurut Dahl (1993) pemberdayaan yang berasal dari kata *empowerment* sangat berkaitan dengan kekuatan atau kekuasaan. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kekuatan atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak lainnya lagi. Selain itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang adil (Paul, 1987), agar yang lemah memiliki kesadaran berpolitik serta dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Abu Huraerah²⁸ merangkum pendapat para ahli mengenai pemberdayaan, sebagai berikut, pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang secara harfiah bisa diartikan sebagai pemberkuasaan dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*). *Empowerment aims to increase the power of disadvantaged*, demikian menurut Jim Ife. Swift dan Levin mengatakan pemberdayaan menunjuk pada usaha *reallocation of power* melalui perubahan struktur sosial. Selanjutnya, Rappaport mengungkapkan pemberdayaan

²⁷ Aprilia Theresia, et al. *Pembangunan Berbasis...*, 119-120

²⁸ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 1997), hlm. 96

adalah suatu cara dengan mana rakyat mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Craig dan Mayo mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep-konsep kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*) dan pemerataan (*equity*).

B. Pemberdayaan Sebagai Proses

Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan, dan mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individu, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala (*upgrade*) utilitas dari objek yang diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Dalam kaitan ini, usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional bahkan menjadi titik pijak dalam program nasional. Di sini masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan perikehidupan mereka sendiri. Selain itu, mereka juga menemukan solusi yang tepat dan mengakses sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya eksternal maupun sumber daya masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka, dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok yang terabaikan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

Penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat adalah kelompok-kelompok marjinal dalam masyarakat termasuk wanita namun demikian ini berarti tidak menafikan partisipasi pihak-pihak lain dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf, dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada tingkat penentu kebijakan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan yang semakin terbatas. Hal ini akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan memperkuat keberlanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab. Tentang hal ini, banyak program donor baik bilateral maupun multilateral dan program-program lembaga non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) merupakan contoh yang berhasil mengenalkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat selama beberapa tahun lamanya.

Program seperti secara umum berkonsentrasi pada pengembangan keterampilan dan perilaku di tingkat kelompok tani. Perubahan pada tingkat kebijakan terutama mereka yang berada dalam situasi pemerintahan, terabaikan. Padahal perubahan kelembagaan sangat besar kontribusinya terhadap peningkatan kehidupan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dalam skala besar. Kenyataannya, perubahan struktur dan kebijakan yang

dibutuhkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat membutuhkan lebih banyak sumber daya dibandingkan untuk tingkat lapangan.

Dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat sejumlah hambatan kebijakan dan kelembagaan dalam menerapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil. Hambatan ini antara lain adalah terbatasnya komitmen dan pemahaman manajer senior dan para penentu kebijakan terhadap prinsip dan keuntungan yang bisa diperoleh dari pendekatan pemberdayaan masyarakat serta kurangnya orientasi pada klien oleh aparat pemerintah dan perencanaan yang bersifat membatasi.

Selaras dengan perkembangan peradaban manusia telah terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat alami atau disebabkan oleh perubahan-perubahan kondisi lingkungan fisik maupun perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat ulah atau perilaku manusia di dalam kehidupannya sehari-hari.

Sebagai akibat dari terjadinya perubahan-perubahan tersebut kebutuhan-kebutuhan manusia juga semakin berubah, baik dalam ragam, jumlah dan bentuk-bentuk kebutuhannya. Pada masyarakat yang masih sederhana mereka hanya membutuhkan tiga macam kebutuhan pokok berupa pangan/makanan, sandang/pakaian, dan papan/pemukiman. Tetapi dengan semakin berkembangnya peradaban (pengetahuan, keinginan, aspirasi, atau harapan-harapan, teknologi yang digunakan, dll), kebutuhan pokok itu terus berubah dan bertambah dengan pendidikan dan kesehatan, rekreasi dan transportasi, dll. Bahkan kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak hanya menyangkut kebutuhan fisik, tetapi meingkat lagi termasuk kebutuhan non fisik seperti spiritual, kebebasan, keadilan, gaya hidup (*life style*), dll.

Dari jumlahnya juga terjadi perubahan. Kebutuhan pangan misalnya telah terjadi perubahan dari yang semula lebih mengutamakan jumlahnya ke arah pengurangan jumlah kepada yang lebih mengutamakan mutunya. Kebutuhan pakaian juga mengalami perubahan dari yang lebih mengutamakan mutu bahan (kekuatan) daripada jumlahnya, ke arah yang lebih mengutamakan keragaman fungsinya (pakaian sehari-hari, pakaian kerja, pakaian pesta, dll). Demikian juga tentang perumahan yang semula lebih mengutamakan luasan atau volume bangunan ke arah minimalis sesuai dengan fungsinya.

Di samping itu, perubahan-perubahan yang terjadi juga tidak hanya sekedar dalam ragam dan jumlah tetapi juga bentuk dan kualitasnya. Untuk pangan, akhir-akhir ini terjadi perubahan dalam penyajian dan mutu bahan. (Pangan vegetarian, fast food, junk food, pangan organik, dll). Perubahan kebutuhan terhadap pakaian telah mengalami perubahan-

perubahan rancangan (design, mode) sesuai dengan tempat waktu penggunaannya serta kualitas atau mutu bahan baku yang diperlukan dan cara yang diperlukan untuk membuat pakaian tersebut. Demikian pula mengenai perumahan yang tidak lagi patuh dengan arsitektur tradisional ke arah arsitektur dari negara lain, seperti Eropa, Mediteran, Jepang, dll.

Terkait dengan perubahan-perubahan tersebut, Lippit, dkk (1985) mengemukakan bahwa perubahan-perubahan yang disebabkan oleh perilaku manusia itu pada dasarnya disebabkan dua hal:

- a. Adanya keinginan manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang semakin berubah dan atau keinginan mereka untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan memodifikasi atau memanipulasi sumberdaya dan lingkungan di sekelilingnya melalui penerapan ilmu pengetahuan yang dikuasainya.
- b. Adanya atau telah dikemukakannya inovasi-inovasi yang memberikan peluang atau menumbuhkan aspirasi-aspirasi baru bagi setiap manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan atau memperbaiki kesejahteraan hidupnya tanpa harus mengganggu lingkungan aslinya.

Kedua alasan seperti itulah yang sering menumbuhkan motivasi pada seseorang dan atau masyarakat/bangsa untuk melakukan upaya-upaya tertentu yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan. Sebab jika ia tetap tinggal diam akan menjadi orang terbelakang dan ketinggalan.

Sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan kebutuhan tersebut, Dahama dan Bhatnagar (1980) mengemukakan faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan, yang meliputi:

- a. Adanya keinginan manusia untuk selalu melakukan modifikasi tentang kebutuhan-kebutuhan baik untuk menghadapi masalah-masalah jangka pendek maupun jangka panjang. Selaras dengan itu, setiap individu atau masyarakatnya juga terus-menerus melakukan koreksi-koreksi terhadap cara atau upaya-upaya serta teknologi yang harus diterapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru tersebut.
- b. Terjadinya persaingan-persaingan antar individu atau masyarakat senantiasa ingin memenuhi kebutuhan dan hal ini hanya dapat dimenangkan melalui upaya-upaya perubahan dengan mengeksploitasi atau memodifikasi sumber daya fisik dan non fisik yang tersedia dan dapat dimanfaatkan di lingkungan.
- c. Terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan fisik dan kelembagaan sebagai akibat persaingan antar individu atau antar masyarakat yang saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menghadapi keadaan dunia dan perubahan zaman seperti itu setiap individu dan masyarakatnya sebenarnya dapat memilih yaitu menunggu terjadinya perubahan yang bersifat alami yang berupa gerakan-gerakan alami menuju kepada keseimbangan dan

keselarasan baru ataukah secara aktif melalui upayanya sendiri atau bersama-sama lingkungan sosialnya melakukan upaya-upaya khusus untuk mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadinya di sekitar lingkungannya itu.

Jika ia memilih alternatif yang pertama dengan relatif tidak atau sedikit melakukan pengorbanan sumberdaya, ia harus mau menghadapi resiko ketinggalan zaman sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sebaliknya jika memilih alternatif yang kedua, mereka harus siap untuk bersaing dan memenangkan persaingan dengan sesamanya yang pada hakikatnya juga senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan menikmati kebutuhan yang serba kecukupan baik fisik dan non fisik untuk memperbaiki kesejahteraannya.

Dengan perkataan lain, untuk mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya setiap warga masyarakat secara individual atau bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain harus merancang kegiatan-kegiatan yang menuju kepada perubahan-perubahan yang lebih cepat dibanding perubahan-perubahan yang akan berlangsung secara alami menuju kepada kondisi keseimbangan baru yang tidak alami tetapi berdasarkan upaya manusia melalui kegiatan-kegiatan pembangunan atau perubahan yang terencana.

Perubahan terencana pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dinamis yang direncanakan oleh seseorang secara individu atau yang tergabung dalam suatu lembaga-lembaga sosial. Artinya perubahan tersebut memang menuntut dinamika masyarakat untuk mengantisipasi keadaan-keadaan di masa mendatang (yang diduga akan mengalami perubahan) melalui pengumpulan data baik yang aktual maupun yang potensial dan menganalisisnya untuk kemudian merancang suatu tujuan-tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan di masa mendatang. Oleh sebab itu, perubahan terencana selalu menuntut adanya perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

C. Pemberdayaan merupakan proses sekaligus tujuan

Pemberdayaan sebagai proses sekaligus tujuan. Dikatakan sebagai proses karena pemberdayaan merupakan program berkelanjutan. Pemberdayaan memakan waktu lama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemberdayaan melalui tahap demi tahapan sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses maksudnya pemberdayaan adalah

serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan maksudnya pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Sunyoto Usman dalam Alfitri²⁹ menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat kemandirian masyarakat. Pemberdayaan merupakan Sumadyo dalam Theresa et. ell, merumuskan tiga pokok yang ada dalam pemberdayaan untuk mencapai kemandirian, yaitu pembinaan sumber daya manusia, pembinaan usaha, dan pembinaan lingkungan. Pendapat ini ditambahkan oleh Mardikanto atas pentingnya pembinaan kelembagaan karena lembaga atau kelompok yang kuat mampu menghadapi semua dinamika sepanjang pemberdayaan berlangsung.

Pemberdayaan sebagai tujuan maksudnya melalui program pemberdayaan tersebut diharapkan terjadinya perubahan objek pemberdayaan. Perubahan yang dimaksud, dari kondisi tidak berdaya menjadi berdaya, dan dari kebergantungan menjadi mandiri.

D. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Bertolak pada asumsi bahwa pemberdayaan merupakan proses pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Mengerjakan

Kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin untuk mendorong masyarakat untuk mengerjakan suatu kegiatan. Masyarakat yang mengerjakan suatu kegiatan maka berarti ia telah mengalami proses belajar yang dapat diingat dalam jangka waktu yang lama.

2. Akibat

Kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik dan bermanfaat. Perasaan masyarakat apakah senang atau tidak, suka atau tidak, akan mempengaruhi partisipasinya pada kegiatan pemberdayaan di masa mendatang.

3. Asosiasi

²⁹ Alfitri, *Community Development; Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 22

Kegiatan pemberdayaan yang satu mesti berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan yang lainnya. Misal saja ketika masyarakat melihat cangkul maka masyarakat diingatkan pada pengelolaan lahan yang baik, melihat tanaman kerdil tidak subur telah mengingatkan masyarakat bahwa perlunya pemupukan.

Lebih lanjut, Dahama dan Bathnagar, mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup:

- a. Pemberdayaan yang baik selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat
- b. Melibatkan organisasi masyarakat bawah/ lokal
- c. Kegiatan pemberdayaan harus disesuaikan dengan keragaman budaya masyarakat lokal yang berbeda pada satu daerah dengan daerah lainnya.
- d. Kegiatan pemberdayaan berdampak pada perubahan budaya karena itu perlu pekerja masyarakat berhati-hati agar perubahan terjadi tidak menimbulkan kejutan budaya, melawan budaya lokal secara frontal.
- e. Kegiatan pemberdayaan akan efektif jika pendamping masyarakat mampu bekerja sama dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam setiap kegiatan.
- f. Demokrasi dalam penerapan ilmu, dengan menawarkan kepada masyarakat ilmu terapan yang mana untuk dijadikan alternatif dalam mendukung kegiatan pemberdayaan itu. Menawarkan metode pemberdayaan dan pengambilan keputusan secara bersama-sama antara fasilitator dengan masyarakat.
- g. Belajar sambil bekerja. Dalam pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan kegiatan itu dilakukan sambil belajar, jadi belajar sambil kerja atau kerja sambil belajar, belajar dari pengalaman kegiatan yang dilaksanakan tersebut.
- h. Penggunaan metode yang sesuai dengan kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal yang menjadi sasaran pemberdayaan itu.
- i. Kepemimpinan, yang mana penyuluh harus mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal pada lembaga masyarakat lokal.
- j. Penyuluh masyarakat itu harus spesialis yang terlatih
- k. Penyuluh itu mesti memperhatikan segenap keluarga yang merupakan satu kesatuan unit dari sistem sosial.
- l. Kepuasan dari sebuah proses dan hasil sehingga akan menumbuhkan minat partisipasi masyarakat pada kegiatan selanjutnya.

E. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan menurut World Bank mensyaratkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk terjaminnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menyangkut:

- a. Perbaikan modal finansial berupa perencanaan ekonomi-makro dan pengelolaan fiskal.
- b. Perbaikan modal fisik berupa prasarana, bangunan, mesin dan juga pelabuhan.
- c. Perbaikan modal sumber daya manusia berupa perbaikan kesehatan dan pendidikan yang relevan dengan pasar kerja.
- d. Pengembangan modal sosial yang menyangkut keterampilan dan kemampuan masyarakat, kelembagaan, kemitraan dan norma hubungan sosial lainnya.
- e. Pengelolaan sumber daya alam, baik yang bersifat komersial maupun non komersial bagi perbaikan kehidupan manusia termasuk air bersih, energi, serat, pengelolaan limbah, stabilitas iklim dan beragam layanan penunjangnya.³⁰

Sementara itu, Aprilia Theresia et. al³¹ merumuskan tujuan pemberdayaan meliputi aneka ragam perbaikan.

- a. Perbaikan kelembagaan, dengan melakukan perbaikan tindakan dan kegiatan diharapkan dapat memperkuat kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaikan usaha dengan melakukan perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas dan kelembagaan diharap mampu memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan pendapatan dengan dimulainya perbaikan bisnis, dapat pula mendorong terjadinya perbaikan pendapatan bagi keluarga dan masyarakat yang bersangkutan.
- d. Perbaikan lingkungan, dengan meningkatnya pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e. Perbaikan kehidupan maksudnya dengan membaiknya tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaikan masyarakat maksudnya keadaan lingkungan kehidupan yang lebih baik didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik diharapkan akan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik.

F. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Suharto dalam Abu Huraerah³² menjelaskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan yang dapat disingkat menjadi 5 P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

³⁰ Aprilia Theresia, et al. *Pembangunan Berbasis...*, hlm. 152

³¹ Aprilia Theresia, et al. *Pembangunan Berbasis...*, hlm. 153-154

³² Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 218-219

- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat miskin.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Aziz³³ merinci tahapan yang seharusnya dilalui dalam pemberdayaan. *Pertama*, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. *Kedua*, melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut secara mandiri. *Ketiga*, menentukan skala prioritas masalah. *Keempat*, mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. *Kelima*, melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah. *Keenam*, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan untuk dinilai sejauhmana keberhasilan dan kegagalannya.

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Jelaskan defenisi Pemberdayaan masyarakat !
2. Jelaskan istilah pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife !
3. Jelaskan tiga unsur dalam upaya pemberdayaan masyarakat !
4. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan sebagai sebuah proses dan sebuah tujuan ?
5. Jelaskan tujuan pemberdayaan masyarakat !

³³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/45504/3/Chapter%20II.pdf>

BAB VI

MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Definisi Partisipasi

Partisipasi menurut kamus adalah *act of participating* yang berarti pengambilan bagian atau keikutsertaan. Menurut Keith Davis dalam Abu Huraerah³⁴ *participationis defined as mental and emotional involvement of persons in group situations that encourage them to contribute to group goals and share responsibility for them*. Maksud dari definisi ini adalah, partisipasi itu adanya keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi dan sama-sama bertanggung jawab.

Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Partisipasi adalah pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Partisipasi adalah suatu proses aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan pelaksanaan monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dapat dipahami bahwa partisipasi meliputi proses aktif (inisiatif untuk melakukan sesuatu), sukarela (ikut/ tidak dalam mengambil keputusan), dialog (pemerintah-warga), keterlibatan (dilibatkan atau melibatkan diri).

B. Lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat, diantaranya:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, tanpa kehadirannya maka proyek-proyek dan program pemerintah akan gagal.

³⁴ Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 109

2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek itu.
3. Merupakan hak demokrasi masyarakat jika masyarakat itu dilibatkan dalam pembangunan masyarakat dan lingkungan kelompok sasaran itu sendiri. Mereka ambil bagian dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungannya, yang tentu saja berdasarkan asas kebutuhan, prioritas dan manfaat.

C. Bentuk-bentuk partisipasi

Pendapat Hamijoyo dan Iskandar dikutip Pasaribu dan Simanjuntak (1986:349) dikutip Abu Huraerah memperinci jenis-jenis partisipasi meliputi:

1. Partisipasi buah pikiran
2. Partisipasi tenaga
3. Partisipasi harta benda
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran
5. Partisipasi sosial

Menurut Sulaiman (1985:23) dikutip Abu Huraerah menyebutkan ada lima macam partisipasi:

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan
- d. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- e. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

D. Tingkatan partisipasi

Menurut Asia Development Bank dalam Soegijoko, 2005, dikutip Abu Huraerah, tingkatan partisipasi itu meliputi:

1. Berbagi informasi bersama
2. Konsultasi atau mendapatkan umpan balik
3. Kolaborasi atau pembuatan keputusan bersama
4. Pemberdayaan atau kendali

Hoofsteede dalam Khairuddin dikutip oleh Abu Huraerah membagi tiga tingkatan partisipasi:

- a. Partisipasi inisiasi, partisipasi yang mengandung inisiatif dari anggota masyarakat, pemerintah atau sipil, kemudian ide/inisiatif itu disalurkan (*sharing*) melalui perangkat yang ada di dalam masyarakat itu.

- b. Partisipasi legitimasi, partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek itu.
- c. Partisipasi eksekusi, partisipasi pada tingkat pelaksanaan untuk mewujudkan proyek/program yang telah dilegitimasi sebelumnya. Tahapan ini berkaitan juga dengan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

E. Motif Partisipasi

1. Motif psikologi, kepuasan pribadi, pencapaian prestasi atau rasa telah mencapai sesuatu dapat menjadi motivasi kuat bagi seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan meski tidak mendatangkan keuntungan materi. Yang didapat hanya kesempatan untuk mengekspresikan diri, menyatakan aspirasinya dan keleluasaan dalam mengalokasikan sumber daya.
2. Motif sosial, ada dua sisi motif sosial, yaitu untuk memperoleh status sosial dan untuk menghindarkan dari terkena pengendalian sosial. Orang akan sukarela berpartisipasi jika keikutsertaannya itu mendatangkan keuntungan meningkatnya status sosial pada masyarakat tersebut, dan sebaliknya orang terpaksa ikut berpartisipasi pada suatu kegiatan karena takut dikucilkan dalam pergaulan sosial, ini namanya menghindarkan diri dari sanksi sosial.
3. Motif keagamaan, kepercayaan yang tinggi atas kekuatan yang berada di luar diri pribadi manusia, sehingga agama sebagai sistem sosial memberikan berbagai macam fungsi bagi pemeluknya untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
4. Motif ekonomi, laba atau profit mendorong seseorang untuk aktif dan mendorong orang untuk mengambil keputusan. Dengan nalar seperti ini, orang akan mengambil ikut berpartisipasi manakala kegiatan-kegiatan itu dapat menghasilkan keuntungan bagi dirinya.
5. Motif politik, dasar utama politik adalah kekuasaan. Orang akan ikut berpartisipasi bila ia mendapat bagian dari kekuasaan yang akan mengikat pada masyarakat itu. Besar atau kecilnya partisipasi seseorang ditentukan pula oleh besar atau kecilnya kekuasaan yang akan diduplikatnya.

F. Pengelompokan partisipasi

Ada tiga konsep partisipasi jika dikaitkan dengan praktik pembangunan masyarakat yang demokratis, sebagaimana dikemukakan oleh Gaventa dalam Suhirman (2003) dikutip ulang oleh Abu Huraerah.³⁵

- a. Partisipasi politik
- b. Partisipasi sosial
- c. Partisipasi warga

G. Pendekatan Pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi

Adapun pendekatan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ada tiga hal, yaitu: pendekatan fungsi tunggal, pendekatan bertingkat dan pendekatan sumberdaya dalam.

- a. Pendekatan fungsi tunggal
 - 1) keseluruhan program atau teknik pemberdayaan masyarakat ditangani oleh agen pembangunan dari luar
 - 2) pendekatan ini kurang mendapat respon positif dari masyarakat karena merasa sangat asing dengan program dari luar
 - 3) diakui sebagai inovasi yang baik, tapi sulit di adopsi
 - 4) dianggap akan menjadikan masyarakat tergantung pada bantuan orang lain sehingga inisiatif tidak berkembang
- b. Pendekatan bertingkat
 - 1) program pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh sebuah tim ahli dari luar
 - 2) cara yang dilakukan adalah dengan memberikan berbagai pelayanan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat
 - 3) pola ini dinilai tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimal, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar
- c. Pendekatan sumberdaya dari dalam
 - 1) menekankan pentingnya memotivasi masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhannya sendiri dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memecahkan permasalahan mereka

³⁵ Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 113

- 2) pendekatan ini mendidik masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kegiatan dan aktif memecahkan masalah yang mereka hadapi dengan memberdayakan potensi yang telah dimiliki.

H. Partisipasi itu pemberdayaan atau efisiensi?

Dua alternatif utama dalam pembangunan partisipasi, berkisar pada partisipasi sebagai tujuan pada dirinya sendiri, atau sebagai alat untuk mengembangkan diri. Logikanya, kedua intertretasi itu merupakan satu kesatuan, dan satu rangkaian. Keduanya mewakili partisipasi yang bersifat transformasional dan instrumental dalam suatu proyek tertentu, dan dapat kelihatan dalam kombinasi yang berbeda.

Partisipasi → Tujuan → Pemberdayaan

Sebagai sebuah tujuan, maka partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dengan demikian, partisipasi adalah alat dalam memajukan ideologi atau tujuan-tujuan pembangunan yang normatif seperti keadilan sosial, persamaan, dan demokrasi.

Partisipasi → Alat → Efisiensi

Partisipasi ditafsirkan sebagai sebuah alat, yang digunakan untuk mencapai efesiensi dalam manajemen proyek, sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Implikasi dari pernyataan bahwa partisipasi merupakan sebuah alat, partisipasi menyangkut strategi manajemen yang dengan itu negara mencoba memobilisasi sumber-sumbernya.

Tabel 2.1
Partisipasi: Efisiensi atau Pemberdayaan

	EFESIENSI	PEMBERDAYAAN
STRATEGI	Pembangunan melalui kemitraan “top-down” dengan masyarakat. (jangkauan ke bawah yang inklusif).	Pembangunan alternatif yang dirumuskan oleh masyarakat dan organisasi setempat. (jangkauan ke atas yang integratif).
ASUMSI NORMATIF	Masyarakat miskin harus dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti yang ditentukan oleh negara.	Masyarakat miskin harus memperoleh proyek pembangunan yang mereka sendiri tentukan.

ASUMSI DEDUKTIF	Ini mensyaratkan sebelumnya partisipasi dalam program pembangunan karena itu mereka harus dibuat mampu untuk lebih berpartisipasi lagi.	Ini mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan pikiran serta kehendak mereka.
TUJUAN	Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis, dan konflik antara kelompok-kelompok masyarakat diredam melalui pola demokrasi setempat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat mungkin.	Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis, dan konflik antara kelompok-kelompok masyarakat diredam melalui pola demokrasi setempat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat mungkin.
FUNGSI	Partisipasi masyarakat berdampak positif terhadap pembangunan.	Pembangunan menjadi positif bila ada partisipasi masyarakat.
	Partisipasi masyarakat merupakan alat efektif untuk memobilisasi sumber-sumber setempat (manusia dan alam), dengan tujuan melaksanakan program pembangunan tertentu.	Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang mutlak perlu untuk mendapatkan partisipasinya karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya untuk pembangunan kesejahteraan yang ditetapkan oleh masyarakat, kecuali masyarakat itu sendiri memiliki kemampuan untuk memaksa pemerintah

Club du Sahel (1988) mengatakan bahwa beroperasi (kerja) dengan partisipasi yang tingkat paksaan dan suka relanya berbeda-beda, demikian juga tingkat aktif dan pasifnya untuk mempromisikan partisipasi yang menekankan sifat suka rela dan aktif. Model partisipasi yang sukarela, aktif, namun mengikat lebih menjamin keterlibatan yang tulus dan ikhlas dari masyarakat. Partisipasi atas permintaan setempat, kegiatan bukanlah proyek yang tipikal, tidak ada jadwal untuk intervensi fisik, tidak ada anggaran untuk suatu periode tertentu, tidak ada rencana pelaksanaan atau struktur proyek, tidak ada komando satu arah dari proyek kepada kelompok sasaran. Masalahnya, bagaimana masyarakat setempat dapat memberi perhatian terhadap sesuatu yang baru dan berbeda, apabila sebelumnya mereka tidak mengetahui apapun mengenai apa yang akan terjadi. Metode yang dipakai adalah motivasi dan animasi bukan menjual atau mendorong. Pertanyaan sukarela dan permintaan untuk bantuan serta lebih banyak informasi jelas diperlukan.

Penggunaan metode partisipatoris di lapangan:

- Meninjau sumber-sumber sekunder (dokumen, statistik, laporan, bukti arsip, foto udara, dan peta).

- b. Pengamatan langsung
- c. Indikator-indikator kunci
- d. Wawancara semi terstruktur
- e. Ranking dan skoring
- f. Membuat dan menganalisis peta dan model
- g. Membuat diagram
- h. Studi kasus dan kisah-kisah
- i. Lokakarya skenario dan lokakarya tentang masa depan yang mungkin
- j. Triangulasi
- k. Laporan dan analisis berkelanjutan
- l. Penelitian sendiri, evaluasi, monitoring, penganggaran, dan rencana yang partisipatoris
- m. Lakukanlah sendiri

Syarat terjadinya partisipasi adalah adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Komunikasi pembangunan yang dilakukan untuk pengembangan masyarakat yaitu; menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, menginformasikan tentang adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Masalah-masalah dalam partisipasi adalah; (a) belum dipahami makna sebenarnya dari partisipasi itu oleh perencana dan pelaksana pembangunan, (b) adanya ideologi baru pembangunan yang memicu pemerintah menjaga ketat proses dan bersifat otoriter, (c) banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat.

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat ?
2. Mengapa partisipasi penting dalam kegiatan pengembangan masyarakat ?
3. Jelaskan apa saja motif-motif partisipasi masyarakat ?
4. Bagaimana pandangan islam terhadap motif partisipasi yang dikaji oleh ilmuan Barat ?
5. Jelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan masyarakat !

BAB VII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

A. Pembangunan Partisipatif

Munculnya paradigma pembangunan partisipatoris disebabkan sudah meluasnya kekecewaan atas hasil-hasil pembangunan. Sekalipun pemerintah sudah melakukan dengan maksimal dan bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan ini perlu pembenahan, dan memunculkan pendekatan pembangunan partisipatoris. Agar mencapai hasil-hasil pembangunan yang dapat berkelanjutan (*continuity*), banyak pakar sepakat bahwa pendekatan partisipatoris perlu diambil untuk menjabarkan logika dan strategisnya. Maksudnya, perlu ada penjelasan kepada masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan itu, baik penjelasan akan pentingnya sesuatu dibangun, dan menjelaskan bagaimana pembangunan sesuatu itu dilaksanakan. Pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan pada seluruh praktik dan pemikiran, di samping bantuan pembangunan. Ringkasnya, diperlukan suatu paradigma baru. (Pretty dan Guijt, 1992).

Ada dua perspektif pembangunan partisipatoris (Jamieson, 1989). **Perspektif pertama**, partisipatoris adanya pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. **Perspektif kedua**, membuat umpan balik (*feedback*) yang pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terlepas dari kegiatan pembangunan. Harus dipertimbangkan, siapa yang diajak berpartisipasi, maka jawabannya adalah kelompok sasaran, atau penerima bantuan pembangunan. Mereka ini, 40% adalah masyarakat miskin.

Siliwanti dalam Abu Huraerah menyebutkan ada beberapa faktor perencanaan pembangunan, yaitu:³⁶

a. Kualitas substansi perencanaan itu sendiri

Hal ini sangat terkait dengan isi perencanaan tersebut yang mempertimbangkan beberapa hal, kebutuhan masyarakat yang mendesak, arah kebijakan pembangunan, perkembangan dunia ke depan/globalisasi, dampak demokratisasi, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki.

b. Mekanisme atau proses perencanaan rencana

Pelaksanaan dialog dan konsultasi publik dengan masyarakat, lembaga perwakilan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lainnya, agar terdapat legitimasi secara utuh dari seluruh *stakeholders*.

c. Pelaksanaan rencana

Tindakan nyata/konkrit yang berada di dalam masyarakat untuk melaksanakan program tersebut secara konsisten, termasuk di dalamnya ketersediaan anggaran dan profesionalisme pelaksana rencana.

Penting perencanaan partisipatif bagi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam menetapkan sebuah rancangan program, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tersebut. Peran perencanaan sebagai penentu sukses sebuah kegiatan. Perencanaan merupakan usaha secara sadar, terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan ada dua, perencanaan yang bersifat memaksa (*top-down planning*) dan perencanaan melalui pendekatan dengan menghimpun aspirasi dan ide-ide dasar dari masyarakat bawah (*bottom-up planning*).

Masyarakat sebagai pengguna alam merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan atau pemberdayaan lingkungan. Oleh karena itu, partisipasi setiap individu masyarakat sangat menentukan keberlanjutan pemberdayaan.

Perencanaan partisipatif pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi tujuan dan menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam kegiatan yang nyata/konkrit. Perencanaan partisipatif akan diawali dengan survei kampung/lingkungan sendiri, di mana kegiatan ini dimaksudkan untuk memetakan kondisi fisik lingkungan dan sosial masyarakat. Untuk menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap hasil-hasil perencanaan, maka survei kampung/lingkungan sendiri dilakukan oleh masyarakat dan

³⁶ Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 79-80

didampingi oleh fasilitator. Hasil dari pemetaan tersebut selanjutnya menghasilkan data tentang kebutuhan masyarakat yang kemudian diinventarisasikan.

Metode menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dirumuskan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan pengetahuan mengenai kesehatan lingkungan.
- b. Menumbuhkan keinginan untuk mengatasi masalah lingkungan.
- c. Memberi pelatihan keterampilan dalam mengatasi masalah lingkungan, serta mengenalkan cara penggunaan alat-alat pendukung.
- d. Mengembangkan sistem, monitoring dan evaluasi.

B. Proses Perencanaan Partisipasi

Pembangunan partisipatif dimulai dengan proses perencanaan partisipatif, meliputi:³⁷

- a. Identifikasi masalah dan Needs Assessment

Identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan asessment kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya. Asessment kebutuhan dapat diartikan sebagai penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam populasi sasaran yang ingin diperbaiki atau penentuan kekurangan dalam kondisi yang ingin direalisasikan. Dalam melakukan asessment kebutuhan, mengidentifikasi dan memberikan penilaian terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait.

Jenis-jenis informasi yang diperlukan dalam tahapan ini adalah:

- 1) Profile masyarakat yang meliputi karakteristik demografi masyarakat yakni struktur usia, etnis, agama, daerah asal penduduk dan lamanya tinggal, dsb.
- 2) Profile kehidupan masyarakat yang meliputi data keadaan atau kejadian suatu masalah serta pola-pola kependudukan, yakni ekonomi (tingkat pendapatan, pengeluaran, pengaturan uang, pola-pola kredit), pekerjaan (jenis pekerjaan, sejarah pekerjaan, aspirasi pekerjaan dan kebutuhan keterampilan), pola-pola keluarga (hubungan orang tua-anak, masalah penyesuaian anak, masalah perkawinan, tingkat perceraian), pola pendidikan (tingkat pendidikan, penyesuaian sekolah anak, dan tingkat putus sekolah), perumahan (kepadatan, kondisi unit tempat tinggal, tingkat kekumuhan), kesehatan fisik dan mental (kecacatan, penyebab kematian, kejadian penyakit, kondisi lingkungan),

³⁷ Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 81

pengelolaan rumah (pengaturan rumah, perawatan rumah, gizi dan perawatan anak), pola-pola rekreasi, kriminalitas dan kepuasan hidup.

- 3) Pengetahuan dan penggunaan pelayanan-pelayanan sosial
- 4) Hambatan-hambatan penggunaan pelayanan sosial
- 5) Sistem informasi masyarakat yang ada
- 6) Asessment sumber meliputi assessment sumber-sumber potensial yang dapat digunakan sebelum perencanaan dan pengambilan keputusan.
- 7) Asessment sumber-sumber politik

Adapun metode yang digunakan untuk assessment kebutuhan itu meliputi kegiatan *brainstorming* (metode untuk menampung berbagai aspirasi, pendapat dan saran-saran dari populasi saran), *focus group discussion* (diskusi yang dirancang khusus membicarakan suatu masalah secara terfokus), *participatory decision making* (pengambilan keputusan secara bersama-sama populasi sasaran dan stakeholders), *stakeholders analysis* (analisis terhadap peserta, pengurus dan anggota suatu program dan isu-isu yang terjadi di sekitar kelompok masyarakat sasaran), *beneficiary assessment* (pengidentifikasian masalah sosial yang melibatkan konsultasi secara sistematis dengan para penerima pelayanan sosial).

b. Tujuan perencanaan partisipatif

- 1) Menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya proses partisipasi.
- 2) Menggali masukan, pendapat, usulan dan saran-saran dari masyarakat guna memperkuat dan mendukung program pengembangan masyarakat.
- 3) Menumbuhkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah.
- 4) Mampu merumuskan dan menyeleksi alternatif tindakan dan mengimplementasikan program.
- 5) Mampu melakukan monitoring dan evaluasi program secara partisipatif

c. Penyusunan dan pengembangan perencanaan partisipatif

d. Pelaksanaan perencanaan

e. Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus atau berkala selama proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan apakah sebuah kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana atau ketentuan yang telah disusun sebelumnya. Untuk langkah-langkah melakukan monitoring dan evaluasi adalah:

- 1) Pahami dengan jelas objek yang akan dimonev.
- 2) Susun parameter dan indikator penilaian yang diperlukan.
- 3) Kumpulkan data dan informasi yang akurat berkaitan dengan objek yang dimonev.
- 4) Crosscheck dan klarifikasi data dan informasi yang telah dikumpulkan.
- 5) Analisis perkembangan pelaksanaan kegiatan dan bandingkan dengan rencana atau ketentuan yang ada.
- 6) Rumuskan rekomendasi tindakan penanggulangan apabila ditemukan penyimpangan atau kesalahan.
- 7) Sampaikan hasil monev kepada para pihak yang berkaitan

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan pembangunan partisipatif ?
2. Jelaskan dua perspektif pembangunan partisipatoris !
3. Jelaskan factor-faktor perencanaan pembangunan !
4. Coba Anda jelaskan proses perencanaan pembangunan !
5. Jelaskanlah bagaimana langkah untuk melakukan proses monitoring terhadap kegiatan pembangunan !

BAB VIII

KEBUTUHAN, JANJI DAN AKSI KOMUNITAS

A. Kebutuhan Terhadap Komunitas

Komunitas berasal dari bahasa Latin *communitas* yang berarti "kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak". Menurut Crow dan Allan, komunitas dapat terbagi menjadi 3 komponen:

1. Berdasarkan Lokasi atau Tempat
2. Berdasarkan Minat
3. Berdasarkan Komuni

Komunitas merupakan istilah yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari pada berbagai kalangan. Seperti halnya kebanyakan istilah yang populer, maka maknanya pun bisa beragam tergantung pada konteks kalimatnya. Dalam ungkapan *komunitas muslim* lebih menunjukkan pada satu kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik dan kesamaan keyakinan yang tinggal ditengah penduduk dengan karakteristik dan keyakinan yang berbeda. Komunitas disebut juga paguyuban, adalah masyarakat dalam skala kecil sehingga antar individu memiliki hubungan keakraban satu dengan yang lainnya.

Komunitas dimengerti sebagai suatu bentuk organisasi sosial dengan lima ciri terkait berikut ini:³⁸

1. Skala manusia

Komunitas melibatkan interaksi-interaksi pada suatu skala yang mudah dikendalikan dan digunakan oleh individu-individu. Jadi, kalanya terbatas pada orang-orang yang akan saling mengenal atau dapat dengan mudah untuk saling berkenalan apabila diperlukan, dan dimana interaksi-interaksi sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh semua.

2. Identitas dan kepemilikan

Bagi kebanyakan orang, kata komunitas akan memasukkan sebarang perasaan 'memiliki', atau perasaan diterima dan dihargai dalam lingkup kelompok tersebut.

3. Kewajiban-kewajiban

Keanggotaan dari sebuah organisasi membawa baik hak maupun tanggung jawab, dan sebuah komunitas juga menuntut kewajiban tertentu dari para anggotanya.

³⁸ Jim Iffe dan Frank Tesoriero, *Community Development...*, hlm. 191-194

4. Gemeinschaft

Struktur-struktur dan hubungan Gemeinschaft yang terkandung dalam konsep komunitas berlawanan dengan struktur dan hubungan Gesellschaft dari masyarakat massa. Struktur dan hubungan tersebut memungkinkan individu-individu untuk menyumbangkan berbagai bakat dan kemampuan untuk keuntungan yang lain dan komunitas tersebut sebagai suatu keseluruhan.

5. Kebudayaan

Suatu komunitas menyediakan sebuah kesempatan bagi suatu penangkalan terhadap fenomena ‘kultur masal’. Suatu komunitas memungkinkan pemberian nilai, produksi dan ekspresi dari suatu kebudayaan lokal atau berbasis masyarakat.

Dalam Islam, kebutuhan akan komunitas ini sangat tinggi. Hal ini dapat digambarkan dari kekerabatan yang terbina di tengah-tengah masyarakat Arab, yang dikenal dengan fanatik kesukuan (*ashabiyah*).

Dalam al-Quran disebutkan juga bahwa, manusia itu adalah umat yang satu, yang diciptakan bersuku-suku dan berkelompok-kelompok, untuk saling kenal. Ayat ini, Allah ingin menegaskan bahwa meski manusia berbeda kulit, berbeda ras, berbeda tempat tinggal, namun mereka adalah umat yang satu, sama-sama makhluk Allah yang dinamakan sebagai manusia. Adapun perbedaan itu, bukan untuk saling mencaci, bukan untuk saling hina, melainkan untuk saling kenal mengenal satu kelompok dengan kelompok lainnya.

B. Janji Integritas Komunitas

Walaupun terdapat banyak persoalan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat dan banyak faktor dalam masyarakat industri modern yang menentangnya, gagasan komunitas tetap memiliki kekuatan. Pada tahun 1990, pemerintah negara bagian Australia Barat, menunjuk sebuah komisi keluarga dan komunitas yang independen untuk melaksanakan penyelidikan yang luas mengenai bagaimana warga Australia Barat memandang masyarakat mereka lihat pada masa depan. Salah satu temuan terkuat yang muncul dari penyelidikan itu, yang mencakup suatu strategi konsultasi publik yang luas bahwa mereka sangat merasakan kehilangan komunitas atau hilangnya identitas dalam masyarakat modern dan bahwa membangun kembali struktur komunitas adalah salah satu prioritas tertinggi untuk masa depan. Hal ini dilihat sebagai sebuah solusi jangka panjang yang penting terhadap sejumlah masalah sosial yang sudah di depan mata. Kekuatan komunitas sudah lama diketahui dan selama bertahun-tahun tampaknya cenderung

digunakan oleh banyak pemerintah secara bebas dalam judul-judul dan pidato seringkali dengan sedikit makna substantif.

Perasaan kehilangan komunitas sering ditafsirkan sebagai nonstalgia bagi sebuah ideal yang tidak pernah ada. Para pembela pengembangan masyarakat telah dituduh mengidealkan masyarakat desa yang kenyataannya dalam banyak kejadian bersifat menindas. Ini adalah kritik yang penting bahwa gagasan komunitas diletakan di atas landasan yang lebih substantial daripada sekedar ideal. Walaupun kekuatan dari ideal tersebut dan pentingnya visi tidak boleh dinilai rendah.

C. Aksi Komunitas

Isbandi Rukminto Adi menyebutkan bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada kelompok dalam masyarakat yang merasa tidak puas dengan apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh pelaku perubahan sehingga semua kejadian di dunia ini banyak dilihat dari sudut pandang konflik dan ketidakpuasan.

Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah Saw bersabda: “diperlihatkan (Allah) kepadaku neraka. Ketika itu kulihat kebanyakan isinya terdiri dari perempuan-perempuan kafir”. Ditanyakan orang kepada beliau: “Apakah mereka kafir kepada Allah?” Jawab Rasulullah: “mereka kafir kepada suami dan tidak tahu berterima kasih atas kebaikan yang diterimanya. Walaupun engkau telah berbuat baik kepadanya sepanjang masa, kemudian dilihatnya padamu sedikit kesalahan saja. Lantas ia berkata, “saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit juapun “. ³⁹

Ketidakpuasan terhadap hasil yang telah dicapai pada satu sisi tentunya merupakan suatu hal yang diperlukan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, ada pula pelaku perubahan yang justru memilih pendekatan yang bersifat konflik ini agar dapat merealisasikan jati dirinya dan bukan menitikberatkan tindakannya untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dia terjebak dalam pendekatan yang bersifat konflik sehingga kadangkala melupakan kepentingan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Aksi komunitas tidak lepas dari sejarah *community work* di Inggris, yang dapat dibagi pada empat fase.

1. Fase Pertama Muncul *Social Worker* (Perkiraan sejak tahun 1880-1920).
2. Fase munculnya Aksi Komunitas/ *Community action movement* (Perkiraan sejak tahun 1920-1950).
3. Fase *Consensus Approach* (Pekerja Sosial Profesional)
4. Fase *Conflic Approach*.

³⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 149

Aksi komunitas melibatkan masyarakat untuk menyampaikan tuntutan mereka pada para pembuat kebijakan dan menunjukkan apa yang menjadi minat dan kepentingan mereka serta mereka mengharapkan agar para pembuat kebijakan mau menanggapi tuntutan mereka. Menurut Glen dalam Isbandi Rukminto Adi, ada beberapa ciri khas aksi komunitas, yaitu:

1. Tujuan aksi komunitas terkait penggalangan kekuatan pada isu-isu yang konkret.
2. Melakukan pendekatan yang menggunakan strategi dan teknik yang bersifat konflik.
3. Pekerja sosial atau organizer dari gerakan ini biasanya aktivis yang profesional.⁴⁰

Zander dalam Isbandi Rukminto Adi, menyebutkan ada tiga bentuk aksi kursif (*coercive*), yaitu:

1. Para aktivis mencampuri atau mengintervensi dengan paksa usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok sasaran sehingga mereka kelompok sasaran tidak dapat melaksanakan tugas reguler mereka.
2. Pelaku perubahan dan kelompoknya secara fisik membatasi kebebasan kelompok sasaran atau menyandera mereka.
3. Dalam situasi yang sangat menekan, para aktivis tidak jarang mengancam akan menyakiti kelompok sasaran. Dua tipe terakhir dari aksi kursif kadangkala dilakukan oleh aktivis Indonesia.

D. Bentuk-bentuk aksi komunitas

1. Pemboikotan

Dalam kegiatan pemboikotan, para partisipan perubahan didorong untuk tidak menggunakan produk ataupun jasa yang dikeluarkan oleh kelompok sasaran.

2. Grafiti/ Aksi Coret

Grafiti merupakan aksi coret-coret pada tempat tertentu guna untuk menarik perhatian masa. Grafiti yang baik dan dapat menarik minat masyarakat adalah grafiti yang bersifat sederhana dan kocak dalam menyerang hal yang mereka protes serta ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

3. Taktik pengalihan (Disruptive Tactic)

Taktik pengalihan maksudnya melakukan protes dengan menghindari tindakan kekerasan. Yang dilakukan oleh kelompok yang tidak senang dengan kebijakan penguasa, maka akan melakukan aksi simpatik yang pada akhirnya mendorong orang untuk ikut aktif mendukung gerakannya.

⁴⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas...*, hlm. 153-155

4. Teater Jalanan (street theatre)

Teater jalanan yang menarik dan simpatik biasanya lebih dapat menarik emosi masyarakat dibandingkan dengan teater jalanan yang menonjolkan pada aspek kekerasan dan ketidakpuasan terhadap suatu struktur tertentu.

5. Blokade dan memacetkan jalan

Blokade dan memacetkan jalan memperlambat bahkan menghentikan arus lalu lintas untuk sementara waktu dapat pula dimanfaatkan untuk menyampaikan suatu isu tertentu yang mereka anggap penting.

6. Pengambilalihan dan pendudukan

Pengambilalihan dan pendudukan dilakukan melalui proses meyakinkan pihak yang berkompeten dapat menjadi tindakan yang bermakna kalau pelaku perubahan dapat mengambil alih fasilitas tanah dan bangunan yang tidak digunakan dan dimanfaatkan untuk hal yang produktif.

7. Pemanfaatan bangunan kosong

Pemanfaatan bangunan yang sudah tidak digunakan lagi merupakan hal yang berbeda dengan pencamplokan karena pemanfaatan bangunan kosong adalah pengambilalihan fungsi bangunan yang diterlantarkan menjadi bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

8. Prosesi dan protes keliling

Prosesi dan protes keliling merupakan upaya warga masyarakat untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap suatu isu tertentu. Pelaksanaan arak-arakan ini, haruslah mendapatkan izin dan adanya pemberitahuan tertulis pada pihak pemerintah dan polisi mengenai rute, waktu, dan tanggal arak-arakan.

9. Barisan penghalang

Barisan penghalang (picketing) merupakan bagian dari proses boikot dengan cara membentuk barisan yang menghalangi orang-orang untuk mengakses produk atau layanan dari kelompok sasaran.

10. Pertemuan terbuka

Pertemuan umum di tempat terbuka merupakan salah satu taktik yang biasa digunakan oleh aktivis untuk menyebarkan simpatik masyarakat dan memantapkan identitas mereka sebagai suatu kelompok.

11. Aksi mogok duduk

Aksi mogok duduk seringkali dilaksanakan di kantor-kantor departemen pemerintah daerah, perusahaan, agen perumahan, ataupun kantor administrasi universitas guna memprotes kebijakan yang mereka terapkan.

12. Aksi simbolis

Aksi simbolis ini dapat berbentuk pengembalian atau penolakan suatu penghargaan sebagai pernyataan protes terhadap tindakan dari organisasi penyanggah dana pemberi reward tersebut.

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komunitas dan tiga komponen pembentuk komunitas !
2. Uraikanlah ciri-ciri komunitas !
3. Apa yang dimaksud dengan janji integritas komunitas dan apa pentingnya janji integritas itu ?
4. Janji komunitas dapat berdampak positif terhadap pengembangan komunitas dan lingkungannya. Janji integritas itu mengharuskan adanya aksi komunitas, coba jelaskan aksi komunitas yang dimaksud !
5. Uraikanlah bentuk-bentuk aksi komunitas !

BAB IX

DIMENSI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

Tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, memenuhi kebutuhan manusia dan membangun kembali struktur-struktur negara kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elite profesional dan sebagainya yang kurang berperikemanusiaan dan sulit diakses. Banyak program pengembangan masyarakat yang berupaya membangun basis masyarakat yang lebih kuat untuk aspek tunggal eksistensi manusia namun mengabaikan aspek lainnya. Banyak pengembang masyarakat yang bekerja memusatkan perhatiannya pada pelayanan kemanusiaan berbasis masyarakat seperti ketersediaan layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan perempuan dan rekreasi, namun mengabaikan aspek ekonomi. Pada sisi lain, banyak proyek pengembangan masyarakat yang berbasiskan pengembangan ekonomi dengan asumsi bahwa dari pengembangan ekonomi semua aspek lainnya akan mengikuti. Sebab itu, para pengembang masyarakat mengabaikan kebutuhan-kebutuhan sosial. Padahal, mestinya para pengembang tidak mengabaikan dimensi-dimensi dari pengembangan masyarakat tersebut.

Menurut Jim Ife, ada enam dimensi pengembangan masyarakat, namun yang paling penting ada enam dimensi, yaitu:

1. Pengembangan sosial
2. Pengembangan ekonomi
3. Pengembangan politik
4. Pengembangan budaya
5. Pengembangan lingkungan
6. Pengembangan spiritual⁴¹

Dalam situasi tertentu, masyarakat akan mengembangkan dimensi-dimensi tersebut pada level yang berbeda-beda. Suatu masyarakat mungkin saja memiliki basis ekonomi yang kuat, partisipasi politik yang sehat, dan identitas budaya yang kuat, namun memiliki pelayanan kemanusiaan yang kurang baik, lingkungan fisik yang buruk, harga diri yang rendah dan tingkat individualis yang tinggi. Pada kondisi masyarakat seperti gambaran tersebut, maka perlu pengembangan lingkungan dan personal spiritualitas bagi masyarakatnya.

⁴¹ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Communiy Development...*, hlm. 410-411

A. Pengembangan Sosial

Tidak sedikit dari kegiatan yang secara tradisional dipandang sebagai pengembangan masyarakat seperti pekerjaan sosial, pekerjaan kepemudaan, pendidikan dan profesi kesehatan dapat dipahami sebagai pengembangan sosial. Meskipun terdapat banyak variasi dalam aktivitas yang merupakan pengembangan sosial. Aktivitas tersebut dapat dibagi menjadi empat bagian:

1. Pengembangan pelayanan

Pengembangan pelayanan ini ada dua poin penting yang menjadi perhatian, yaitu mengenai proses dan persoalan struktural. Persoalan proses, yang mana banyak kegiatan pengembangan komunitas tradisional pada dasarnya merupakan pengembangan pelayanan sosial yang mencakup identifikasi kebutuhan-kebutuhan sosial serta tersedianya struktur dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengembangan pelayanan merupakan persoalan proses, meliputi identifikasi kebutuhan, studi yang sistematis tentang kebutuhan dan persoalan, pertemuan publik, membentuk organisasi/badan baru, pelaksanaan organisasi baru, memantau dan mengevaluasi organisasi baru tersebut. Berbeda dengan persoalan-persoalan struktural, yang mana para pengembang masyarakat memfokuskan perhatiannya pada struktur-struktur baru yang akan melaksanakan program pelayanan sosial/masyarakat. Apakah dengan mendirikan organisasi baru itu, persoalan masyarakat dapat teratasi.

2. Balai masyarakat

Pada bagian ini, dalam masyarakat Islam dikenal adanya masjid untuk menjadi pusat kegiatan umat. Pada masa Rasulullah, di masjid tidak hanya tempat untuk menjalankan ibadah (ritual) saja melainkan dimanfaatkan untuk membicarakan persoalan agama dan umat. Kalau kita lihat konteks kekinian, masjid sudah memiliki fasilitas yang lengkap. Selain bagian dalam masjid digunakan untuk tempat ibadah, kegiatan memperingati hari besar agama, dan kegiatan agama yang sifatnya ritual. Ada juga dibangun di bagian ruangan lain untuk tempat belajar tulis baca al-Quran dan untuk pertemuan-pertemuan umat. Akan tetapi, persoalan umat yang prioritas dan menentukan masa depan umat jarang sekali dibicarakan oleh kalangan elit masjid saat ini. Akibatnya potensi-potensi umat tidak terhimpun dengan baik. Balai masyarakat ini maksudnya ada suatu tempat yang dijadikan pusat pertemuan umat, untuk mendiskusikan kebutuhan dan persoalan-persoalan umat. Balai masyarakat (*neighbourhood house*) merupakan setingan informal yang tidak kaku yang berfungsi sebagai wadah sentral dari aktivitas lingkungan

umat. Di tempat ini dapat dilaksanakan pertemuan-pertemuan, diskusi, pusat penyebaran informasi dan pusat pelatihan serta keterampilan umat. Agar wadah ini berfungsi efektif maka jalannya kegiatan tersebut harus atas partisipasi aktif dari masyarakat lokal/ sekitar.

3. Perencanaan sosial

Dalam konteks pengembangan masyarakat, istilah perencanaan sosial bukan hanya merujuk pada perencanaan besar yang berisi aktivitas teknis. Melebihi dari itu, perencanaan sosial merupakan proses orang-orang di sebuah masyarakat yang membatasi kebutuhan mereka dan merencanakan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan mereka maupun mengkoordinasikan pelayanan dan sumber daya yang ada dan menggunakannya secara maksimal.

4. Semangat sosial

Pengembangan sosial dapat juga berfokus pada kualitas interaksi sosial yang sesungguhnya dalam suatu masyarakat, bukan secara langsung berfokus pada tersedianya pelayanan kemanusiaan. Peningkatan kesadaran, hubungan dialogis dan praktik yang sangat reflektif sangat penting dalam pendekatan ini. Semangat sosial ini muncul ketika orang-orang didorong untuk menjalin interaksi sosial yang lebih dekat dan kuat. Apa yang menjadi pengalaman hidup masyarakat dapat memberikan penekanan penting untuk keragaman interaksi manusia dengan konsekuensi-konsekuensi sosial ekonomi dan politik yang signifikan untuk kualitas kehidupan masyarakat.

B. Pengembangan Ekonomi

Globalisasi ekonomi yang dipengaruhi oleh ekonomi neoklasik dan kekuatan kapitalis transnasional telah membawa dampak kepada banyak orang. Mereka merasakan bahwa ekonomi mainstream tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini terlihat pada angka pengangguran yang tinggi dalam banyak masyarakat. Manusia pada kondisi ekonomi seperti ini, menginginkan pekerjaan tetap atau tidak tetap (*part time*) dengan penghasilan yang bagus. Angka kemiskinan juga meningkat tajam bahkan ketergantungan masyarakat akan bantuan makanan, uang tunai dan lumbung pangan juga mengental dalam sikap budaya manusia. Pihak industri biasanya memperkerjakan manusia dengan kecenderungan menyamakan seperti mesin, namun apa yang bisa diberikan pihak manajemen tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan para buruh. Akhirnya terjadi mogok kerja, pabrik-pabrik harus tutup, jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Dalam perspektif pengembangan masyarakat, respon terhadap krisis ekonomi ini ditujukan pada pengembangan pendekatan alternatif yang berupaya merelokasikan

aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat lokal serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan.

1. Pengembangan ekonomi masyarakat yang konservatif

- a. Menarik industri

Pendekatan yang lebih konservatif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat berupaya menemukan cara-cara baru yang membuat masyarakat tersebut dapat lebih berpartisipasi dalam ekonomi mainstream dengan cara menghimpun inisiatif. Pendekatan ini mencoba menarik industri baru ke wilayah lokal dengan memberikan lingkungan yang bagus untuk berinvestasi. Masyarakat lokal dapat mengisi kesempatan kerja pada industri baru itu. Para pemangku jabatan pada masyarakat lokal itu berbondong-bondong menawarkan berbagai kemudahan untuk investasi, tidak mengherankan terjadinya persaingan antar masyarakat untuk mendapatkan perhatian dari investor. Mungkin yang diberikan kepada investor, mulai dari tarif sewa lahan, infrastruktur dan kemudahan-kemudahan lainnya. Akan tetapi, kelemahan pendekatan ini adalah industri baru tidak ada jaminan akan terus menginvestasikan laba perusahaan di wilayah lokal itu, industri biasa berkembang sesuai tuntutan pasar, jadi bisa saja dalam jangka waktu tertentu industri itu berpindah ke daerah lain.

- b. Memulai industri lokal

Terdapat potensi yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya, inisiatif dan tenaga ahli lokal untuk membangun industri lokal baru yang akan dimiliki dan dijalankan oleh orang-orang yang ada di masyarakat lokal. Banyak program pengembangan masyarakat lokal menggunakan bentuk ini dan model-model ini dapat berhasil mengembangkan aktivitas ekonomi serta menjadi kebanggaan dalam prestasi lokal. Hal ini dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya lokal, bakat, minat dan keahlian beserta penaksiran keuntungan-keuntungan alam dari lokalitas tertentu kemudian memutuskan industri apa yang sesuai.

Pendekatan inipun memiliki kelemahan-kelemahan. Pendekatan ini masih dalam ekonomi mainstream. Yang namanya industri, jika ia tumbuh menjadi besar maka banyak pemain-pemain ekonomi kapitalis yang hendak menguasai industri tersebut. Dengan berbagai cara dan tawaran yang menggiurkan sampai industri itu takhluk kepada kepentingan pemodal. Jika industri lokal telah dikuasai pemodal yang sudah tentu mengejar keuntungan besar. Tidak selalu perusahaan besar itu memihak kepada

masyarakat lokal. Akan tetapi, industri lokal yang tidak tergiur oleh tawaran pemodal, dan tetap berorientasi kepada akomodir kebutuhan dan persoalan masyarakat lokal maka kekhawatiran ini tidak perlu terlalu dicemaskan.

c. Pariwisata

Tempat wisata dalam pengembangan masyarakat lokal sangat penting diperhatikan. Masyarakat yang dihantam oleh krisis ekonomi, penutupan industri lokal dan pengangguran yang tinggi akan sering mencari potensi wisata, khususnya jika tempat pariwisata itu menarik wisatawan karena alasan pemandangan yang ada, sejarah atau hal lainnya yang menjadi daya tarik yang potensial. Pengembangan ekonomi masyarakat lokal melalui pengembangan wisata ini, sangat besar manfaatnya. Pariwisata sebagai tempat bersantai, tentu saja tidak akan merusak alam karena nuansa alam itu nantinya yang memancing kedamaian dan ketenangan untuk bersantai. Dengan demikian, mengembangkan wisata lokal malah mendorong kesadaran warga lokal untuk menjaga kelestarian alam. Lagi pula pembukaan lokasi wisata tidak menimbulkan polusi, menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal dan dapat menyerap tenaga kerja lokal. Tujuan dari pengembangan wisata ini, bertujuan untuk menarik wisatawan yang lebih banyak untuk datang ke masyarakat, untuk mendorong wisatawan tinggal selama mungkin di wilayah wisata, dan untuk membuat mereka (wisatawan) membelanjakan uang sebanyak mungkin ketika mereka berada di sana.

2. Pengembangan ekonomi masyarakat yang radikal

Pendekatan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pendekatan konservatif berupaya memperbaiki ekonomi masyarakat dengan membantunya untuk berfungsi lebih efektif dalam tatanan ekonomi yang ada. Pendekatan yang lebih radikal terhadap pengembangan ekonomi masyarakat melibatkan upaya menemukan alternatif yakni ekonomi berbasis lokal. Ini sejalan dengan perspektif yang mewujudkan prinsip otonomi. Perspektif ini menghendaki masyarakat menjadi lebih bergantung pada sumber dayanya sendiri dan menyatakan kebijaksanaan ekonomi konvensional sering mengakibatkan sumber daya yang kurang dihargai dan kurang dimanfaatkan. Perspektif ini juga menjamin bahwa nilai surplus dari produktivitas lokal masih berada dalam masyarakat yang menciptakannya bukan dipindahkan ke masyarakat lain. Pengembangan ekonomi masyarakat secara radikal ini meliputi:

a. Koperasi

Pendirian koperasi merupakan satu cara yang dapat dicapai dan terbukti efektif di berbagai lokasi. Koperasi juga memiliki potensi untuk memperkuat bukan memperlemah solidaritas masyarakat dan pengalaman dari banyak koperasi sangat mendukung. Akan tetapi, meski koperasi dibentuk dan dijalankan oleh masyarakat lokal untuk perekonomian lokal bukan berarti koperasi tidak mendapatkan tantangan dari pihak-pihak luar. Seperti para agen/touke, ijon dan tengkulak yang menguasai pusat ekonomi lokal biasanya memberikan reaksi yang keras terhadap pendirian koperasi yang dianggap akan menyaingi sumber-sumber pendapatan mereka. Parah lagi, banyak masyarakat lemah yang telah terjerat utang kepada penguasa ekonomi lokal tersebut, harga jual tani ditekan serendah-rendahnya, sementara masyarakat tidak berdaya karena utang. Akan tetapi, kondisi ini bisa diatasi dengan adanya kemauan yang keras dari masyarakat itu sendiri untuk merubah sistem yang tidak menguntungkan mereka dan komitmen dari penggerak perubahan.

b. Bank masyarakat (*credit union*)

Bank nasional atau transnasional yang besar merupakan bagian penting dari sistem ekonomi global dan sudah beroperasi khususnya untuk kepentingan kapitalis transnasional. Oleh karena itu, bank-bank tersebut tidak selalu ditempatkan secara strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan warganya. Kenyataannya, bank-bank tersebut memberikan mekanisme penting untuk memindahkan laba dari masyarakat lokal dan penguasaan ekonomi lokal oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Untuk mendukung tujuan ini, beberapa masyarakat lokal telah membentuk struktur perbankan lokal sehingga masyarakat tersebut dapat memiliki penguasaan yang lebih besar atas ekonominya. Cara ini memberikan kontrol masyarakat lokal misalnya jenis usaha yang seharusnya mendapatkan pinjaman dan suku bunga atas investasi.

Bank masyarakat boleh jadi merupakan bentuk perbankan masyarakat yang paling lazim. Bank masyarakat adalah sekelompok orang yang sepakat untuk menanamkan uang mereka secara bersama-sama dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. Kredit union beroperasi seperti bank lokal skala kecil. Akan tetapi, ada juga bank union ini tumbuh besar sehingga mereka kehilangan kontrol keanggotaan yang efektif dan persoalan memperjuangkan kebutuhan anggota.

c. *Local energy transfer scheme* (LETS)

Local energy transfer scheme digunakan untuk skema berbasis masyarakat yang menciptakan mata uang alternatif berbasis masyarakat. Maksudnya, di masa-masa krisis

ekonomi maka sistem barterpun terjadi. Ini dikenal dengan ekonomi informal karena tidak ada legalisasi dari negara. Ekonomi informal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memperoleh kembali kontrol terhadap aktivitas ekonomi dan untuk merancang sistem ekonomi yang memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. *Local energy transfer scheme* ini berupaya memformalkan ekonomi transaksi lokal dengan menciptakan mata uang masyarakat lokal.

C. Pengembangan Politik

Pengembangan politik berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam arena politik dan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan baik dalam masyarakat secara menyeluruh maupun perorangan dan kelompok. Pengembangan politik ini berupaya memberikan kontribusi dalam proses masyarakat, aktivitas dan pengambilan keputusan. Pengembangan politik ini dapat dibedakan atas pengembangan politik internal dan politik eksternal. Untuk pengembangan politik yang dimaksud dapat dilihat pada tiga proses penting, yaitu peningkatan kesadaran, pengorganisasian dan aksi sosial.

Peningkatan kesadaran berlaku untuk semua aspek pengembangan masyarakat tetapi mungkin lebih signifikan dalam penumbuhan kesadaran pada pengembangan politik di lingkungan internal. Kemampuan untuk menghubungkan pengembangan personal dan politik dan membantu orang-orang untuk berbagi pengalaman dan memikirkan situasi mereka dengan cara yang dapat membuka peluang untuk bertindak merupakan kemampuan yang paling penting dalam pengembangan politik.

Aspek lain dari pengembangan politik internal yaitu cara yang digunakan masyarakat dalam mengatur dirinya untuk mengatasi problem yang dihadapi dan untuk membangun alternatif dan struktur yang otonom dalam jangka panjang. Tidak ada yang lebih penting tentang lokalisasi dan kontrol masyarakat melainkan mewujudkan partisipasi secara adil dalam membuat keputusan masyarakat. Sementara itu, pada pengembangan politik di lingkungan eksternal perlu adanya pengorganisasian dalam rangka penggerak aksi sosial yang akan menggerakkan perubahan di lingkungan eksternal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kampanye aksi sosial yang masih efektif sampai saat ini untuk dilakukan. Kampanye sosial ini diupayakan untuk memobilisasi masyarakat untuk bertindak. Oleh karena itu, pada tingkat penyadaran untuk lingkungan eksternal harus mengusung prinsip-prinsip umum yang menyentuh kepentingan dasar masyarakat dengan mengabaikan kepentingan internal.

D. Pengembangan budaya

Globalisasi budaya telah mengikuti pola yang sama seperti globalisasi ekonomi. Budaya universal berkembang karena disebarluaskan melalui media global yang dikendalikan secara luas dan dijalankan sesuai kepentingan kapitalis. Televisi, musik, arsitektur, gaya hidup menjadi semakin sama di berbagai belahan dunia. Fenomena ini masih utuh dalam kehidupan masyarakat saat ini, dari kehidupan masyarakat di perkotaan sampai masyarakat pedesaan, bahkan masyarakat kelas bawah dengan cara mereka pula mengekspresikan budaya global itu. Pengembangan budaya berupaya membendung masyarakat menjadi boneka budaya materialisme dan hedonisme. Oleh karena itu, pengembangan budaya yang dimaksud adalah penguatan budaya lokal sebagai jati diri masyarakat lokal. Nilai-nilai kearifan lokal harus dipertahankan dengan membentuk gerakan kelompok tertentu yang dengan *concern* mempelajari dan mengaktualisasikan budaya-budaya lokal. Dalam konteks pengembangan masyarakat, ada empat komponen yang harus diperhatikan, yakni melestarikan dan menghargai budaya lokal, melestarikan dan menghargai budaya asli/pribumi, multikulturalisme dan budaya partisipatori.

a. Melestarikan dan menghargai budaya lokal

Tradisi budaya lokal merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat dan membantu memberikan rasa identitas kepada mereka. Oleh karenanya pengembangan masyarakat akan berupaya mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya lokal dan melestarikannya. Tradisi ini meliputi sejarah lokal, dan peninggalan berharga, kerajinan berbasis lokal, makanan lokal, atau produk-produk lainnya seperti festival atau pekan raya lokal, band lokal atau terkait dengan komunitas etnik tertentu. Tidak semua budaya lokal yang dilestarikan, misalkan rasisme dan sikap tertutup terhadap orang asing. Kekhawatiran hilangnya budaya lokal sebagian kalangan menganggap bahwa anti orang asing adalah jalan untuk menjaga budaya lokal yang ada. Ini bukan tindakan yang tepat. Budaya lokal yang dilestarikan justru menjadi daya tarik bagi orang asing, terutama wisatawan asing. Bayangkan apa yang terjadi jika masyarakat lokal yang kaya nilai-nilai budaya, tetapi anti orang asing atau rasisme maka wisatawan itu dianggap musuh yang harus di jauhi padahal ia adalah potensi untuk mengembangkan kreativitas budaya lokal. Kedatangan mereka akan membawa keuntungan tersendiri bagi masyarakat lokal. Jelasnya kedatangan mereka adalah sumber ekonomi bagi masyarakat setempat.

b. Melestarikan dan menghargai budaya asli

Melestarikan dan menghargai budaya asli dari orang-orang pribumi merupakan isu sentral untuk pengembangan masyarakat. Ketika dikemukakan bahwa budaya asli hanyalah kasus tertentu dalam budaya lokal seperti dibahas sebelumnya, dinamika yang berbeda mengelilingi budaya asli berarti budaya asli ini diperlakukan sebagai hal yang terpisah. Ada dua alasan utama yang mendasarinya, *pertama*, klaim istimewa yang dimiliki orang-orang pribumi terhadap daerah dan terhadap struktur komunitas tradisional yang berkembang selaras dengan daerah selama periode waktu yang jauh lebih lama daripada kolonialisasi. Komunitas merupakan hal penting bagi keberlangsungan budaya dan spiritual. Dalam arti penting ini, kelestarian budaya tradisional merupakan kebutuhan yang lebih penting bagi orang-orang pribumi dari orang lain. *Kedua*, banyak kerugian yang telah dilakukan dan dalam banyak kasus masih dilakukan yang mengorbankan orang-orang pribumi atas nama pengembangan masyarakat. Tidak jarang kegiatan pengembangan masyarakat berdampak buruk, pengembangan masyarakat merupakan eufimisme untuk penindasan, dominasi, pemaksaan nilai-nilai budaya luar kepada masyarakat lokal dengan mengorbankan nilai-nilai dan tradisi orang pribumi.

c. Multikulturalisme

Penggunaan istilah yang lazim dari multikulturalisme adalah menunjuk pada kelompok etnis yang berbeda yang tinggal di satu masyarakat tetapi mempertahankan identitas budaya yang berbeda. Oleh karena itu, fokus ini yaitu pada etnisitas dan fitur budaya dari kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Seperti halnya untuk pengembangan masyarakat pribumi, tantangan bagi masyarakat multikulturalisme diharapkan dapat membantu mempertahankan integritas keberagaman budaya sambil mengupayakan cara-cara mengintegrasikan tradisi-tradisi budaya yang berbeda dalam masyarakat lokal dan memperkaya pengalaman budaya yang ada.

Isu penting bagi pekerja masyarakat dalam setting masyarakat multikultural terkait dengan prinsip-prinsip universal dari keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam wilayah ini siapapun dapat terlibat melawan praktik-praktik komunitas tradisional yang menghambat prinsip-prinsip keberagaman ini. Prinsip multikulturalisme kecuali budaya agama, atau ibadah-ibadah agama yang melahirkan kebudayaan, maka selain dari itu, perlu untuk dipertahankan. Apapun budaya yang bertentangan dengan keadilan sosial dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia maka perlu dilawan dan diubah.

d. Budaya partisipatori

Satu cara mendorong masyarakat yang sehat yaitu dapat mendorong partisipasi yang luas dalam aktivitas budaya sehingga seni, musik, teater, tarian dan olahraga menjadi sesuatu yang mereka lakukan bukan yang mereka tonton. Hal ini telah menjadi fokus dari banyak program pengembangan budaya masyarakat. Partisipasi budaya dilihat sebagai cara penting untuk membangun modal sosial, memperkuat masyarakat dan menegaskan identitas.

E. Pengembangan lingkungan

Pengembangan lingkungan merupakan konsensus dari posisi Green dan kesadaran yang meningkat mengenai pentingnya lingkungan yaitu bahwa masyarakat perlu bertanggung jawab atas perlindungan dan rehabilitasi lingkungan fisik. Lingkungan merupakan komponen penting dari masyarakat dan perlu dicakup dalam pendekatan terpadu terhadap pengembangan masyarakat. Isu-isu lingkungan sangat penting dalam menyadarkan masyarakat secara keseluruhan dan menjadi katalisator untuk aksi masyarakat. Bioregionalisme adalah suatu gerakan yang melihat lingkungan lokal sebagai basis primer untuk pengembangan masyarakat. Gerakan ini menekankan kemandirian dan prinsip-prinsip otonomi dan lokalitas.

F. Pengembangan personal dan spiritual

Pengembangan personal (*personal development*) merupakan bagian dari pengembangan masyarakat. Salah satu justifikasi untuk pengembangan masyarakat bahwa masyarakat merupakan konteks yang lebih baik untuk pengembangan personal daripada struktur birokrasi yang impersonal dari pemerintahan yang besar dan bisnis yang besar. Kerugian masyarakat erat kaitannya dengan kerugian identitas personal karena melalui rasa memiliki, seseorang dalam sebuah masyarakat akan menumbuhkan rasa nilai personal dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Pengembangan dan pemberian layanan kemanusiaan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan perawatan orang-orang yang memerlukan asuhan, merupakan agenda penting dalam pengembangan personal, sama pentingnya dengan pengembangan masyarakat dan sosial.

Pengembangan personal sangat penting untuk memberikan rasa lebih bermakna bagi masyarakat dalam kehidupan mereka, rasa memiliki tujuan dan berharga. Bagaimanapun, bagi sebagian besar masyarakat, kebutuhan ini lebih baik dipahami sebagai kebutuhan untuk pengembangan spiritual. Masyarakat modern memiliki sifat yang sangat sekuler dan memberikan sedikit ruang untuk gagasan-gagasan tentang kesakralan atau nilai-nilai spiritual. Oleh sebab itu, terdapat kebutuhan yang mendasar bagi

pengembangan masyarakat untuk memasukan gagasan-gagasan pengembangan spiritual. Dalam konteks ini, kata-kata *sacred* dan spiritual digunakan dalam arti yang paling luas dan tidak menyamakan semata-mata dengan pemahaman agama-agama *mainstream* meskipun perspektif tersebut harus dicakup. Siapapun dapat memiliki pengalaman spiritual di luar batas-batas agama yang terorganisir, pengalaman terhadap keagungan yang tak terbatas, kontemplasi yang mendalam, pembacaan puisi, terharu oleh music atau lukisan yang penuh ekspresi, merenungkan misteri alam semesta, menemukan kepuasan dalam hubungan seksual, partisipasi dalam membuat music, tarian atau nyanyian dan dalam pengalaman komunitas manusia yang sejati. Dimensi spiritual sangat penting untuk pengembangan masyarakat yang akan memberikan makna dan tujuan kehidupan personal/manusia tersebut. Bentuk pengembangan spiritual yang lebih tepat diharapkan bermula dengan menghormati dan memperkuat tradisi agama dan spiritual masyarakat. Atas dasar ini, siapapun berupaya menciptakan lingkungan yang dapat membangun kesakralan dan spiritualitas yang secara terbuka mengakui pentingnya nilai-nilai spiritual.

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Jelaskanlah dimensi pengembangan masyarakat bidang sosial !
2. Pengembangan ekonomi seringkali mengabaikan kebutuhan lokal, coba anda jelaskan bagaimana semestinya melakukan pengembangan ekonomi lokal ?
3. Pengembangan masyarakat perlu mencerdaskan masyarakat dalam bidang politik. Hal ini dapat mendewasakan demokrasi warga. Jelaskanlah bagaimana pengembangan masyarakat dalam dimensi politik ?
4. Pengembangan budaya perlu memperhatikan budaya lokal, mengapa demikian ?
5. Kegiatan investasi dan ekonomi seringkali menguras kekayaan sumber daya alam tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan. Akibatnya, masyarakat lokal menanggung semua dampak kerusakan lingkungan itu. Jelaskan bagaimana komunitas dunia memprotes terhadap aksi pembangunan yang merugikan masyarakat lokal ?

BAB X

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

A. Sumber Daya

Sumber daya adalah sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*intangible*). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan (*renewable resources*) dan sumber daya tak terbarukan (*non-renewable resources*). Ke dalam sumber daya dapat pulih termasuk tanaman dan hewan (sumber daya hayati).

Pembahasan dalam proses pemberdayaan, yang dimaksud menyiapkan sumber daya adalah menyiapkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal.

1. Sumber daya alam

Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat digunakan untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam sangat penting bagi manusia, baik sumber daya alam yang berupa benda hidup (hayati) maupun yang berupa benda mati (non hayati). Kedua macam sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pemanfaatan sumber daya alam ditentukan berdasarkan kegunaan sumber daya alam tersebut bagi manusia. Oleh karena itu, nilai suatu sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia.

Sumber daya alam hayati yaitu tumbuhan, pertanian dan perkebunan dan hewan, peternakan, dan perikanan. Sumber daya alam nonhayati meliputi air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang.

Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Abdullah, 2007: 3).

1. Informasi tentang akses sumber daya alam
2. Program peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam
3. Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

4. Program penataan kelembagaan dan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
5. Program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Sumber daya manusia

Manusia termasuk sumber daya alam hayati, namun karena kekhususan yang dimiliki oleh manusia. Kekhususan yang dimaksud adalah manusia merupakan miniatur alam semesta yang luas ini. Banyak potensi-potensi manusia yang belum terungkap oleh ilmu pengetahuan. Demikian komplit pembahasan mengenai manusia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sumber daya alam dipisah dengan sumber daya manusia.⁴²

Sumber daya manusia (SDM)⁴³ adalah segala sesuatu yang berasal dari manusia, misalnya daya pikir, ide, pendapat, dan tenaga (tenaga kerja) yang bisa untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan. Sonny Sumarsono (2003, h 4), Sumber Daya Manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. *Pertama*, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. *Kedua*, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

Mary Parker Follett Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan- tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Definisi ini, yang dikemukakan oleh Mary Parker Follett, mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlakukan, atau dengan kata lain dengan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Mengelola sumber daya manusia bukanlah mengelola material atau fisik, melainkan mengelola manusia hingga bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

M.T.E. Hariandja (2002, h 2) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu institusi atau perusahaan di samping faktor yang lain

⁴²<http://humancapitaljournal.com/pengertian-sumber-daya-manusia/>

⁴³<http://matakristal.com/sumber-daya-alam-sumber-daya-manusia-dan-sumber-daya-modal/>

seperti modal. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Mathis dan Jackson (2006, h.3) menyebutkan, SDM adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

Demikian pula menurut The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) dalam Mullins (2005), sumber daya manusia dinyatakan sebagai strategi perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan untuk mengelola manusia untuk kinerja usaha yang optimal termasuk kebijakan pengembangan dan proses untuk mendukung strategi.

Hasibuan (2003, h 244), pengertian Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha belajar dan pelatihan. Kecerdasan tolok ukurnya *Intelligence Quotion* (IQ) dan *Emotional Quotion* (EQ).

Riva'i (2004: 35) menyebutkan, suatu organisasi tanpa didukung anggota yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, strategi dan operasionalnya, maka organisasi itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya, mengembangkan dan memajukan di masa yang akan datang.

Proses perencanaan sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (Handoko, 1997, p. 55-57):

a. Lingkungan Eksternal

Perubahan-perubahan lingkungan sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang. *Pertama*, Perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar tetapi sulit diestimasi. *Kedua*, Kondisi sosial-politik-hukum mempunyai implikasi pada perencanaan sumber daya manusia melalui berbagai peraturan di bidang personalia, perubahan sikap dan tingkah laku, dan sebagainya. *Ketiga*, perubahan-perubahan teknologi sekarang ini tidak hanya sulit diramal tetapi juga sulit dinilai. Sehingga perubahan teknologi menimbulkan gejolak sumber daya

manusia. *Keempat*, para pesaing merupakan suatu tantangan eksternal lainnya yang akan mempengaruhi permintaan sumber daya manusia organisasi.

b. Keputusan-keputusan Organisasional

Berbagai keputusan pokok organisasi mempengaruhi permintaan sumber daya manusia. *Pertama*, rencana strategis perusahaan adalah keputusan yang paling berpengaruh. Ini mengikat perusahaan dalam jangka panjang untuk mencapai sasaran-sasaran seperti tingkat pertumbuhan, produk baru, atau segmen pasar baru. *Kedua*, para perencana menterjemahkan rencana-rencana strategi menjadi operasional dalam bentuk anggaran. Besarnya anggaran adalah pengaruh jangka pendek yang paling berarti pada kebutuhan sumber daya manusia. *Ketiga*, forecast penjualan dan produksi meskipun tidak setepat anggaran juga menyebabkan perubahan kebutuhan personalia jangka pendek. *Keempat*, perluasan usaha berarti kebutuhan sumber daya manusia baru. *Kelima*, reorganisasi atau perancangan kembali pekerjaan-pekerjaan dapat secara radikal merubah kebutuhan dan memerlukan berbagai tingkat ketrampilan yang berbeda dari para karyawan di masa mendatang.

c. Faktor-faktor Persediaan Karyawan

Permintaan sumber daya manusia dimodifikasi oleh kegiatan- kegiatan karyawan. Pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian semuanya menaikkan kebutuhan personalia. Data masa lalu tentang faktor-faktor tersebut dan trend perkembangannya bisa berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang akurat.

3. Sumber daya modal

Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut.⁴⁴ Di dalam proses produksi, modal dapat berupa peralatan-peralatan dan bahan-bahan. Modal adalah hak milik atas kekayaan dan harta perusahaan yang berbentuk hutang tak terbatas suatu perusahaan kepada pemilik modal hingga jangka waktu yang tidak terbatas.

Sumber daya modal⁴⁵ dapat berupa uang atau barang, gedung, dan tanah yang bisa dipakai untuk memulai suatu usaha. Setiap akan memulai suatu usaha pasti membutuhkan modal, baik yang berupa uang maupun barang, sehingga modal menjadi salah satu faktor yang cukup penting untuk melakukan suatu usaha. Sumber-sumber modal di antaranya

⁴⁴<http://www.wattpad.com/2784902-sumber-daya-modal>

⁴⁵<http://matakristal.com/sumber-daya-alam-sumber-daya-manusia-dan-sumber-daya-modal/>

bersumber dari kekayaan pribadi, pinjaman dari bank, dan menjalin kerja sama dengan pihak lain (investor).

Soekartawi dalam Jamaludin Jamal⁴⁶ menyebutkan, sumber daya modal adalah barang-barang (sarana) yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang lain, misalnya: uang, bahan mentah, mesin, perkakas, dsb Soekartawi.

Modal dapat dibedakan atas kegunaan, bentuk, sumber, dan kepemilikannya.

a. Berdasarkan sifat kegunaannya

Modal berdasarkan kegunaannya dapat dibedakan atas dua, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksi, sedangkan modal lancar adalah modal barang-barang modal yang habis sekali pakai dalam produksi.

b. Berdasarkan bentuknya

Modal berdasarkan bentuknya dapat dibedakan atas modal kongkrit dan modal abstrak. Modal kongkrit adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi sedangkan modal abstrak adalah modal yang tidak dapat dilihat tetapi mempunyai nilai dalam perusahaan.

c. Berdasarkan sumbernya

Modal berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan, sedangkan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi.

d. Berdasarkan subjek atau kepemilikannya

Berdasarkan kepemilikannya, modal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Selanjutnya, modal masyarakat adalah modal yang dimiliki pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Modal masyarakat dapat juga diartikan sebagai modal yang berasal dari masyarakat dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

⁴⁶<http://malpertanian.blogspot.com/2014/04/sumber-daya-modal.html>

Realitas menunjukkan bahwa kekuatan penjajah tidak dapat melunturkan sikap dan tingkah laku budaya sumber daya manusia Indonesia sampai saat ini:⁴⁷

- a. Religiusitas masyarakat yang sangat tinggi
- b. Naluri hidup bertetangga secara baik
- c. Kemauan hidup berdampingan secara tolong menolong yang dicerminkan dari sikap gotong-royong.
- d. Solidaritas sosial atau tepa selera dan tenggang rasa yang mencerminkan hidup toleransi antar golongan, ras, dan suku.
- e. Sikap kejuangan masyarakat dalam mencapai cita-cita yang ulet dan tawakkal.

Meski demikian, sumber daya manusia Indonesia memiliki persoalan diantaranya rendahnya tingkat disiplin nasional, rendahnya kreativitas di bidang iptek, dan sikap kurang tegas dalam bidang-bidang kedinasan.

Berdasarkan perspektif kehidupan ekonomi, masyarakat dibagi atas tiga tingkatan perkembangan, yaitu masyarakat praindustri, masyarakat industri, dan masyarakat pascaindustri.

Heterogenitas masyarakat Indonesia disebabkan oleh tiga faktor ketimpangan, yaitu:

- a. Ketimpangan antar sektor (industri-pertanian)
- b. Ketimpangan antar daerah (maju- marginal)
- c. Ketimpangan antar golongan ekonomi (kapitalis, liberal, kaya- miskin, ekonomi rakyat).

Pengembangan masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia itu dengan memutar balik komposisi sumber daya manusia yang ada saat ini. Jika paramida itu melambangkan sumber daya manusia indonesia, yang mana di bagian puncak yang kecil terdapat orang-orang yang berpendidikan dan berketerampilan tinggi, sementara bagian bawah yang gemuk adalah orang-orang yang berpendidikan rendah dan tidak berpendidikan.

B. Pembangunan manusia melalui modal sosial

Dalam perspektif pekerjaan sosial esensi modal sosial berupa relasi-relasi kemanusiaan (*human relationship*), kewajiban dan pertukaran sosial (*social obligation and reciprocity*) serta solidaritas dan komunitas sosial. Hal ini sebagaimana dikemukakan Jim Ife (2002: 14-15), “*Social capital might be seen as the glue that holds society together,*

⁴⁷ Moh. Ali Aziz, Rr Suhartini, A. Halim, *Dakwah dan Pemberdayaan...*, hlm. 108-109.

human relationships, people doing things for each other out of sense of social obligation and reciprocity, social solidarity and community.

Modal sosial dalam pandangan Ife sebagai perekat (*glue*) bagi kehidupan masyarakat bersama. Dalam hal ini, aspek-aspek modal sosial tersebut merupakan hal yang sangat penting dan menentukan bagi kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan manusia, Putnam menjelaskan modal sosial memiliki pengaruh yang sangat menentukan. Dalam komunitas yang memiliki modal sosial rendah dapat dipastikan kualitas pembangunan manusianya akan jauh tertinggal. Beberapa dimensi pembangunan manusia yang sangat dipengaruhi oleh modal sosial antara lain kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai problem kolektif, mendorong roda perubahan yang cepat di tengah masyarakat dan memperluas kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok masyarakat untuk memperbaiki nasib secara bersama-sama memperbaiki mutu kehidupan seperti meningkatkan kesejahteraan, perkembangan anak, dan banyak keuntungan lainnya yang bisa diperoleh. Bangsa yang memiliki modal sosial tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan berbagai kebijakan untuk menyejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya. (Hasbullah, 2006, 38).

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya dalam kegiatan pengembangan masyarakat ?
2. Apa saja sumber daya alam yang dapat dijadikan modal oleh masyarakat dalam upaya pengembangan masyarakat ?
3. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan memperluas modal sosial masyarakat. Apa saja yang dikatakan modal sosial ?

BAB XI

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL DAN HAK AZASI MANUSIA

A. Definisi Keadilan Sosial

Keadilan berarti, *giving to each what he or she is due*, memberikan kepada siapa yang memang pantas mendapatkannya.

Keadilan sosial adalah: 1) *the creation of just relationships at all system levels*; 2) *the development of structures that provide for equality of opportunity*; 3) *the facilitation of access to needed information, services and resources*; and 4) *the support of meaningful participation in decision-making for all people*. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bahwa keadilan sosial itu adalah:

- a. Pewujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan).
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan
- c. Proses fasilitasi untuk akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan;
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.⁴⁸

Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan menetap untuk memberikan kepada masing-masing haknya. Keadilan adalah asas-asas hukum, hidup yang patut, tidak melukai pihak lain, memberikan kepada masing-masing bagiannya (haknya).

Rawls dalam Jim Ife⁴⁹ menyebutkan ada tiga prinsip keadilan, yaitu:

1. Kesetaraan dalam kebebasan dasar
2. Kesetaraan untuk mendapatkan kesempatan untuk kemajuan
3. Distribusi positif bagi mereka yang tidak beruntung dalam rangka menjamin kesetaraan.

Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti dari *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip

⁴⁸ www.slu.edu -School of Social Work-Sint Louis University

⁴⁹ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Communiy Development...*, hlm. 106

utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap.

Situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil

Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Menurut Jim Ife, prinsip yang dikemukakan oleh Rawls ini lebih tepat diterapkan pada perspektif individual. Analisis dari perspektif individual ini hanya melahirkan orang yang bersifat liberal. Analisis perspektif individual ini juga hanya merupakan salah satu cara memahami isu-isu sosial dan keadilan sosial. Perspektif ini memberikan pandangan yang terbatas dan berdimensi tunggal atas fenomena sosial. Jika dipahami dalam isolasi, dapat dikritik sebagai berwatak bawaan konservatif dan tidak memiliki basis moral.

Pandangan Rawls terhadap keadilan, menurut Jim Ife, tidak menjawab pertanyaan mengapa sumber daya perlu didistribusikan untuk kepentingan mereka yang tidak beruntung dan mengapa terdapat ketidaksetaraan. Dengan kata lain, tidak cukup perhatian yang diberikan Rawls kepada eksploitatif dan penindasan sebagai penggerak ketidakadilan. Mullaly dalam Jim Ife⁵⁰, menerangkan teori distribusional dari keadilan sosial terbatas pada dua alasan, yaitu (a) ia tidak memedulikan proses-proses dan praktik sosial yang

⁵⁰ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Communiy Development...*, hlm. 107

menyebabkan maldistribusi, dan (b) ia tidak mengakui keterbatasan logika dari perluasan gagasan distribusi kepada barang dan sumber daya non material (hak dan kesempatan).

Hak adalah hubungan-hubungan, aturan-aturan yang terdefiniskan secara melembaga yang menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hak mengacu kepada melakukan bukan memiliki. Hubungan-hubungan tersebut tidaklah setara, dipengaruhi oleh kekuasaan dan ketidakkuasaan. Hubungan tidak hanya menetapkan apa yang dapat dilakukan tetapi juga apa yang tidak dapat dilakukan, karena itu hubungan dapat dieksploitasi dan opresif. Jika keadilan sosial tidak sekedar distribusi sumber daya, maka hubungan-hubungan harus bebas dari eksploitasi dan opresif, serta kekuasaan seringkali dilibatkan. Iris Morison Young dalam Jim Ife⁵¹ memberikan suatu pengujian tentang keadilan sosial dan opresi. Hal itu terdapat dalam *justice and politics of deference* mendebat untuk suatu alternatif pertimbangan keadilan dari segi pendistribusian material. Ia memberikan suatu kritik tentang dua aspek yang berdasar pada filsafat positivisme dan reduksionisme. Ia mengklaim bahwa yang pertama menganggap struktur dan institusi sebagai tetap seadanya bilamana mereka ingin melakukan sesuatu evaluasi normatif, dan yang kedua adalah mereduksi fenomena sampai suatu kesatuan dan menilai kesamaan dan kelaziman di atas kespesifikan dan perbedaan. Menurut Young, dalam keadilanpun perlu keragaman. Ia mengakui adanya permainan antara kelompok-kelompok berkepentingan, kekuasaan, dominasi dan opresi. Oleh karena itu, pembahasan emansipasi, norma, kepercayaan, jejaring dan resiprositas dalam masyarakat. Gagasan Young tentang kota yang tidak opresif, memberikan sumbangsih dalam kajian hak dan pengembangan masyarakat, memberikan beberapa indikator pembangunan yang berguna bagi masyarakat yang berbeda-beda.

Keadilan adalah kebijakan yang bertalian langsung dengan kesejahteraan negara. Keadilan umum adalah kebijakan yang menyeluruh dan sempurna, yang wajib ditunaikan untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan negara (keadilan legal, keadilan menurut undang-undang). Keadilan khusus merupakan kebijakan khusus misalnya keberanian, kebijaksanaan, perbuatan yang menyangkut manusia pribadi. Keadilan kumutative keadilan yang berlaku pada hukum perdata, yang hanya bicara barang dan jasa dimana prestasi kontra prestasi. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan publik dalam masyarakat negara. Keadilan pembalasan (vindicatif). Berlaku pada hukum pidana, dimana hukuman sebanding dengan

⁵¹ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Communiy Development...*, hlm. 108

kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Equity (epieikeia: billijkheid: fairness): kepatutan dalam penegakan hukum.

B. Perspektif Memahami Isu-Isu Sosial

Taylor Gooby dan Dale dalam Jim Ife⁵² menjelaskan ada tiga perspektif dalam memahami isu-isu sosial suatu pendekatan memahami kondisi sosial pada keadaan yang merugikan atau tidak menguntungkan. Tiga perspektif yang dikemukakan oleh Taylor Gooby dan Dale meliputi perspektif individu, perspektif reformis kelembagaan dan perspektif struktural. Satu perspektif lagi ditambahkan oleh Jim Ife, yaitu perspektif post-struktural.

1. Perspektif Individual

Perspektif individual pada isu-isu sosial menempatkan sebuah masalah sosial terutama dalam lingkup individual dan karena itu mencari solusi-solusi berbasis individu. Masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kejahatan, bunuh diri, depresi dan pengangguran dilihat sebagai akibat dari beberapa kekurangan atau patologi pada individu. Solusi-solusi diupayakan dengan berdasarkan pada perlakuan atau terapi individual. Hal ini sangat penting dalam banyak kasus faktor-faktor individual adalah penting. Suatu pertimbangan pada tingkat individual dapat dikritik bahwa ia gagal memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh individu. Perspektif individual ini bisa disebut menyalahkan korban atau mereka yang terjebak masalah sosial. Individu-individu yang menderita sebagai konsekuensi-konsekuensi dari suatu masyarakat yang tidak adil justru dipersalahkan karena sesuatu yang didefinisikan sebagai kelemahan atau kekurangan mereka sendiri. Pendekatan ini bersifat konservatif dalam hal bahwa ia tidak memperhitungkan faktor-faktor penyebab yang penting seperti distribusi pendapatan, rasisme, patriarki, dan ketidakadilan pasar, pada hakikatnya membiarkan struktur dan wacana eksploitatif seperti itu berlangsung terus dan memusatkan semua perhatian pada individu.

2. Perspektif reformis kelembagaan

Perspektif reformis kelembagaan menempatkan masalah dalam lingkup struktur kelembagaan dalam masyarakat. Lemahnya sistem peradilan, penegak hukum; kepolisian, Kejaksaan dan hakim, merupakan penyumbang masalah kriminalitas dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kemiskinan dilihat sebagai akibat dari tidak efektif sistem jaminan sosial. Pada perspektif ini, solusi atas masalah-masalah sosial adalah reformasi struktur

⁵² Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development...*, hlm. 109

kelembagaan, penguatan dan penyempurnaan lembaga-lembaga yang dikembangkan untuk mengurus hal-hal yang menjadi kebutuhan sosial, misalnya perbaikan sistem pendidikan, sistem layanan kesehatan, reformasi institusi dan birokrasi pemerintahan, kepolisian, kejaksaan dan peradilan serta perbaikan sistem pelayanan kesejahteraan sosial. Perspektif ini dalam melihat masalah isu-isu sosial, dapat dikatakan bahwa mereka menyalahkan si penolong. Perspektif ini juga bersifat konservatif karena ia berkonsentrasi pada perbaikan masalah-masalah sosial bukan menangani penyebab dari masalah-masalah sosial tersebut.

3. Perspektif struktural

Perspektif struktural melihat masalah-masalah sosial dikarenakan oleh struktur sosial yang opresif dan tidak adil. Pendekatan ini dapat dikatakan sebagai kelompok yang menyalahkan sistem karena perspektif ini berkonsentrasi pada isu-isu patriarki, kapitalisme, rasisme kelembagaan dan distribusi pendapatan dan mengidentifikasi opresi atau struktur yang merugikan sebagai isu utama yang harus ditangani. Resep untuk perubahan dari perspektif ini mendorong restrukturalisasi masyarakat secara besar-besaran. Perspektif ini melihat masalah-masalah sosial tertanam dalam struktur-struktur yang opresif dalam masyarakat, yang mungkin dalam bentuk kelas, ras atau gender. Perspektif ini jelas merupakan sebuah pendekatan yang lebih radikal terhadap analisis masalah sosial, yang dikenal sebagai kurang populer di kalangan pemerintah arus utama dan para komentator media.

4. Perspektif post-struktural

Perspektif post-struktural dengan resiko menyederhanakan yang berlebihan dari literatur yang sangat kompleks. Perspektif ini mengikuti karya penulis Foucault dan beberapa penulis post-modernis, dapat dicirikan sebagai peduli kepada wacana yang berkaitan dengan masalah tertentu. Perspektif ini meyakini bahwa terjadinya masalah-masalah sosial terletak pada penggunaan bahasa, penyampaian makna, formasi dan akumulasi pengetahuan dan cara-cara yang digunakan untuk mengontrol dan mendominasi melalui pendefinisian hal-hal yang dianggap sesuai perilaku yang dapat diterima.

Perspektif ini beranggapan bahwa bahasa mengkonstruksikan wacana kekuasaan (*power discourse*) dan di dalam konstruksi kekuasaan yang diskursif (*discursive power*) seperti itu opresi dan keadaan yang merugikan menjadi diabadikan. Pandangan ini menolak realitas yang tetap dan objektif seperti yang dipahami oleh banyak pendukung perspektif struktural, walaupun hal ini tidak mesti inkonsisten dengan beberapa posisi struktural atau

kuasi-struktural, terutama feminisme. Kalau ingin menerapkan istilah menyalahkan perspektif ini dapat disebut menyalahkan wacana. Hal ini mengarah kepada suatu praktik yang melibatkan dekonstruksi wacana kekuasaan dan opresi dan melalui rekonstruksi yang mengikutinya. Mencari pemahaman-pemahaman tentang membagi memakai bersama pengetahuan dan makna-makna yang memungkinkan orang untuk membantu membentuk wacana alternatif tersebut. Perspektif ini berupaya mengungkapkan apa yang kelihatan sebagai titik-titik kelemahan yang senantiasa berubah dalam orde dominan yang dapat dieksploitasi untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Dengan mengesahkan wacana alternatif, post-strukturalisme mendorong suatu keanekaragaman konstruksi dari masalah dan dari solusi. Tidak ada satu jawaban solusi yang benar atas masalah-masalah sosial.

Pengembangan masyarakat dalam praktik normalnya sangat fokus dengan perspektif reformis kelembagaan dan struktural. Kebanyakan kerja masyarakat terfokus pada cara-cara mengembangkan program, layanan, fasilitas yang lebih baik di tingkat masyarakat, mewujudkan perubahan-perubahan struktural menuju masyarakat yang lebih adil. Sementara itu, perspektif individual lebih kepada tipikal wilayah kerja dari pekerja layanan individual, seperti konselor, terapis, atau pekerja kasus psikolog. Perspektif post-struktural muncul belakangan, dan telah memengaruhi kerja pengembangan masyarakat. Wacana kekuasaan, wacana-wacana dekonstruksi dan rekonstruksi serta legitimasi keanekaragaman dilihat sebagai memiliki potensi untuk pemberdayaan, penyumbang gagasan *bottom-up* dari pengembangan masyarakat.

Tabel 8.1
Perspektif-Perspektif Memahami Isu-Isu Sosial⁵³

PERSPEKTIF	SUMBER MASALAH	PERSEPSI ATAS MASALAH	SOLUSI
Individual	Menyalahkan korban	Patologi individual, psikologis, cacat moral atau watak	Terapi, perawatan medis, modifikasi perilaku, dukungan moral dan kontrol.
Reformis kelembagaan	Menyalahkan penolong	Lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mengurus masalah tersebut	Reorganisasi lembaga-lembaga, tambahan sumber daya, layanan, pelatihan yang lebih baik.
Struktural	Menyalahkan sistem	Struktur yang merugikan atau opresif, kelas, ras, gender, distribusi pendapatan dan kekuasaan, dsb.	Perubahan struktural, mengubah basis opresi, revolusi
Post-struktural	Menyalahkan wacana	Modernitas, bahasa, formasi dan akumulasi pengetahuan, pemahaman bersama.	Analisis dan pemahaman wacana, akses kepada pemahaman, menantang aturan, dsb.

⁵³ Jim Ife, *Community Development...*, hlm. 115

C. Pendekatan Berbasis Hak Azasi Manusia pada Pengembangan Masyarakat

Keadilan sosial secara tidak langsung berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan, yang mencakup beberapa acuan kepada hak-hak. Karena itu, hak-hak merupakan hal yang mendasar bagi pemahaman atas keadilan sosial. Hak asasi manusia merupakan upaya manusia untuk mendefinisikan suatu yang diterima sebagai hak-hak dasar manusia. Hak asasi manusia itupun merupakan wujud menjadi manusia itu. Oleh karena itu, gagasan HAM melebihi kebudayaan, dan menyediakan tonggak moral yang kuat yang dapat dipakai untuk berargumentasi melawan pelanggaran HAM di manapun terjadi.

Menurut Dr. M. Taufiq Rahman,⁵⁴ Sayyid Quthub, barangkali, saat ini merupakan seorang ilmuwan Muslim yang banyak mendapat sorotan. Namanya, banyak dikaitkan dengan kebangkitan radikalisme di dunia Islam. Tak jarang yang kemudian bersikap alergi terhadap pemikirannya. Tapi, secara ilmiah, sikap *apriori* semacam itu tentu saja keliru. Banyak karya besar telah dilahirkannya. Salah satunya, *Tafsir Fi Dzilalil Quran*. Diantara pemikiran menarik dari Sayyid Quthub adalah teori tentang “keadilan sosial”.

Dalam bukunya *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam) Qutb tidak menafsirkan Islam sebagai sistem moralitas yang usang. Tetapi, ia adalah kekuatan sosial dan politik konkret di seluruh dunia Muslim. Di sini Qutb melawan Ali Abd al-Raziq dan Taha Hussein yang menyatakan bahwa Islam dan politik itu tidak bersesuaian. Qutb menyatakan tidak adanya alasan untuk memisahkan Islam dengan perwujudan-perwujudan yang berbeda dari masyarakat dan politik.

Pemikiran Qutb tentang keadilan sosial dalam Islam dilatar belakangi oleh pandangannya bahwa prinsip keadilan sosial Barat itu didasarkan pada pandangan Barat yang sekular, di mana agama hanya bertugas untuk pendidikan kesadaran dan penyucian jiwa, sementara hukum-hukum temporal dan sekular lah yang bertugas menata masyarakat dan mengorganisasi kehidupan manusia. Islam itu tidak demikian, kata Qutb: “...*kita tidak mempunyai dasar untuk mengukuhkan permusuhan antara Islam dan perjuangan untuk keadilan sosial, seperti permusuhan yang ada antara Kristen dan Komunisme. Karena Islam telah menyiapkan prinsip-prinsip dasar keadilan sosial dan mengukuhkan klaim orang miskin pada kekayaan orang kaya; ia menyediakan prinsip keadilan bagi kekuasaan dan uang, sehingga tidak ada perlunya untuk membius pemikiran manusia dan mengajak mereka untuk meninggalkan hak-hak bumi mereka untuk tujuan harapan mereka di akhirat.* (Al-‘Adalah, h. 20).

⁵⁴ Dr. M. Taufiq Rahman, Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung

Apa yang diformulasikan Qutb adalah gagasan tentang keadilan sosial yang bersifat kewahyuan. Yaitu bahwa umat Islam harus mengambil konstruksi moral keadilan sosial dari al-Qur'an yang telah diterjemahkan secara konkret dan sukses oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Menurutnya, tradisi kenabian ini selalu muncul dari zaman ke zaman betapapun banyaknya rintangan yang membuat tenggelamnya tradisi ini.

Menurut Qutb, keadilan sosial dalam Islam mempunyai karakter khusus, yaitu kesatuan yang harmoni. Islam memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya di bawah arahan Penciptanya. Keadilan Islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, individu dan kelompok, masalah ekonomi dan spiritual dan variasi-variasi dalam kemampuan individu. Ia berpihak pada kesamaan kesempatan dan mendorong kompetisi. Ia menjamin kehidupan minimum bagi setiap orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak mengharapkan kesamaan kekayaan.

Hamid Algar, dalam pengantarnya untuk buku *Social Justice in Islam*, menyatakan, bahwa Sayyid Qutb dapat dilihat sebagai orang yang pertama di dunia Islam yang mengartikulasikan masalah keadilan sosial pada zaman modern. Teori keadilan sosialnya begitu sentral dalam pemikirannya. Teori ini dipertahankannya sehingga akhir hayatnya. Barangkali karena topik inilah yang memberikan sambungan antara teologi dan realitas sosial, suatu sambungan yang menjadi inti dari pemikirannya, yaitu Islam sebagai kekuatan sosial dan politik yang konkret.

Menurut Shepard (1996), walaupun topik yang diambil itu agak sekular yaitu keadilan sosial, Qutb mengakhirinya dengan teosentrisme penuh dengan titik tekan pada pelaksanaan Syari'ah sebagai jembatan untuk merealisasikan keadilan sosial. Demikian itu karena, bagi Qutb, hanya Allah lah yang mengetahui cara merealisasikan keadilan sosial yang benar. Maka apa yang Allah gambarkan dalam al-Qur'an dan yang dilaksanakan oleh Nabi-Nya itulah yang perlu diikuti. Dan warisan itu adalah pelaksanaan Syari'ah.

Namun, Moussali (1993) dalam bukunya, *The Views of Islamic Fundamentalism and Political Philosophy*, berkeberatan dengan teori Qutb tersebut, karena pandangan tersebut telah mengaburkan visi tentang bagaimana berhubungan secara praktis dengan struktur-struktur yang ada. Menurut Moussali pula, konsep Qutb tentang perlunya mentransendensi ruang dan waktu telah membawa pada gambaran idealistik yang menghalangi interaksi yang bermakna dengan realitas.

Realitas itu, tentu saja, termasuk keberadaan umat Islam yang tidak berada dalam keadaan hampa budaya. Umat Islam tengah berada dalam lingkaran budaya yang berbeda-beda dalam kehidupan mereka, budaya-budaya yang tidak sepenuhnya Islam sebagaimana yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Di situlah, kemudian, Qutb menyatakan bahwa umat Islam tengah mengalami kejahiliyyahan. Baginya, “Islam sudah tidak ada lagi” (*Al-‘Adalah*, h. 248). Sementara kejahiliyyahan itu harus dihancurkan, umat Islam tengah berada di dalamnya. Lalu bagaimana ide pemurnian itu bisa dilakukan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Qutb memberikan resep yang telah dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu membentuk jama‘ah kecil yang berkomitmen kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya, melakukan pemisahan emosional (*‘uzla shu‘uriyya*), kemudian membentuk generasi Qur‘ani, dan akhirnya menyiapkan tatanan hukum sosial atau membina masyarakat (Lihat *Ma‘alim fi al-Tariq, passim*).

Jadi, Qutb tidak sedang melakukan *rapprochement* (penghampiran) dengan Barat, walaupun tema keadilan sosialnya itu pun tampaknya sebagai pengaruh dari membanjirnya “vitalitas Marxisme” seperti kata Algar. Ia tengah melakukan penjarahan (distansiasi) dengan Barat dengan mengajukan resep Islam yang stabil, seimbang, dan komprehensif.

Namun, apapun yang dilontarkan oleh para pengkritik tentang pemikiran Sayyid Qutb, pemikirannya tentang keadilan sosial dalam Islam hampir murni dari kritik. Ini karena Qutb menyajikan bahwa untuk sebuah himbauan moral, Islam pun mempunyai dasar-dasar etis tentang keadilan sosial. Bukannya kritik yang ada, bahkan peniruan atas atau penghampiran dengan teori Qutb yang kemudian bermunculan. Semua buku atau artikel yang ada tentang keadilan sosial dalam Islam adalah kurang lebih sama dengan apa yang ditulis Qutb. Hamid Algar menyebut bahwa setelah buku Sayyid Qutb ini (1949) muncul buku senada dari Suriah yaitu *Ishtirakiyyat al-Islam* (Sosialisme Islam) (1951) oleh Mustafa al-Siba‘i, *Keadilan Sosial dalam Islam* (1951) oleh Hamka dari Indonesia, dan *Iqtisaduna* (Ekonomi Kita) oleh Ayatullah Muhammad Baqir al-Sadr dari Iran.

Demikian itu karena Qutb, sebagaimana penulis Muslim lainnya, mendasarkan pemikiran mereka kepada sumber yang sama: al-Qur‘an dan al-Sunnah. Kaum Muslim bisa menerima teori semacam ini, sebagaimana *A Theory of Justice*-nya John Rawls yang masih tetap berada dalam tataran teori, orang Barat masih saja menerimanya. Bahkan banyak yang memuji Rawls, karena teorinya dipandang dapat memajukan cara berpikir tentang keadilan (Knowles, *Political Philosophy*, 2001).

Maka, positifnya, teori Qutb tentang keadilan sosial dalam Islam ini dapat selalu mengingatkan kaum Muslim pada pandangan moral Islam tentang keadilan sosial. Sebab, keadilan adalah prinsip penting dalam ajaran Islam yang harus senantiasa ditegakkan oleh umat Islam di tengah masyarakat.

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Uraikanlah definisi keadilan dan batasan-batasan keadilan ?
2. Uraikanlah perspektif-perspektif dalam memahami isu-isu sosial ?
3. Apa yang dimaksud dengan pengembangan masyarakat pada perspektif keadilan sosial ?
4. Uraikanlah apa itu hak azasi manusia ?
5. Apa yang dimaksud dengan pengembangan masyarakat pada perspektif hak azasi manusia ?

BAB XII

PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKOLOGI

A. Pengembangan Masyarakat Perspektif Ekologi

Krisis lingkungan yang dihadapi dunia membuat para pemikir lingkungan khawatir kelangsungan hidup anak manusia di planet bumi tempat mereka tinggal. Krisis tersebut mempunyai potensi dalam jangka panjang atau menengah, mengancam kelangsungan hidup manusia atau mengancam peradabannya. Jika diperhatikan masalah krisis lingkungan tersebut, maka keseriusan dari krisis lingkungan dapat menjadi perhatian bersama.

Kecemasan kelangsungan hidup anak manusia didengungkan oleh seorang petinggi PBB, sebagai mana yang dikutip oleh Dra. Nanih Machendrawaty, M. Ag dan Agus Ahmad Safei, M. Ag, "Dunia kita berada di tepi kehancuran lantaran ulah umat manusia, sumber-sumber alam dijarah kelewat batas."⁵⁵ Jika masalah-masalah lingkungan hidup dilihat sebagai akibat dari sistem sosial, ekonomi dan politik, maka sifat dari masalah tersebut secara mendasar dapat berubah. Jadi, dalam pandangan lingkungan, perubahan yang diperlukan adalah perubahan yang tertanam dan dimulai dari diri setiap individu manusia itu sendiri.

Pengembangan masyarakat dalam perspektif ekologis, tidak bisa dilepaskan dari kritik radikal dari kelompok Green. Kritik ini mewakili suatu tantangan yang kuat dan mendasar kepada banyak norma dari wacana sosial dan politik yang sudah diterima. Dalam abad ke XXI ini, mau tidak mau akan memainkan peran utama dalam membentuk masyarakat masa depan.⁵⁶

Dari perspektif Green, perubahan bukanlah suatu yang sulit, mahal dan mewah untuk dilakukan sehingga harus menunggu harus ditunda sampai waktunya tepat. Masalah-masalah yang ada demikian dekat dan mendesak dan kegagalan bertindak dapat menempatkan peradaban manusia masa depan yaitu kehidupan manusia itu sendiri dan makhluk hidup lainnya berada dalam bahaya.⁵⁷

⁵⁵ Machendrawaty, Nanih, Safei, Agus Ahmad, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2001), hlm. 227

⁵⁶ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Communiy Development...*, hlm. 52

⁵⁷ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Communiy Development...*, hlm. 52

Jim Ife⁵⁸ mengutip pendapat Brown, 1994; Ehrlich dan Ehrlich, 1990; Meadows dan Renders, 1992; Suzuki dan McConnell, 1997; Van Der Veer dan Pierce, 1998 dan McKibbin, 1990, bahwa krisis lingkungan yang dimaksud mencakup polusi udara, laut, sungai dan tanah, kandungan racun dalam rantai makanan, penurunan sumber daya alam bumi, penipisan lapisan ozon, pemanasan global, kepunahan flora dan fauna, hilangnya wilayah-wilayah alam liar, erosi lapisan atas tanah, desertifikasi, deforestasi, limbah nuklir, dan krisis populasi.

Perspektif lingkungan hidup terhadap masalah-masalah ekologis memiliki dua ciri utama, yaitu :⁵⁹

1. Mereka berupaya memecahkan masalah-masalah yang spesifik dengan solusi-solusi diskrit. Misalnya masalah pemanasan global diatasi dengan mengurangi efek rumah kaca, berkurangnya sumber daya maka diatasi dengan penggunaan energi alternatif, masalah polusi diatasi dengan anti polusi, masalah populasi diatasi dengan program keluarga berencana, hilangnya alam liar, kepunahan flora dan fauna diatasi dengan pembuatan kawasan (hutan) lindung. Pendekatan seperti ini dikenal juga dengan cara berpikir yang linear yang telah memainkan peran dominan dalam pandangan dunia Barat yang berkemajuan industri dan teknologi yang telah dikembangkan. Pendapat ini dikutip oleh Jim Ife dalam Capra, 1982; Rifkin, 1985; Saul, 1992; Postman, 1993; Torgerson, 1993.
2. Mereka mencari solusi-solusi dalam orde sosial, ekonomi dan politik yang ada saat ini. Tidak dipandang perlu mengubah secara mendasar sifat dari masyarakat tetapi orde yang ada ini dilihat sebagai mampu memecahkan masalah tersebut melalui penerapan keahlian teknis. Ini biasanya menyebabkan ketergantungan pada solusi-solusi teknologi dan keahlian dihargai sedemikian tinggi. Misalkan limbah nuklir pasca perang dunia kedua. Meski semua negara menyadari limbah nuklir sangat berbahaya dalam jangka panjang, mereka tetap saja mengoperasikan reaktor-reaktor nuklir yang menghasilkan limbah nuklir, namun harapannya di masa mendatang dapat ditemukan suatu inovasi teknologi yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Boleh jadi solusi itu tidak ditemukan atau mungkin memang tidak ada solusi, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup di muka bumi.

Atas asumsi tersebut, muncul tanggapan kritis dari Green, yang radikal dan mendasar. Pendekatan Green melihat masalah-masalah lingkungan hidup merupakan gejala-gejala sosial yang mendasar yang lebih penting. Menurut Green, konsekuensi dari orde sosial, ekonomi dan politik yang tidak berkelanjutan sehingga kebijakan dalam pemanfaatan lingkungan saat ini, dapat sangat membahayakan kelangsungan hidup masa mendatang. Oleh karena itu, menurut kelompok ini perlu merubah orde sosial, ekonomi dan politik yang ada. (Porit, 1984; Dobson, 1995; Carter, 1999). Solusi-solusi

⁵⁸ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Communiy Development...*, hlm. 52

⁵⁹ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Communiy Development...*, hlm. 54

konvensional, linear, dan teknologis mungkin memadai dalam mengatasi masalah lingkungan hidup dalam jangka pendek, namun tidak dapat menghambat ledakan masalah-masalah lingkungan hidup pada tingkat tertentu dalam kurun waktu yang lama. Akan tetapi, menurut pendapat ini, krisis lingkungan hidup itu dapat diatasi apabila sistem orde sosial, ekonomi dan politik itu diubah sejak dini. Posisi Green melihat lingkungan hidup tidak merupakan suatu yang terpisah antara masalah yang satu dengan masalah yang lainnya, namun ia satu kesatuan, masalah yang saling terkait.

Pendekatan konvensional melihat masalah-masalah lingkungan hidup merupakan masalah fisik yang terjadi pada udara, air, polutan, reaksi-reaksi kimia, tanah dan iklim, ekosistem dan suhu, makanya memunculkan solusi-solusi yang pada hakikatnya bersifat fisik dan teknis. Oleh karena itu, disiplin ilmu-ilmu fisik dilihat sebagai basis utama untuk mengurus masalah-masalah tersebut.

Perspektif Green melihat masalah lingkungan pada hakikatnya masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik. Untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah lingkungan harus mencari kearifan dan keahlian dari ilmu-ilmu sosial, ekonomi dan politik, bukan mengandalkan ilmuwan fisika saja yang hanya berorientasi pada penyelesaian gejala-gejala fisiknya saja. Maka dari itu, pekerja masyarakat memiliki andil yang besar dalam pendapat Green ini. Kerja masyarakat yang berkelanjutan memiliki potensi sebagai salah satu cara efektif untuk mengembangkan masyarakat yang berkelanjutan.⁶⁰

Beberapa tema penting dalam perspektif Green, yaitu :

1. Eko Sosialisme

Penganut eko sosialisme berpendapat bahwa krisis ekologis pada hakikatnya adalah konsekuensi dari kapitalisme. Dalam analisis Karl Marx, pertumbuhan dan industrialisasi yang telah mengiringi perkembangan kapitalisme dilihat sebagai telah mengakibatkan limbah, konsumsi berlebihan, dan polusi bersama dengan kurangnya tanggung jawab untuk kesehatan penghuni planet ini. Lingkungan hidup seperti juga angkatan kerja yang tertindas dan teralienasi telah membayar harga bagi keberhasilan kapitalisme. Ideologi kapitalisme telah menekankan individualisme dan hubungan yang eksploitatif dengan lahan dan sumber daya alam.

Dari perspektif eko sosialisme, solusi krisis ekologi terletak pada suatu bentuk sosialisme. Perlindungan yang cukup bagi lingkungan dan konservasi sumber daya dapat

⁶⁰ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development...*, hlm. 56

lebih mudah dicapai melalui suatu sistem kolektif atau komunis. Oleh karena itu, transisi masyarakat sosialis dilihat sebagai kebutuhan yang mendesak. Kelompok ini berpendapat, hanya dengan mengurangi hak milik privat dan kepemilikan kapitalis dari alat-alat produksi nilai-nilai sosial dan kolektif yang inheren dalam suatu masyarakat berkelanjutan dapat diwujudkan.

Fakta dalam negara sosialis sampai tahun 1989 diperintah oleh rezim yang dianggap sosialis memiliki sebagian dari catatan terburuk dalam pengrusakan lingkungan dan sosialisme yang ramah lingkungan belum pernah didemonstrasikan dalam praktik.

2. Eko Anarkhisme

Kelompok berpaham Eko Anarkhisme, mempertahankan pendapat bahwa krisis ekologis adalah akibat dari struktur-struktur dominasi dan kontrol yang dicontohkan oleh pemerintah, bisnis, militer, dan bentuk-bentuk lain dari regulasi. Bagi kelompok ini, sesungguhnya struktur-struktur ini menyangkal kebebasan manusia dan potensi untuk menikmati alam. Mereka telah mengasingkan manusia dari dunia yang alami yang akibatnya manusia mengembangkan praktik-praktik yang merusak secara ekologis.

Oleh karena itu, kelompok ini menginginkan suatu masyarakat yang kontrol dari pusatnya, yang keputusan-keputusannya diambil oleh individu-individu dari dalam kelompok masyarakat lokal. Kelompok ini lebih menyukai bentuk organisasi sosial yang terdesentralisasi, otonomis dan lokal yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi sosial, daripada organisasi sosial yang bersifat hierarki.

Menurut Jim Ife⁶¹, kedua perspektif di atas (eko sosialisme dan eko anarkhisme) perlu dimodifikasi jika ingin dijadikan sebagai landasan gerak dalam memperjuangkan pengembangan masyarakat dalam perspektif ekologis. Menurutnya, eko sosialisme cenderung mendukung dan mendorong adanya perencanaan, koordinasi dan kontrol terpusat dari negara. Ini adanya satu komando atau dikenal sentralisasi kebijakan. Apabila kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat lokal diambil oleh pemangku kebijakan maka akan berdampak fatal bagi publik. Maka, eko sosialisme perlu juga desentralisasi demokratis. Ini lebih menguntungkan daripada sentralisasi yang akan menimbulkan model stalinis. Di sisi lain, eko anarkhisme merupakan antitesis dari eko sosialisme, yang menginginkan adanya desentralisasi, otonomi dan lokal. Eko anarkhisme juga perlu dimodifikasi, perlu menimbang dengan serius pandangan Green bahwa umat manusia hidup bersama dalam satu dunia terbatas. Prinsip ekologi, aksi dimanapun dalam sistem

⁶¹ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Communiy Development...*, hlm. 60.

global akan memengaruhi yang lainnya dan karena itu merupakan urusan semua orang. Namun yang perlu diperhatikan, kedua perspektif ini perlu mencermati bahwa filosofisnya berpikir global, bertindak lokal.

3. Eko Feminisme

Kaum eko sosialis melihat masalah ekologi ini dalam pengertian kapitalisme, eko anarkhisme melihat masalah ini dalam pengertian dominasi dan kontrol, sedangkan eko feminisme melihat masalah dari dunia yang secara ekologis sakit ini dalam artian patriarki dan akibat-akibatnya. Dari titik pandang ini adalah struktur patriarkal dari dominasi, penindasan, kontrol yang telah mengakibatkan terbentuknya suatu masyarakat yang kompetitif, serakah dan eksploitatif. Masyarakat patriarki akhirnya telah terbukti tidak berkelanjutan dan terbukti tidak menolong dirinya sendiri dari bencana-bencana lingkungan hidup yang diciptakannya.

Dalam pandangan eko feminisme, perubahan yang diperlukan adalah perubahan yang tertanam dalam gerakan feminis yang menantang struktur-struktur patriarkal, struktur itu dibuka, dibongkar dan diganti. Tentu saja gerakan feminis seperti gerakan-gerakan lain yang dijelaskan dalam bagian ini, memiliki berbagai unsur dan tekanan yang bertentangan. Gerakan feminis liberal beragumen bahwa perempuan harus didorong dan didukung untuk bersaing secara efektif dengan laki-laki. Sementara itu, gerakan feminis struktural berargumentasi bahwa suatu analisis feminis mensyaratkan perkembangan sebuah masyarakat didasarkan atas prinsip organisasional berbeda, berupaya mengganti struktur-struktur yang kompetitif dengan struktur yang kooperatif untuk menggantikan individualisme dengan pengambilan keputusan kolektif sejati dan menghargai semua orang daripada mendukung dominasi, penindasan, kontrol dan eksploitasi dari pihak lain.

Selain dari dua aliran itu, ada lagi aliran neofeminisme pos struktural menekankan wacana penindasan, cara patriarki mendominasi wacana kekuasaan dan berupaya mendekonstruksi wacana tersebut dan memvalidasi suara mereka yang tersingkirkan.

Dalam pandangan eko feminisme, ada dua agenda penting yang menjadi dasar pertanyaannya, yaitu; *pertama*, bagaimana menjamin perubahan apapun yang diprakasai, tidak melanggengkan penindasan kepada perempuan, tetapi berfungsi untuk menentang dan menyingkirkan sistem yang mendominasi dan berkuasa, atau sistem patriarki itu. *Kedua*, sejauhmana pengalaman, kesadaran dan pandangan dunia bagi perempuan mewakili suatu paradigma alternatif pada suatu orde sosial, ekonomi dan politik yang secara ekologis berkelanjutan dapat dikembangkan dengan berhasil.

4. Eko Ludisme

Pandangan Green adalah kritik terhadap teknologi yang beragumen bahwa perkembangan teknologi yang tidak dikekang jauh dari membawa manfaat tak terbatas kepada manusia, menciptakan lebih banyak masalah daripada yang dapat dipecahkan dan bertanggung jawab atas masalah-masalah dunia saat ini. Kata Ludisme berasal dari kata *Luddite* telah menjadi kata yang lazim untuk menunjukkan orang-orang yang tidak percaya terhadap teknologi baru. Gerakan anti teknologi ini menyuarakan pandangan yang sederhana tetapi sangat penting, yaitu tujuan-tujuan sosial tidak boleh berada di bawah tujuan-tujuan ekonomi dan bahwa perkembangan teknologi dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif bagi kemanusiaan.

Penulis-penulis Green mengambil perspektif ini melihat perkembangan teknologi sebagai penyebab utama dari krisis lingkungan hidup. Kita telah mengembangkan teknologi dengan akibat-akibat yang tidak dimengerti, ketidakberlanjutan dan ketidakpastian adalah konsekuensi dari masyarakat teknologi. Analisis yang dikemukakan oleh Ivan Illich dikutip Jim Ife⁶² berpendapat bahwa teknologi di sejumlah bidang telah berkembang sampai titik yang kerugiannya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Ivan Illich mencontohkan perkembangan teknologi pada teknologi kedokteran dan transportasi. Kemudian Jim Ife mengutip pendapat Bowers (2000) mengemukakan kritik terhadap perkembangan teknologi komputer. Manusia bergembira karena manfaat yang dapat diambil dari teknologi komputer. Akan tetapi, sisi lain dari kemajuan ini berdampak negatif. Terjadinya devaluasi pengetahuan dan pengalaman manusia yang tidak dapat direduksi menjadi impuls-impuls digital, peningkatan individualisme karena orang mengasingkan diri ke ruang maya dan tidak lagi berinteraksi dengan manusia lainnya.

5. Anti Pertumbuhan

Beberapa penulis gerakan Green melihat pertumbuhan merupakan masalah besar. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, pertumbuhan daerah urban, pertumbuhan keberlimpahan, dan pertumbuhan organisasi adalah diinginkan dan tidak terelakkan. Pertumbuhan tidak dapat berlangsung terus selamanya karena sifatnya terbatas dari bumi yang membatasi baik sumber daya yang tersedia maupun biaya-biaya pertumbuhan yang dapat ditanggung. Jim Ife mengutip pendapat David Suzuki⁶³ yang berpendapat bahwa terdapat tanda-tanda jelas bahwa batas-

⁶² Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Communiy Development...*, hlm. 64

⁶³ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Communiy Development...*, hlm. 67

batas alamiah telah tercapai dan pertumbuhan tidak dapat dilanjutkan. Krisis lingkungan hidup adalah hasil dari pertumbuhan yang telah melebihi kapasitas bumi mengatasi konsekuensinya. Pertumbuhan itu sulit untuk dibendung karenanya yang perlu dilakukan adalah membentuk perspektif baru dari sebuah pertumbuhan yaitu pertumbuhan alternatif dengan prinsip berkelanjutan. Alternatif ini diharap dapat efektif dilaksanakan untuk membatasi pertumbuhan yang ada. Pertumbuhan berbasis berkelanjutan ini akan menjamin sumber daya digunakan hanya pada tingkat ketida ia dapat digantikan atau terbarukan. Sementara keluaran kepada lingkungan hidup dibatasi sejauhmana ia dapat diserap atau didaur.

6. Ekonomi alternatif

Perspektif ini melihat masalah utamanya adalah sistem ekonomi yang telah dikembangkan dalam kapitalisme industri karena ia telah mendorong konsumsi berlebih, limbah, pertumbuhan dan mendevaluasi lingkungan hidup. Terdapat dua pandangan utama dalam kelompok ekonomi alternatif, yaitu *pertama*, berupaya meredefinisi analisis ekonomi konvensional untuk menginkorporasikan pertimbangan-pertimbangan dari para environmentalis. Ekonomi konvensional menganggap pembuangan limbah ke lingkungan tidak merupakan beban biaya, karena mereka biasanya lepas tanggung jawab. Seringkali yang menanggung dan membersihkan limbah perusahaan tersebut adalah pemerintah dan masyarakat. Padahal, pemerintah atau masyarakat yang membersihkan lingkungan akibat pembuangan limbah tersebut juga mengeluarkan sejumlah biaya. Kritik terhadap hal ini, mestinya mengenai untung dan rugi harus dipertimbangkan juga setelah pihak perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya reklamasi, untuk memperbaiki kembali lingkungan yang rusak. Dengan demikian, faktor-faktor lingkungan haruslah menjadi faktor internalitas bukan faktor eksternalitas, sehingga perbaikan kembali lingkungan dapat perhatian yang serius dalam mencegah kerusakan lingkungan.

Kritik gerakan Green terhadap ekonomi konvensional telah berargumentasi bahwa tidak adanya pengakuan atas fenomena sosial dan ekologis berarti bahwa ilmu ekonomi jauh dari bebas nilai, bahkan ia memperkuat sistem yang ada saat ini, yang sangat merusak lingkungan dan sosial.

Pandangan kedua mengenai gerakan ekonomi alternatif ini adalah memperjuangkan perubahan yang mendasar. Ada tiga orang penulis menurut Jim Ife, yaitu Hazel Henderson (1988), Paul Ekins (1986) dan Manfred Max Neef (1991) adalah penulis penting dalam perspektif ini. Mereka berargumentasi untuk suatu perubahan paradigma mendasar dalam

cara menguraikan fenomena sosial dan ekonomi. Usulan ekonomi oleh pakar tersebut, mencari sistem ekonomi yang terdesentralisasi dan berbasis masyarakat. Ekonomi konvensional hanyalah kegiatan transfer kekayaan dari daerah-daerah kaya sumber daya alam, namun miskin sumber daya manusia, kemudian kekayaan-kekayaan itu dibawa ke negara maju. Bagi masyarakat pribumi, hanya tinggal kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan. Karena itu, perlu kegiatan ekonomi alternatif yang bersifat lokal, yang dapat menyerap tenaga kerja lokal.

7. Kerja, waktu senggang dan etika kerja

Beberapa penulis Green berpendapat bahwa pemahaman atas waktu kerja dan waktu senggang, peran, pembagian dan pasar tenaga kerja adalah bagian dari permasalahan yang telah mengakibatkan krisis ekologis.

8. Pembangunan global

Analisis lain dari gerakan Green dalam pengembangan masyarakat, seperti yang ditulis oleh Ted Trainer, Susan dan Vandana Shiva seperti dikutip Jim Ife⁶⁴ menyebutkan bahwa banyak lingkungan terburuk dari negara-negara yang dicirikan dunia mayoritas (negara ketiga), yang mempunyai polusi tingkat tinggi di daerah perkotaan, degradasi lahan pada skala besar, pertumbuhan populasi yang tinggi dan daerah yang alamnya liar seperti hutan dihancurkan dengan cepat. Hal ini terjadi karena pemerintah di dunia ketiga itu berupaya mempromosikan pengembangan ekonomi melalui pengembangan industri, penggunaan lahan yang lebih efisien dan eksploitasi sumber daya alam. Dengan demikian, pengembangan ekonomi negara-negara berkembang melalui industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam itu, akan mendorong percepatan kerusakan kronis ekologis.

Perspektif Green dari persoalan ini ada dua hal penting. Pertama, tanggung jawab untuk perubahan pada keberlanjutan ekologis di dunia berkembang membutuhkan perubahan mendasar di dunia maju. Kedua, pendekatan yang holistik dan sistemik dari posisi Green di dunia minoritas menekankan bahwa kita hidup di sebuah dunia yang terbatas dan bahwa manusia saling terkait dalam hal eksistensi saat ini dan nasibnya kelak. Peradaban akan bertahan hidup hanya jika terjadi perubahan radikal pada keberlanjutan ekologis di seluruh belahan dunia baik negara maju maupun di negara berkembang.

9. Eko filosofi

Gerakan eko filosofi merupakan gerakan yang berupaya membangun suatu basis filosofis untuk environmentalisme. Kelompok ini menilai bahwa kebanyakan negara Barat,

⁶⁴ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Communiy Development...*, hlm. 73

beranggapan bahwa manusia lebih istimewa dari makhluk lain di dunia ini. Oleh karena itu, pembangunan harus memperhatikan kepentingan manusia, dan mengabaikan kepentingan makhluk lain. Tindakan manusia dievaluasi berdasarkan dampak-dampaknya terhadap manusia lain. Tokoh dalam gerakan Green ini adalah Robyn Eckersley dan Warwick Fox, mengemukakan pendapat bahwa perlu mengembangkan suatu kerangka filosofi alternatif sebagai suatu justifikasi bertindak. Dalam pandangan ini, manusia tidak dianggap suatu yang paling penting, namun semua makhluk, termasuk manusia, merupakan satu kesatuan ekosistem yang utama yang perlu dijaga dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Gerakan ini memperjuangkan hak-hak hidup hewan dan tumbuhan, yang membentuk satu ekosistem dengan manusia.

10. Pemikiran paradigma baru

Paradigma berarti pandangan dunia yang didalamnya teori, praktik, pengetahuan, ilmu, tindakan dan seterusnya dikonseptualisasikan. Paradigma adalah suatu himpunan asumsi, gagasan, pengertian dan nilai yang menetapkan aturan-aturan tentang apa yang relevan dan tidak relevan, pertanyaan apa yang harus dan apa yang tidak seharusnya ditanyakan, pengetahuan apa yang seharusnya dianggap sah dan praktik apa yang dapat diterima. Dalam hal ini, ada dua paradigma, yaitu paradigma dominan dan paradigma baru yang menjadi fokus pembahasan ini. Paradigma dominan menekankan rasionalitas dan ilmiah dan menilai rendah pengalaman subjektif, intuitif, dan bentuk lain dari pengetahuan.

Menurut Jim Ife, semua posisi Green yang dikemukakan sebelumnya adalah merupakan paradigma baru. Akan tetapi perlu diingat bahwa Green lebih luas dari paradigma baru, namun juga lebih banyak disalahgunakan, lebih dari sekedar mendasar, paradigma baru pada hakikatnya berhubungan dengan proses berpikir, intelektual, riset dan cara kita melihat dunia, Green bagaimanapun juga mengandung perspektif aksi dan secara langsung berarti suatu gerakan sosial dan proses politik yang tidak selalu ada dalam paradigma baru. Meskipun para pemikir paradigma baru akan memasukan aksi sosial dan politik dalam formulasi-formulasinya.

B. Kesehatan Lingkungan (*Ecology Awareness*)

Ada beberapa definisi dari kesehatan lingkungan. Menurut WHO (*World Health Organization*), kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia.⁶⁵ Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), kesehatan

⁶⁵ World Health Organization (WHO), *Environmental Health*, Disitasi dari: <http://www.WHO>

lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia.⁶⁶ Sementara itu, Tri Cahyono, mendefinisikan kesehatan lingkungan adalah keseimbangan ekologis yang harus ada antara manusia dengan lingkungannya agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia.⁶⁷ Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa kenyamanan hidup manusia di bumi ini tergantung dengan seberapa baik hubungan manusia dengan lingkungannya.

1. Ruang lingkup kesehatan lingkungan

Menurut *World Health Organization* (WHO), ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan, yaitu:⁶⁸

- a. Penyediaan air minum.
- b. Pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran.
- c. Pembuangan sampah padat.
- d. Pengendalian vector.
- e. Pencegahan/pengendalian pencemaran tanah oleh excreta manusia
- f. Higienis makanan, termasuk higienis susu.
- g. Pengendalian pencemaran udara.
- h. Pengendalian radiasi.
- i. Kesehatan kerja.
- j. Pengendalian kebisingan.
- k. Perumahan dan pemukiman.
- l. Aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara.
- m. Perencanaan daerah dan perkotaan.
- n. Pencegahan kecelakaan.
- o. Rekreasi umum dan pariwisata.
- p. Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi/wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk.
- q. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan.

Berbeda dengan yang dijelaskan dijelaskan dalam pasal 22 ayat 3 UU No 23 tahun 1992, kesehatan lingkungan mencakup 8 butir:

- a. Penyehatan air dan udara.
- b. Pengamanan limbah padat/sampah.
- c. Pengamanan limbah cair.
- d. Pengamanan limbah gas.
- e. Pengamanan radiasi.
- f. Pengamanan kebisingan.
- g. Pengamanan vector penyakit.
- h. Penyehatan dan pengamanan lainnya, seperti keadaan pasca bencana.

⁶⁶<http://kesehatanlingkungan88.blogspot.com/2011/11/definisi-kesehatan-lingkungan-ilmu.html>

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

Adapun sasaran kesehatan lingkungan di Indonesia menurut Pasal 22 ayat 3 UU No 23 tahun 1992 meliputi:

- a. Tempat umum: hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis.
- b. Lingkungan pemukiman: rumah tinggal, asrama atau yang sejenis.
- c. Lingkungan kerja: perkantoran, kawasan industri atau yang sejenis.
- d. Angkutan umum: kendaraan darat, laut, dan udara.
- e. Lingkungan lainnya: misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana, pemindahan penduduk secara besar-besaran, reaktor atau tempat yang bersifat khusus.

C. Masalah kesehatan lingkungan dan penyebabnya

Kegiatan-kegiatan pembangunan pada berbagai sektor telah banyak mengakibatkan kerusakan alam yang serius, baik itu di darat, laut, maupun udara. Pada saat yang sama telah memporak-porandakan sistem-sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah yang kompleks, untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait. Di Indonesia yang notabene penduduknya mayoritas Islam, banyak sekali menghadapi permasalahan dalam kesehatan lingkungan. Padahal, sebagai muslim harus bisa menjaga kesehatan lingkungan, karena dengan jelas dalam al-Quran dan hadist memerintahkan umat selalu menjaga kesehatan lingkungan dan melestarikannya.

Permasalahan- permasalahan kesehatan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah:

a. Air bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Syarat-syarat kualitas air bersih di antaranya adalah sebagai berikut syarat fisik; tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Syarat kimia; kadar besi maksimum yang diperbolehkan 0.3 mg/l, dan syarat mikrobiologi; koliform (maks 0/100 ml air).

b. Pembuangan kotoran atau tinja

Pembuangan kotoran atau tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain, dan sebaiknya menggunakan jamban, yang mana jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang.

c. Kesehatan pemukiman

Pemukiman merupakan salah satu masalah yang dihadapi saat sekarang ini. Masih banyak pemukiman muslim yang jauh dari layak. Pemukiman dapat dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa kriteria, di antaranya: memiliki pencahayaan, penghawaan,

dan ruang gerak yang cukup. Memiliki pencegahan penularan penyakit antara penghuni rumah dengan pembuangan akhir. Memenuhi syarat pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah.

d. Pembuangan sampah

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan daur ulang sampah, sekarang merupakan hal yang banyak dibicarakan. Seiring produksi sampah setiap waktu selalu bertambah. Ketika permasalahan ini tidak ada solusinya, suatu saat sampah menjadi musuh besar manusia.

Dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan faktor-faktor berikut:

- 1) Penimbunan sampah, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivitas, pola kehidupan/tingkat sosial ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan kemajuan teknologi.
- 2) Penyimpanan sampah.
- 3) Pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan kembali.
- 4) Pengangkutan.
- 5) Pembuangan.

Dengan mengetahui unsur-unsur pengelolaan sampah, dapat mengetahui hubungan dan urgensinya masing-masing unsur tersebut, agar dapat memecahkan masalah-masalah persampahan secara efisien.

e. Serangga dan binatang pengganggu

Serangga sebagai reservoir (habitat dan *survival*) bibit penyakit yang kemudian disebut dengan vector misalnya: tikus dan serangga, yang bisa menyebabkan berbagai penyakit.

Penanggulangan dari penyakit yang ditimbulkan oleh vector di antaranya dengan merancang tempat pengelolaan makanan dengan *rat proof* (rapat tikus), kelambu yang dicelupkan dengan pestisida untuk mencegah gigitan nyamuk, gerakan 3 M (menguras, mengubur, dan menutup) tempat penampungan air untuk mencegah penyakit DBD, penggunaan kassa pada lubang angin di rumah atau dengan pestisida untuk mencegah penyakit kaki gajah, dan dengan usaha-usaha perbaikan sanitasi.

f. Makanan dan minuman

Sasaran higienis sanitasi makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga, dan jajanan (diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap saji untuk dijual bagi umum).

Pencemaran lingkungan di antaranya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat dibagi lagi menjadi *indoor air pollution* dan

outdoor air pollution. *Indoor air pollution* merupakan problem perumahan atau pemukiman serta gedung umum, bus, kereta api, dll. Masalah ini lebih berpotensi menjadi masalah kesehatan yang sesungguhnya, mengingat manusia cenderung berada di dalam ruangan ketimbang berada di jalanan.

Mengenai masalah *outdoor air pollution* atau pencemaran udara di luar rumah, berbagai analisis data menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan. Beberapa peneliti menunjukkan adanya perbedaan resiko dampak pencemaran, resiko untuk penduduk kota adalah lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Besar resiko tersebut adalah 12,5 kali lebih besar. Keadaan ini menjadi pencemar yang akumulatif, tentu akan menjadi buruk di masa yang akan datang.⁶⁹

Menurut Ignas Kleden, sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Arifin, penyebab masalah lingkungan di atas adalah usaha berfikir manusia bukan untuk membuktikan ada orang lain (*the other being*), tetapi terutama untuk membuktikan ada sang ego.⁷⁰

Dengan demikian berfikir selalu dihubungkan dengan kepentingan ego dan kepentingan hal-hal lain yang ditentukan ego tersebut. Dengan berkembangnya sifat seperti ini manusia tidak mengenal lagi kata-kata *why*, tetapi cukup menumpuk perhatian pada masalah *how*, masalah teknis, tentang bagaimana, yang akibatnya memang sangat luar biasa. Misalnya, bagaimana bom nuklir diciptakan dan tidak bertanya mengapa ia diciptakan.

Pendapat Ignas ini sudah disampaikan empat belas abad yang lalu, dalam surat ar-Rum: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ



“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

D. Islam dan Lingkungan

Umat Islam sebagai penghuni bumi ini mempunyai tanggung jawab besar terhadap kelangsungan dan kestabilan alam ini. Sebagai mana firman Allah:

هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها.....إلخ (هود 61)

⁶⁹ <http://www.scribd.com/doc/19374542/Definisi-Kesehatan-Lingkungan> 30 10 12

⁷⁰ Nanih Nachendrawaty dan Agus Ahmad Syafei, *Pengembangan...*, hlm. 237

“Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah), dan menjadikanmu pemakmurnya (memakmurkan dunia)”.

Dalam potongan surat lain, Allah mengatakan bahwasanya manusia adalah khalifah penerima mandat untuk melestarikan lingkungan:

.....إني جاعل في الأرض خليفة (البقرة 30)

“.....Aku hendak menjadikan khallifah (pengganti, pemimpin atau penguasa) di bumi”. (Al-Baqarah 30).

Islam mengajarkan proses keseimbangan, termasuk dalam memanfaatkan alam dan lingkungan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi ini juga dijadikan untuk kepentingan manusia. Manusia diperintahkan untuk memanfaatkan seisi alam dan pada saat yang bersamaan juga harus menjaga dan mampu melindungi kelestarian alam. Karena itulah sesungguhnya upaya perbaikan dari perbuatan yang telah merusak perlu dilakukan dan selanjutnya perlu dipelihara atau dilestarikan.

Melestarikan dan menjaga lingkungan merupakan *shadaqah jariyah*, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Saw:

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فبأكل منه طيراً أو إنساناً أو بهيمة الأنعام ألا كان له صدقة (متفق عليه)

“Barang siapa dari umat Islam menanam tanaman, kemudian burung atau manusia memakan dari tanaman yang ditanamnya itu, berarti dia telah bersedekah” (Bukhari dan Muslim).

Kerusakan lingkungan berlangsung dengan cepat, sudah berada pada tingkat yang mencemaskan, dan mengancam kelangsungan kehidupan. Kerusakan lingkungan yang berefek negatif kepada makhluk hidup, disebabkan oleh tangan manusia. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan perilaku (*behavior*) manusia terhadap lingkungan, adanya kontrol dari dalam (*faith and nature*).

Menciptakan sebuah tata masyarakat yang mulia, adil, beribawa, dan bertahan di muka bumi adalah tujuan Islam. Islam adalah agama *rahmatan lil`aalam*, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kecerdasan, kehidupan yang damai, lingkungan yang bersih semuanya adalah rahmat. Dengan ini Islam merupakan sumber motivasi dalam berbagai aspek kehidupan agar manusia selalu meningkatkan kualitas kehidupannya.

Umat Islam sebagai *khalifah* di muka bumi ini harus mampu memainkan peran yang lebih signifikan dalam pemberdayaan lingkungan berkelanjutan (*sustainable development*).⁷¹ Kegiatan-kegiatan muslim yang berhubungan dengan lingkungan sebaiknya meliputi serangkaian kegiatan yang diawali dengan membangun kesadaran kritis masyarakat, pengorganisasian masyarakat hingga perencanaan partisipatif untuk penyusunan rencana tindakan penjagaan lingkungan.⁷²

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan ekologi ?
2. Jelaskan maksud dari pengembangan masyarakat dalam perspektif ekologi ?
3. Jelaskan kritisi dari kelompok Green terhadap eksploitasi lingkungan yang berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan !
4. Pengembangan masyarakat perlu memperhatikan kesehatan lingkungan, coba Anda jelaskan kriteria lingkungan sehat !
5. Jelaskan pandangan Islam terhadap lingkungan !

⁷¹ *Sustainable Development* (pemberdayaan berkelanjutan) adalah: kemajuan/perubahan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

⁷² <http://www.scribd.com/doc/19374542/Definisi-Kesehatan-Lingkungan> 30 10 12

BAB XIII

MODEL PENGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

A. Model Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Abu Huraerah⁷³ mengutip pendapat Jack Rothman menyebutkan bahwa dalam sebuah tulisan yang berjudul *Approaches to Community Intervention*, Jack Rothman mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsep pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Paradigma ini merupakan format ideal yang dikembangkan terutama untuk tujuan analisis dan konseptualisasi. Dalam praktiknya ketiga model tersebut saling bersentuhan satu sama lainnya. Setiap komponennya bisa digunakan secara kombinasi dan simultan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada.

1. Pengembangan Masyarakat Lokal

Model pengembangan masyarakat lokal memberikan perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal apabila melibatkan partisipasi aktif yang luas di semua spektrum masyarakat tingkat lokal baik dalam tahap penentuan perubahan. Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang dirancang untuk mendapatkan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri. Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan persoalan ini adalah usaha penciptaan dan pengembangan partisipasi yang lebih luas dari seluruh warga masyarakat.

Tema-tema pokok dalam model pengembangan masyarakat lokal mencakup penggunaan prosedur demokrasi dan kerjasama atas dasar kesukarelaan, keswadayaan, pengembangan, kepemimpinan setempat dan tujuan yang bersifat pendidikan. Misalnya, program ketetangaan di lingkungan pemukiman, program pendidikan orang dewasa dan aktivitas yang berkaitan dengan dinamika kelompok secara profesional. Dalam model pengembangan masyarakat lokal, anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

⁷³ Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 148

Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada tujuan proses daripada tujuan tugas atau tujuan hasil. Setiap anggota masyarakat bertanggungjawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat lokal ini.

2. Perencanaan Sosial

Model ini menekankan proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substantif seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi dan busung lapar), kesehatan mental, pemukiman kumuh, penyalahgunaan narkoba, pelacuran dan masalah sosial lainnya.

Model perencanaan sosial mengungkap pentingnya menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara sadar dan rasional, dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah mengumpulkan atau mengungkapkan fakta dan data mengenai sesuatu permasalahan. Kemudian, mengambil tindakan yang rasional dan mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilaksanakan. Implementasi model perencanaan sosial ini bisa berupa program-program yang disebutkan sebelumnya. Adapun teknik yang digunakan adalah mengerahkan tenaga ahli dalam perencanaan pengumpulan data serta analisis data dalam menyusun gagasan atau program dan menciptakan kesepakatan (konsesus).

Berbeda dengan model pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial berorientasi pada tujuan tugas. Sistem klien pengembangan masyarakat lokal umumnya kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rawan sosial ekonomi, seperti para lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu, wanita tuna susila. Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang mereka sebagai konsumen atau penerima layanan. Keterlibatan para penerima pelayanan dalam proses prioritas karena pengambilan keputusan dilakukan oleh para pekerja sosial di lembaga-lembaga formal semisal lembaga kesejahteraan sosial, peradilan, pembangunan desa, kesehatan, kependudukan. Para perencana sosial dipandang sebagai ahli dalam melakukan penelitian, menganalisis

masalah dan kebutuhan masyarakat serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program pelayanan kemanusiaan.

3. Aksi Sosial

Model aksi sosial ini menekankan betapa pentingnya penanganan secara terorganisasi, terarah dan sistematis terhadap kelompok yang tidak beruntung. Aksi sosial juga berupaya meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial dan nilai-nilai demokratisasi.

Adapun langkah yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu adalah menggerakkan golongan-golongan masyarakat tertentu guna terlibat aktif dalam mengadakan perubahan-perubahan. Mereka dimotivasi untuk bersikap kritis dan akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah seperti melalui perundang-undangan atau peraturan-peraturan pemerintah.

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengubah sistem atau kebijakan pemerintah secara langsung dalam rangka menanggulangi masalah yang mereka hadapi sendiri. Dalam kaitan ini, Edi Suharto seperti dikutip Abu Huraerah menjelaskan menjelaskan tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan pada struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*). Masyarakat sebagai sistem klien dipandang sebagai korban ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisasi melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokratis, pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).

B. Bias Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Pelaksanaan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebaiknya disadari oleh masalah dan kebutuhan sesuai dengan karakteristik geografi, idiografi, potensi, teknologi, dan sumber daya lokal serta pelibatan aktif masyarakat secara integral. Namun dalam realitasnya pengorganisasian dan pengembangan masyarakat seringkali terjebak oleh bias, miskonsepsi, atau kesalahan pemikiran (*intellectual fallacy*). Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat perlu menghindari bias ini. Robert Chambers dalam Edi

Suharto dikutip Abu Huraerah mengemukakan lima bias yang sering terjadi dalam pelaksanaan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, terutama di pedesaan yakni *spatial bias*, *project bias*, *person bias*, *dry season bias*, dan *professional bias*. Kemudian ditambahkan oleh Edi Suharto, tiga bias lagi dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, yaitu *physical bias*, *financial bias*, dan *indicator bias*.

1. Spatial bias

Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat seringkali dilaksanakan di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau sarana transportasi, seperti di daerah pinggiran kota, pinggiran jalan raya, atau lokasi-lokasi yang dekat dengan kantor pemerintahan. Padahal kebanyakan masyarakat miskin yang perlu dibangun tinggal di daerah-daerah terpencil.

2. Project bias

Kebanyakan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat dilakukan pada masyarakat yang telah pernah menerima proyek sebelumnya karena dipandang telah mampu dan berhasil dalam menjalankan proyek. Masyarakat ini dipandang sebagai masyarakat percontohan yang senantiasa diusulkan sebagai kelompok sasaran (*target group*) setiap kali proyek dilaksanakan.

3. Person bias

Kelompok elit dalam masyarakat, tokoh masyarakat, kaum lelaki, para penerima dan pengguna inovasi, serta orang-orang yang aktif dalam pembangunan adalah mereka yang kerap menerima program dan berkah pembangunan. Sementara kelompok masyarakat kelas bawah yang kurang memiliki akses terhadap jaringan sumber-sumber (*resources network*) yang ada, kerap terpinggir atau bahkan dipinggirkan oleh pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.

4. Dry season bias

Kesulitan dan masalah yang dihadapi masyarakat umumnya mencapai pada puncaknya pada saat musim hujan. Kegagalan panen, banjir, kelaparan, masalah kesehatan diri, dan terjadi pada musim sulit. Sementara sebagian besar pengorganisasian dan pengembangan masyarakat dilaksanakan pada musim panas, musim yang mana masalah masyarakat tidak mencapai titik kritis. Bias ini juga dipengaruhi oleh motivasi para *development tourism* yang menginginkan kemudahan dalam mengunjungi proyek dengan mobil mewah yang tidak boleh kena lumpur.

5. Professional bias

Bias ini timbul terutama diakibatkan oleh konsepsi yang memandang bahwa kelompok masyarakat yang kurang beruntung sebagai kelompok rendah, memiliki pengetahuan rendah, pasif, malas, fatalis, tidak memiliki jiwa wirausaha, serta ciri-ciri lain dalam budaya kemiskinan (*culture of poverty*). Sementara itu, para ahli teknokrat para penguasa (birokrate) dan para pengusaha (konglomerat) adalah raja yang memegang hegemoni dan kendali pembangunan. Karenanya, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat hanya dirumuskan oleh mereka tanpa memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah *transfer of technology* (ToT) bukan *community first and community last* (CFCL).

6. Physical bias

Umumnya masyarakat bahkan para profesional hanya mengenal dan mengakui program atau proyek yang bersifat fisik seperti pembangunan jembatan, dan lain-lain. Tidak mengherankan apabila proyek fisik menempati prioritas dalam berbagai kegiatan pembangunan. Proyek fisik seringkali dipandang sebagai proses, tujuan dan hasil sekaligus. Keberhasilan proyek hanya dilihat dari beberapa sarana fisik didirikan.

7. Financial bias

Besarnya biaya dan anggaran yang dikeluarkan oleh suatu departemen misalnya kerap kali dipandang sebagai bukti keberhasilan program. *Financial bias* ini disebabkan oleh kesalahan pemikiran yang membaurkan prinsip efisiensi *vis a vis* prinsip efektivitas sebagai tolok ukur keberhasilan proyek.

8. Indicator bias

Bias ini terutama berkaitan dengan aspek *unaccountability* pada program yang berorientasi sosial. Dampak keberhasilan program sulit diukur secara langsung dan kuantitatif serta banyaknya eksternal variabel yang terkontaminasi ke dalam *mainstream* proyek. Dengan demikian, ada atau tidak adanya dampak program secara *real* tetapi karena kekurangsempurnaan indikator dirumuskan.

Mencermati beberapa bias pengorganisasian dan pengembangan masyarakat tersebut semestinya semakin disadari akan pentingnya prinsip keadilan dan pemerataan. Pembangunan hendaknya bisa dilaksanakan secara adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum banyak tersentuh proyek pembangunan atau kelompok masyarakat yang tidak beruntung (*disadvantaged group*)

lainnya. Dalam kaitan ini, Mubiyarto dikutip Abu Huraerah⁷⁴ mengatakan tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berarti kemakmuran rata-rata yang telah meningkat harus terbagi secara adil. Kemakmuran rata-rata meningkat harus menjadi kemakmuran yang merata artinya terbagi secara adil untuk semua lapisan masyarakat di segala pelosok tanah air.

Atas dasar itulah, para pengambil kebijakan, para perencana dan para pelaksana pembangunan sejatinya memiliki idealism dan komitmen yang kuat untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang (bias) yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan. Kita tidak boleh membiarkan mereka menjadi kelompok termarjinalkan, tertinggal, atau tercecer dalam proses pembangunan.

C. Pengembangan Masyarakat Berbasis Komunitas

1. Kebutuhan Akan Komunitas

Gagasan komunitas tetap memiliki kekuatan walau terdapat banyak persoalan dalam kaitannya dengan pengembangan masyarakat. Pada tahun 1990, pemerintah Negara bagian Australia Barat menunjuk komisi keluarga dan komunitas yang independen untuk melaksanakan penyelidikan yang luas mengenai bagaimana warga Australia Barat memandang masyarakat mereka, apa menurut mereka yang hilang, dan apa yang ingin mereka lihat pada masa depan. Temuan dari penyelidikan itu adalah mencakup strategi kondultasi publik yang luas bahwa mereka sangat merasakan kehilangan komunitas atau hilangnya identitas dalam masyarakat modern dan komitmen untuk membangun kembali struktur komunitas adalah salah satu prioritas di masa depan.

Walaupun kata komunitas memiliki problematis, kekuatan gagasannya adalah penting sebagai dasar untuk pengorganisasian dan pengembangan masyarakat struktur-struktur sosial dan ekonomi alternatif. Komunitas berperan sebagai sebuah visi yang kuat bagi masyarakat untuk bertindak dan membangun kembali masyarakat yang kuat. Pada tahun 1994, pada puncak kebijakan privatisasi pemerintah negara bagian Victoria sebuah proyek berjudul People Together Project dibentuk oleh kelompok-kelompok masyarakat di Victoria. Pada mulanya proyek tersebut mendorong debat publik sehingga meningkatkan kesadaran warga tentang hilangnya infrastruktur komunitas dan rasa kerja sama yang diakibatkan oleh praktik pelelangan kompetitif di bawah kebijakan neoliberal. Di tengah pelucuran yang masif oleh pemerintah, proyek tersebut memfasilitasi banyak inisiatif masyarakat di seluruh Victoria, yang mewakili masyarakat lokal yang melakukan

⁷⁴ Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 154

pengelompokan kembali dan pembentukan kembali diri mereka sebagai komunitas, dan telah berhasil menentang erosi keadilan sosial dan HAM, peningkatan penyingkiran dan ketidaksetaraan yang muncul dari *new right*, suatu paham yang mengembalikan struktur terkecil masyarakat, misal negara miskin, tidak ada negara miskin yang miskin itu individu-individu yang menghuni negara maka untuk program kesejahteraan dikembalikan kepada individu-individu.

Komunitas bersifat konsisten dengan model-model pemberdayaan untuk perubahan, karena komunitas memberikan menyediakan suatu kerangka bagi masyarakat untuk mengambil keputusan yang efektif, dan konsisten dengan perspektif hak asasi manusia karena hak dan kewajiban diterapkan dengan orang lain dalam kehidupan keseharian dan pada tingkat komunitas, komunitas juga konsisten dengan perspektif berbasis kebutuhan karena komunitas memungkinkan orang menjadi lebih mudah mendefinisikan dan menyuarakan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi yang dirasakan. Komunitas melibatkan interaksi-interaksi pada suatu skala yang mudah dikendalikan dan digunakan oleh individu-individu. Komunitas berskala terbatas pada orang-orang yang saling berkenalan.

2. Aksi Komunitas

Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu ada saja kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah atau konsesus-konsesus yang dibuat di tingkat masyarakat bawah. Pada tingkat lokal, mereka tidak sependapat dengan pekerja pemberdaya yang menjadi penggerak perubahan. Kelompok ini merasa konsesus yang dibuat tidak adil dan melanggar hak-hak kelompoknya. Konflik seperti ini sudah lumrah terjadi di dalam kegiatan yang memelopori perubahan. Golongan-golongan ini tidak menginginkan perubahan karena akan merusak sistem yang ada selama ini, sebuah sistem yang menguntungkan kelompoknya dan menindas masyarakat lemah. Atau mungkin struktur sosial yang tidak sesuai dengan kepentingan sekelompok orang.

Pekerja pendamping masyarakat sudah mengetahui resiko ini, bahwa untuk melakukan sebuah perubahan pasti ada kelompok-kelompok yang tidak suka, yang pada akhirnya menjadi kelompok perintang perubahan. Mereka ini disebut juga kelompok konflik. Mau tidak mau, seorang pendamping sosial harus berkomitmen untuk melakukan perubahan demi membantu masyarakat yang menjadi korban dari sebuah sistem sosial yang menindas kaum lemah. Akan tetapi, banyak juga pekerja sosial tidak menyadari tujuannya yang utama adalah perubahan demi kepentingan masyarakat lemah. Ada juga pekerja sosial terlena dengan konflik yang ada dan berhasrat untuk memenangkan konflik

tersebut. Akibatnya, fokus utama pekerja sosial adalah memenangkan konflik, sementara tujuan awal untuk perubahan sistem sosial demi kepentingan masyarakat lemah menjadi dinomorduakan.

Di sisi lain, pendamping masyarakat yang bijak adalah bagaimana ia memainkan konflik yang ada, sehingga kelompok potensi berkonflik tidak dapat berkuat, perubahan tetap jalan, kepentingan masyarakat lemah terpenuhi. Kiat seperti ini dikenal dengan aksi komunitas dalam ilmu kesejahteraan sosial. Menurut Glen dalam Isbandi Rukminto Adi,⁷⁵ aksi komunitas melibatkan masyarakat untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada para pembuat kebijakan dan menunjukan apa yang menjadi minat dan kepentingan mereka serta mereka mengharapkan agar para pembuat kebijakan mau menanggapi tuntutan mereka.

Ada beberapa ciri aksi komunitas menurut Glen, yaitu :

- a. Aksi komunitas bertujuan menggalang kekuatan pada isu-isu konkrit
- b. Melakukan pendekatan yang menggunakan strategi dan teknik yang bersifat konflik.
- c. Pekerjaan sosial (*Sosial worker*) dari gerakan ini biasanya seorang aktivis profesional.

Ada tiga bentuk aksi komunitas

- a. Para aktivis mencampuri dengan paksa usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok sasaran sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas regulernya.
- b. Pelaku perubahan dan kelompoknya secara fisik membatasi kebebasan kelompok sasaran atau menyandera mereka.
- c. Dalam situasi yang sangat menekan para aktivis tidak jarang mengecam dan menyakiti kelompok sasaran.

Aksi komunitas seperti poin a di atas, menurut Zander (1990) dikutip Isbandi Rukminto Adi⁷⁶ dapat dilakukan dengan aksi pemblokiran (*blocking manouvres*) menyebutkan ada lima bentuk pemblokiran, yaitu :

- a. Aksi mogok, baik aksi mogok duduk, mogok makan dan mogok minum
- b. Pemblokiran dengan menciptakan hambatan atau halangan terhadap usaha yang dilakukan kelompok sasaran.
- c. Pemblokiran dengan melakukan intervensi langsung pihak-pihak yang mereka inginkan untuk berubah
- d. Pemblokiran dengan melakukan aksi baikot dengan tidak membeli barang-barang dan tidak memakai jasa-jasa dari orang-orang di luar kelompok yang dijadikan sasaran penerima manfaat layanan.
- e. Pemblokiran dengan melakukan aksi demonstrasi yang bersifat merusak

⁷⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas...*, hlm. 153

⁷⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas...*, hlm. 156-159

Bentuk-bentuk aksi komunitas yang pernah dilancarkan oleh penggerak perubahan adalah:

- a. Pembaikotan. Dalam kegiatan pembaikotan para partisipan perubahan didorong untuk tidak menggunakan produk ataupun jasa yang dikeluarkan oleh kelompok sasaran.
- b. Grafiti, merupakan aksi coret-coret pada tempat tertentu guna menarik perhatian massa. Grafiti yang baik dan dapat menarik minat masyarakat adalah grafiti yang bersifat sederhana dan kocak dalam menyerang hal yang mereka protes serta ditempatkan di tempat yang mudah dilihat masyarakat.
- c. Pengalihan, maksudnya melakukan aksi-aksi yang tidak secara frontal melawan sebuah sistem yang merugikan itu, melainkan dengan perlahan mengupayakan cara-cara yang elegan, terkesan resmi. Misalkan ada perusahaan yang sewenang-wenang terhadap masyarakat lemah, maka bagi pekerja sosial yang mapan akan berupaya memperbanyak sahamnya dalam perusahaan tersebut.
- d. Teater jalanan, dengan teater jalanan yang menarik dan simpatik biasanya lebih dapat menarik emosi masyarakat dibandingkan dengan teater jalanan yang lebih menonjolkan pada aspek kekasaran dan ketidakpuasan terhadap suatu struktur tertentu.
- e. Blokade dan memacetkan jalan
- f. Pengambilalihan dan kependudukan dilakukan dengan meyakinkan pihak berkompeten dapat menjadi tindakan yang bermakna kalau pelaku perubahan dapat mengambilalih fasilitas yang tidak digunakan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif.
- g. Pemanfaatan bangunan kosong, bangunan yang ditelantarkan, dan diambilalih untuk dimanfaatkan bagi kegiatan masyarakat
- h. Prosesi dan protes keliling merupakan upaya warga untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap suatu isu tertentu.
- i. Barisan penghalang merupakan bagian dari baikot dengan membentuk barisan yang menghalangi orang untuk mengakses produk atau layanan dari kelompok sasaran.
- j. Pertemuan terbuka merupakan taktik yang digunakan untuk menyampaikan informasi, menarik simpati masyarakat dan memantapkan identitas mereka sebagai suatu kelompok.
- k. Aksi mogok duduk

- l. Aksi simbolis dapat berupa pengembalian atau penolakan suatu penghargaan sebagai pernyataan protes terhadap tindakan organisasi penyanggah dana.

Menurut Zander, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggerakkan aksi komunitas.⁷⁷

- a. Individu-individu membentuk kelompok aktivis bila mereka meyakini situasi tertentu, kondisi yang tidak menyenangkan di masyarakat, haruslah diubah dan mereka secara sendiri-sendiri tidak mampu untuk melakukan perubahan tersebut.
- b. Metode yang dipilih oleh warga untuk melakukan aksi komunitas akan menentukan tingkat formalitas properti kelompok yang mereka bentuk.
- c. Anggota-anggota kelompok yang ingin mengubah keadaan daerahnya mungkin didasari atas empat macam motivasi. Yaitu, orientasi pada kepentingan pribadi, keinginan untuk mencapai keberhasilan kelompok, keinginan untuk menyenangkan orang lain, dan keinginan untuk membantu masyarakat.
- d. Keinginan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok ditentukan oleh kuat lemahnya motivasi mereka untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.
- e. Ketua kelompok meningkatkan kesiapan anggota untuk melakukan kegiatan melalui penguatan motivasi.
- f. Keefektifan upaya-upaya yang dilakukan oleh aktivis untuk memengaruhi pihak yang dituju akan melemah jika upaya tersebut memunculkan tentangan ataupun kendala di antara penerima pesan.
- g. Aktivis menyeleksi metode yang digunakan berdasarkan pertimbangan bagaimana kekuatan metode dalam memengaruhi, bagaimana metode itu dapat mengadabtasi nilai dan bentuk kepuasan seperti apa yang muncul dari pelaksanaan metode itu.
- h. Pelaku perubahan menggunakan metode permisif jika mereka ingin kelompok sasaran tidak kehilangan harga dirinya ketika mereka terpaksa harus melakukan perubahan.
- i. Jika para pembaru menentukan secara tegas perubahan apa yang mereka inginkan dalam situasi tertentu serta tidak mau menerima alternatif lain, mereka akan menggunakan metode yang menghambat atau menekan (*constraining or pressuring method*).
- j. Jika ingin berhasil, pelaku perubahan harus mampu menampilkan sisi positif rencana aksi mereka untuk melawan keyakinan yang telah relatif menetap pada diri kelompok sasaran.

⁷⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas...*, hlm. 171-185

- k. Ketika kelompok sasaran ditekan untuk mendukung atau melakukan perubahan, mereka cenderung untuk tidak menolak perubahan bila mereka meyakini bahwa pelaku perubahan memang ingin memecahkan persoalan yang ada secara konstruktif.
- l. Para aktivis kadangkala memunculkan sikap melawan kelompok sasaran bila mereka ingin membatasi kebebasan mengambil keputusan ataupun kadangkala memunculkan sikap mendua untuk memenangkan pertempuran yang dihadapinya.
- m. Ketika kelompok sasaran tetap bertahan pada pendiriannya, tindakan tersebut dapat memunculkan sikap bertahan pula pada pelaku perubahan, sehingga setiap kelompok dapat saling memusuhi.
- n. Pelaku perubahan pada intinya akan mendapatkan kepuasan bila inovasi ataupun usulan yang mereka ajukan dapat dilaksanakan dan bermanfaat.
- o. Ketika pelaku perubahan tidak mau menerima perkataan tidak sebagai suatu jawaban, kelompok sasaran sering meniadakan keefektivan organisasi dari lawan mereka tersebut.

3. Tahapan Intervensi

Adapun tahapan intervensi komunitas:⁷⁸

a. Fase persiapan

Community worker sekurang-kurangnya harus mengetahui gambaran umum komunitas, adat kebiasaan, kondisi sosial demografisnya, dan yang lebih penting isu-isu yang akan mereka tangani bersama.

b. Fase pengembangan kontak dengan komunitas

Pada fase ini, *community worker* dapat mengkaji apakah hubungan mereka dengan komunitas sasaran dapat mengarah kepada relasi yang konstruktif ataupun sebaliknya. Pada fase ini, Twelvetreets (1982) dikutip Isbandi Rukminto Adi ⁷⁹ menyebutkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pekerja sosial, yaitu: jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan ataupun memperbaharui kontak dengan pihak-pihak tertentu, pertimbangkan hal yang pertama dan utama dalam kaitan dengan pengembangan relasi dengan komunitas sasaran, belajarlah untuk mendengar dan memperhatikan, bila anda ingin mendapatkan sesuatu maka anda juga harus memberikan sesuatu dan jangan terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh warga masyarakat.

⁷⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas...*, hlm. 186-199

⁷⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas...*, hlm. 187

c. Fase pengumpulan data dan informasi

Pada fase ini, menunjukkan bahwa aktivis atau pekerja sosial tidak bisa hanya menyandarkan diri pada data kuantitatif saja, justru data kualitatiflah yang diperlukan untuk mendapatkan makna ataupun jiwa dari suatu fenomena yang ditemui di masyarakat.

d. Fase perencanaan dan analisis

Aktivis dan partisipan menggunakan kelompok kerja sebagai kelompok utama dalam menganalisis dan mengkaji pokok permasalahan yang akan ataupun sedang mereka bahas. Berbagai tindakan alternatif yang mereka pilih dalam mencapai kesepakatan bersama.

e. Fase pelaksanaan

Pelaksanaan aksi komunitas sebagian besar merupakan aksi yang langsung dan berkonfrontasi dengan pihak yang mereka identifikasikan sebagai lawan mereka. Berbagai pendekatan bisa ditempuh dalam hal ini, ada pendekatan konsensus atau kesepakatan, dan pendekatan konflik.

f. Fase negosiasi

Negosiasi dilakukan antara wakil-wakil dari komunitas yang melakukan tuntutan dan wakil dari pihak yang dituntut guna mendapatkan hasil yang optimal bagi kedua belah pihak. Ada beberapa tipe dari pelaku negosiasi (negosiator), yaitu negosiator tipe lunak lebih menekankan kepada pentingnya mempertahankan dan memelihara hubungan yang telah terbina selama ini. Sebagai konsekuensinya negosiator yang menggunakan pendekatan ini cenderung lebih bersifat mengalah dan menghindari berbagai bentuk konflik yang dapat mengancam keretakan relasi antara kedua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Negosiator tipe keras lebih menekankan pada kemenangan dalam bernegosiasi sehingga mereka selalu berusaha bersikap keras terhadap lawan negosiasinya. Ada satu tipe lagi, yang dijadikan sebagai tipe pendekatan alternatif, yaitu negosiator dalam bernegosiasi mencoba memisahkan antara orang yang bernegosiasi dengan masalah yang sedang dinegosiasikan.

4. Aset Komunitas

Melakukan pengembangan masyarakat selain dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat harus juga dikaitkan dengan potensi masyarakat. Komunitas di tingkat lokal dalam perjalanan waktu telah mengembangkan suatu aset yang menjadi sumber daya

ataupun potensi bagi komunitas tersebut guna menghadapi perubahan yang terjadi. Green dan Haines dalam bukunya *Asset Building and Community Development* dikutip Isbandi Rukminto Adi⁸⁰ menyoroti lima aset dalam komunitas terkait dengan pengembangan masyarakat. Akan tetapi dalam tulisan ini, dari berbagai aset yang dimiliki oleh masyarakat, akan disoroti enam aset yang diasumsikan terkait dengan upaya pengembangan masyarakat. Keenam aset tersebut dikenal dengan modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, modal teknologi, modal manusia dan modal sosial.

- a. Modal fisik : modal fisik terdiri dari dua kelompok utama yaitu bangunan dan infrastruktur.
- b. Modal finansial : modal finansial adalah dukungan keuangan yang dimiliki suatu komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan dalam komunitas tersebut.
- c. Modal lingkungan : modal lingkungan dapat juga berupa potensi yang belum diolah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta memiliki nilai yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup.
- d. Modal teknologi : modal teknologi ini terkait dengan persediaan teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk masyarakat dan bukan sekedar teknologi digital yang canggih tetapi belum tentu bermanfaat bagi masyarakat sasaran.
- e. Modal manusia : modal manusia berbicara mengenai sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menguasai teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat baik itu teknologi yang sederhana maupun teknologi yang canggih.
- f. Modal sosial : modal sosial ini berupa norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan (trust) dan jaringan (networking) antar warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat.
- g. Modal spiritual : modal spiritual memunculkan tujuan hidup dan dorongan untuk bergrak membantu sesama, yang akhirnya akan memberikan makna yang lebih baik terhadap kehidupan itu sendiri. Fungsi dari modal spiritual ini adalah meningkatkan etos kerja dan memberikan semangat/dorongan yang positif dalam melakukan pengembangan, memberikan jiwa (makna) dalam upaya pemberian bantuan, memberikan arah dalam pembangunan, dan menjadi pelindung (guardian) terhadap penyimpangan.

⁸⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas...*, hlm. 285

5. Intervensi komunitas

Terkait dengan intervensi komunitas ini, relatif baru bagi akademisi Indonesia, apalagi bagi akademisi yang bukan bidang keilmuan kesejahteraan sosial. Ada beberapa istilah yang digunakan oleh pakar keilmuan ini:

- a. *Community work*, istilah yang menunjukkan praktik pengorganisasian dan pengembangan masyarakat yang banyak digunakan di Inggris dan Australia, seperti yang digunakan oleh Thorpe (1985), Mayo (1994), Popple (1995), dan Jones (1997).
- b. *Community organization*, terminologi ini digunakan oleh Rothman, Tropman dan Erlich sejak tahun 1960-an hingga 1987-an dan banyak digunakan di Amerika Serikat, sedangkan pada edisi kelima buku Rothman (1995) telah merubah nama dari intervensi ini dari *community organization* menjadi *community intervention*.
- c. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, yang dikenal sejak tahun 1970-an sampai 1990-an. Istilah intervensi komunitas relatif masih merupakan istilah baru di Indonesia, yang dikenal sejak tahun 2000-an untuk merespon perubahan yang dikemukakan oleh Rothman.
- d. *Community practice* yang dikemukakan oleh Glen (1993) untuk menggambarkan model intervensi yang serupa seperti yang dikemukakan oleh Rothman dalam intervensi komunitas.

Intervensi Komunitas seperti dikemukakan oleh George Bernard Shaw dikutip Isbandi Rukminto adi⁸¹ adalah *people are always blaming their circumstances for what they are. I don't believe in circumstance. The people who get on in this world are the people who get up and look for the circumstances they want and if they can't find them, make them.*

Menurut The Gulbenkian Foundation dalam Mayo seperti dikutip Isbandi Rukminto Adi, menyebutkan bahwa ada tiga tingkatan intervensi komunitas sesuai tingkatan komunitas.

- a. *Grass root* ataupun *neighbourhood work* : pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut, misalnya dalam suatu kelurahan ataupun rukun tetangga.
- b. *Local agency* dan *inter agency* : pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap organisasi payung di tingkat lokal, provinsi ataupun pada tingkat yang lebih luas bersama jajaran pemerintah yang terkait serta organisasi non pemerintah yang berminat terhadap hal itu.

⁸¹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas...*, hlm. 115

- c. *Regional dan national community planning work* : pelaku perubahan melakukan intervensi pada isu yang terkait dengan pembangunan ekonomi ataupun isu mengenai perencanaan lingkungan yang mempunyai cakupan lebih luas dari bahasan di tingkat lokal.

Kennet Wilkinson dalam Green and Haines seperti dikutip Isbandi Rukminto Adi⁸² mengemukakan tiga unsur dalam komunitas:

- Adanya batasan wilayah atau tempat.
- Merupakan suatu organisasi sosial yang menyediakan kesempatan untuk para warganya agar dapat melakukan interaksi antar warga secara reguler.
- Interaksi sosial yang dilakukan karena adanya minat ataupun kepentingan yang sama.

Selain batasan komunitas yang dikemukakan di atas, komunitas dapat juga mengacu kepada komunitas fungsional yaitu komunitas yang disatukan oleh bidang pekerjaan mereka bukan pada sekedar lokal saja. Intervensi komunitas yang dikemukakan Rothman memiliki 12 indikator, yaitu: (1) kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat, (2) asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahannya, (3) strategi dasar dalam melakukan perubahan, (4) karakteristik taktik dan teknik perubahan, (5) peran praktisi yang menonjol, (6) media perubahan, (7) orientasi terhadap struktur kekuasaan, (8) batasan definisi penerima layanan, (9) asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok di dalam suatu komunitas, (10) konsepsi mengenai penerima layanan, (11) konsepsi mengenai peran penerima layanan, dan (12) pemanfaatan pemberdayaan.

Tabel 7.1
Perbedaan Tiga Model Intervensi Komunitas Menurut Rothman

INDIKATOR	PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL
Tujuan	Kemandirian: pengembangan kapasitas dan pengintegrasian masyarakat. Tujuan yang dititikberatkan pada proses (<i>process goals</i>) dalam upaya memecahkan masalah mereka berdasarkan kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.
Asumsi struktur komunitas dan kondisi permasalahannya	Adanya anomie dan kemurungan dalam masyarakat, kesenjangan relasi dan kapasitas dalam memecahkan masalah secara demokratis, komunitas berbentuk tradisional statis.
Strategi dasar dalam melakukan perubahan	Pelibatan berbagai kelompok warga dalam menentukan dan memecahkan masalah mereka sendiri.
Karakteristik taktik dan teknik	Konsensus; komunikasi antar kelompok dan kelompok kepentingan

⁸² Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas...*, hlm. 117

perubahan	dalam masyarakat dan adanya diskusi kelompok.
Peran praktisi yang menonjol	Sebagai enabler katalis, koordinator, orang yang mengajarkan keterampilan memecahkan masalah dan nilai-nilai etis.
Media perubahan	Memanipulasi kelompok kecil yang berorientasi pada terselesaikannya suatu tugas (<i>small task oriented group</i>).
Orientasi terhadap struktur kekuasaan	Anggota dari struktur kekuasaan bertindak sebagai kolaborator dalam suatu ventura yang bersifat umum.
Batasan definisi penerima layanan	Keseluruhan komunitas geografis.
Asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok di dalam suatu komunitas	Kepentingan umum atau kemufakatan dari berbagai perbedaan.
Konsepsi mengenai penerima layanan	Warga masyarakat.
Konsepsi mengenai peran penerima layanan, dan	Partisipasi pada proses interaksional pemecahan masalah.
Pemanfaatan pemberdayaan	Mengembangkan kapasitas komunitas untuk mengambil keputusan bersama, serta membangkitkan rasa percaya diri akan kemampuan masing-masing anggota masyarakat.
INDIKATOR	PERENCANAAN SOSIAL
Tujuan	Pemecahan masalah dengan memperhatikan masalah yang penting yang ada pada masyarakat, tujuan dititikberatkan pada tugas (task goals).
Asumsi struktur komunitas dan kondisi permasalahannya	Masalah sosial yang sesungguhnya, kesehatan fisik dan mental, perumahan dan rekreasional
Strategi dasar dalam melakukan perubahan	Pengumpulan data yang terkait dengan masalah dan memilih serta menentukan bentuk tindakan yang paling rasional
Karakteristik taktik dan teknik perubahan	Konsensus atau konflik
Peran praktisi yang menonjol	Pengumpul dan penganalisis data, pengimplementasi program, dan fasilitator.
Media perubahan	Manipulasi organisasi formal dan data yang tersedia
Orientasi terhadap struktur kekuasaan	Struktur kekuasaan sebagai pemilik dan sponsor (pendukung)
Batasan definisi penerima layanan	Keseluruhan komunitas atau dapat pula suatu segmen dalam komunitas, termasuk komunitas fungsional
Asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok di dalam suatu komunitas	Pemufakatan kepentingan atau konflik
Konsepsi mengenai penerima layanan	Konsumen (pengguna jasa)
Konsepsi mengenai peran penerima layanan, dan	Konsumen atau resipien (penerima layanan)
Pemanfaatan pemberdayaan	Mencari tahu dari para pengguna jasa tentang layanan apa yang mereka butuhkan serta memberitahu para pengguna jasa tentang pilihan jasa yang ada
INDIKATOR	AKSI SOSIAL
Tujuan	Pergeseran (pengalihan) sumber daya dan relasi kekuasaan, perubahan

	institusi dasar (<i>task</i> atau <i>process goals</i>).
Asumsi struktur komunitas dan kondisi permasalahannya	Populasi yang dirugikan, kesenjangan sosial, perampasan hak dan ketidakadilan
Strategi dasar dalam melakukan perubahan	Kristalisasi dari isu dan pengorganisasian massa untuk menghadapi sasaran yang menjadi musuh mereka.
Karakteristik taktik dan teknik perubahan	Konflik atau kontes, konfrontasi, aksi yang bersifat langsung dan negosiasi
Peran praktisi yang menonjol	Aktivistis, advokat, agilator, pialang, negosiator, partisan
Media perubahan	Manipulasi organisasi massa dan proses-proses politik
Orientasi terhadap struktur kekuasaan	Struktur kekuasaan sebagai sasaran eksternal dari tindakan yang dilakukan, mereka yang memberikan tekanan harus dilawan dengan memberikan tekanan balik
Batasan definisi penerima layanan	Segmen dalam komunitas
Asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok di dalam suatu komunitas	Konflik komunitas yang sulit dicapai kata mufakat, kelangkaan sumber daya
Konsepsi mengenai penerima layanan	Korban
Konsepsi mengenai peran penerima layanan, dan	Employer, konstituen, anggota
Pemanfaatan pemberdayaan	Meraih kekuasaan objektif bagi mereka yang tertindas agar dapat memilih dan memutuskan cara yang tepat guna melakukan aksi serta membangkitkan rasa percaya diri partisipan akan kemampuan mereka.

Indikator yang dikemukakan oleh Glen (1993) mencoba menyederhanakan bentuk-bentuk praktik komunitas, seperti berikut ini:

Tabel 7.2
Tahapan Intervensi Komunitas menurut Glen

INDIKATOR	PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Tujuan	Mengembangkan kemandirian masyarakat
Partisipan	Masyarakat yang mendefinisikan dan mencoba memenuhi kebutuhan mereka sendiri
Metode	Menggunakan proses kreatif dan kooperatif
Peranan	Tenaga profesional bekerja menitikberatkan pada metode non directif.
INDIKATOR	PERENCANAAN SOSIAL
Tujuan	Kampanye untuk kepentingan masyarakat serta kebijakan untuk masyarakat
Partisipan	Kelompok-kelompok yang tertekan mengorganisasikan diri untuk meningkatkan kekuatan
Metode	Menggunakan teknik kampanye pada isu-isu konkret
Peranan	Aktivistis dan organisatoris yang memobilisasi massa untuk aksi politis
INDIKATOR	PENDEKATAN LAYANAN MASYARAKAT

Tujuan	Mengembangkan organisasi yang berorientasi pada memberikan pelayanan kepada masyarakat
Partisipan	Organisasi dan pengguna layanan sebagai rekanan
Metode	Memaksimalkan keterlibatan pengguna layanan/ masyarakat serta mengembangkan hubungan antar lembaga
Peranan	Manajer lembaga yang memberikan layanan merestrukturisasi transaksi yang ada bersama atau dengan mempertimbangkan kepentingan pengguna layanan

Isbandi Rukminto Adi menyebutkan ada tujuh peran sekaligus keterampilan yang diperlukan oleh pelaku perubahan dalam intervensi komunitas:⁸³

- a. Peran pemercepat perubahan (*Enabler*)
- b. Peran perantara, yang menghubungkan penerima layanan dengan penyedia layanan
- c. Peran pendidik, *community worker* mempunyai kemampuan menyampaikan informasi yang baik dan jelas dan mudah ditangkap maksudnya oleh kelompok sasaran
- d. Peran tenaga ahli mensyaratkan bahwa *community worker* memiliki kemampuan untuk dapat memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area.
- e. Perencana sosial
- f. Advokat
- g. Aktivis

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan model pengorganisasian dan pengembangan masyarakat ?
2. Istilah pengorganisasian dan pengembangan masyarakat dikenal juga dengan intervensi komunitas, coba jelaskan siapa tokoh yang mempengaruhi pengorganisasian dan pengembangan masyarakat tersebut ?
3. Ada tiga bentuk pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, yakni pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial. Jelaskanlah ketiga bentuk pengorganisasian dan pengembangan masyarakat tersebut ?
4. Perencanaan sosial sangat penting, siapa saja yang terlibat dalam perencanaan sosial itu ?

⁸³ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas...*, hlm.

BAB XIV

PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

A. Sistem Pemberdayaan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sains sosial yang mengkaji persoalan ekonomi yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam.⁸⁴ Hasanuzzaman juga menjelaskan salah satu cara mendefinisikan ekonomi Islam adalah dengan menggabungkan ekonomi modern dengan ekonomi Islam. Oleh sebab itu ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari ekonomi dalam prinsip Islam atau membawa ekonomi sejalan dengan syariah.⁸⁵ Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh. Berbeda dengan halnya sistem ekonomi sebagai hasil penemuan manusia.

Dalam ekonomi Islam, antara agama dan ekonomi mesti terlihat jelas dan mempunyai hubungan timbal balik. Alam yang diperuntukkan bagi manusia dikelola sesuai dengan tujuan penciptaan. Oleh sebab itu, semua aktivitas manusia yang bersifat muamalat tidak terlepas dari hubungan yang erat antara ekonomi dengan agama. Adapun ciri-ciri ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhan dan keyakinan satu bagian saja dari sistem Islam.
2. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat. Cita-cita ekonomi Islam adalah untuk merealisasikan kekayaan dan kesejahteraan hidup dan keuntungan umum bagi masyarakat, bukan untuk menciptakan persaingan, monopoli dan sikap mementingkan diri sendiri.

Banyak dilihat sekarang tentang sistem pemberdayaan ekonomi umat, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun dari pihak luar negeri. Akan tetapi, pemberdayaan tersebut banyak yang tidak berhasil di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena sistem yang diberikan dengan cara konvensional. Contoh diberikan pinjaman dari pihak bank kepada masyarakat miskin dengan memakai sistem bunga. Walaupun bunga pinjaman itu besar tetap diambil oleh pemanfaat/nasabah. Hal itu terjadi karena banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan sistem perekonomian secara syariah atau perbankan syari'ah.

⁸⁴ Ekonomi Islam dikatakan sebagai sains sosial, karena Ilmu Ekonomi mempelajari kehidupan manusia bermasyarakat (termasuk ilmu sosiologi dalam arti yang terbatas). M.A Manan, *Islamic Economics Theory and Practice*, (Idarah Adabiyat: Delhi, 1970), hlm. 3

⁸⁵ Hasanuzzaman, *Defening Islamic Economic*, *Jurnal Of Islamic Banking and Finance*, vol 8 April-Juni, 1991, hlm. 14

Faktor penyebab lemahnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah karena kurangnya sosialisasi dan rendahnya sumber daya manusia yang mengetahui sistem perbankan syariah. Ini terlihat dari banyaknya banker-banker yang berasal dari perbankan konvensional yang menjadi banker di bank-bank syariah. Kalau ini dibiarkan terus maka akan terjadi manipulasi dalam hal produk syariah yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Akhirnya yang dijalankan oleh banker itu produk konvensional yang dibungkus dengan kemasan syaria'ah.

B. Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Peran strategis zakat untuk mensejahterakan umat, bukan hanya janji kosong ataupun angan-angan. Ia telah terbukti begitu efektif sedari zaman kekhalifahan Umar bin Khathab. Abu Ubaid menuturkan bahwa Mu'adz bin Jabal pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada khalifah Umar, karena beliau tidak lagi menemukan mustahiq zakat di Yaman, tetapi dikembalikan oleh Umar. Mu'adz kemudian mengirimkan sepertiga hasil zakat itu yang kembali ditolak oleh Umar. Beliau berkata, "Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, tetapi aku mengutusmu untuk memungut zakat dari orang kaya di sana dan dibagikan kepada kaum miskin di antara mereka juga." Mu'adz menjawab, "Kalau di sana saya temukan orang miskin, buat apa saya susah-susah mengirimkannya kepada anda." Pada tahun kedua, kembali Mu'adz mengirimkan separuh dari hasil zakat yang dipungutnya, dan Umar kembali menolaknya, begitu juga di tahun ketiga, kiriman tersebut dikembalikan oleh Umar. Mu'adz berkata, "Saya tidak menjumpai seorangpun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut."⁸⁶

Sebuah potret yang begitu mengagumkan, apalagi negara kita adalah negara muslim terbesar di dunia, yang secara logika sederhana, *muzakki*-nya (pembayar zakat) tentu sangat banyak. Kalau ini bisa dimaksimalkan, tentu umat Islam segera bebas dari lilitan hutang dan berdiri dengan penuh marwah dan kehormatan. Akan tetapi, banyak ekonom yang meragukan kemampuan zakat. Mereka berpendapat bahwa zakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena persentasenya sangat kecil, yaitu hanya 2,5 persen. Bagaimana mungkin zakat akan mampu mempengaruhi, misalnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan persentase sebesar itu.

Munculnya keragu-raguan tersebut adalah karena hingga saat ini belum ada satu negara muslim pun yang dapat dijadikan sebagai model yang tepat. Malaysia sebagai contoh, memiliki keunggulan dalam hal penghimpunan zakat dibandingkan Indonesia.

⁸⁶ Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor, Lintera Antar Bangsa, 2002)

Namun demikian, dalam hal pendayagunaan zakat, justru Indonesia yang lebih unggul dibandingkan Malaysia. Indonesia memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara muslim lainnya dalam hal pemberdayaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Akan tetapi, dana zakat yang ada di Indonesia jumlahnya masih sangat kecil, yaitu kurang dari 1 persen dari total GDP, maka seolah-olah zakat tidak mempengaruhi perekonomian Indonesia secara makro. Tentu saja itu adalah anggapan yang salah.

C. Agenda Pengelolaan Zakat

Untuk mengoptimalkan zakat bagi kesejahteraan ummat, ada beberapa hal yang menjadi fokus kita;

1. Mengoptimalkan kerja Lembaga 'Amil Zakat (LAZ)
2. Memperluas cakupan objek zakat yang sesuai dengan kaidah syari'ah. Menurut Dr. Didin Hafiduddin mengatakan sumber zakat dalam Islam menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan *ijmali/global* segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat. Dengan pendekatan ini semua jenis harta yang belum ada di zaman Rasulullah, tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang bernilai, maka harus dikeluarkan zakatnya. Adapun pendekatan kedua yakni pendekatan *tafshili/terinci*, yaitu menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat, wajib dikeluarkan zakatnya.⁸⁷
3. Mengembangkan harta zakat menjadi usaha produktif.

Simposium Yayasan Zakat Internasional III, yang diselenggarakan di Kuwait pada 2 Desember 1992 mengeluarkan fatwa bahwa harta zakat boleh diinvestasikan dengan syarat:

1. Harta tersebut tidak dibutuhkan segera.
2. Investasi dilakukan dalam bidang yang legal.
3. Ada jaminan bahwa modal investasi tetap sebagai uang zakat.
4. uang mudah dicairkan ketika mustahiq zakat sangat membutuhkan segera.
5. Ada jaminan bahwa usaha tersebut menguntungkan.

Simposium juga memfatwakan bolehnya harta zakat untuk membangun proyek jasa seperti rumah sakit, perpustakaan, sekolah, dan lain-lain dengan syarat:

1. Pihak yang mendapatkan jasa tersebut adalah mustahiq zakat saja, sedangkan selain mereka hanya dibolehkan dengan dipungut biaya.
2. Modal tetap atas nama mustahiq, sekalipun bukan mereka yang mengelola langsung.
3. Bila proyek tersebut dijual maka hasilnya tetap berstatus uang zakat.

Dengan demikian sebaiknya harta zakat lebih dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti diinvestasikan atau menjadi modal usaha nelayan, dijadikan modal untuk budi daya rumput laut dan banyak lagi yang bisa dikerjakan dalam

⁸⁷ DR. KH. Didin Hafidhuddin, M. Sc, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 15-16.

memaksimalkan dana zakat bagi usaha yang lebih produktif, tentu dengan tetap memperhatikan kaedah-kaedah syar'i. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi pengentasan kemiskinan umat.

Bagi manusia, ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Bisa dikatakan ekonomilah yang menggerakkan roda pemerintahan pada suatu bangsa. Tanpa ekonomi yang baik, maka masyarakat akan berada pada taraf kehidupan yang memiluhkan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi bermunculan pula sistem jaringan keuangan, baik itu yang bersifat konvensional maupun yang bersifat syariah. Melirik dari sejarah sistem keuangan konvensional yang telah lama dipakai oleh sebagian orang di dunia, mereka tidak menemukan sistem keuangan yang tidak menimbulkan efek yang begitu tajam dan yang mampu bertahan dari berbagai macam krisis.

Kehadiran sistem keuangan syariah memberikan jawaban terhadap apa yang selama ini ditakutkan oleh beberapa pakar. Pada akhirnya masyarakat sudah mulai beralih pada sistem keuangan syariah yang tidak merugikan mereka dan sesuai dengan konsep Islam. Bahkan orang yang tidak beragama Islam menaruh kepercayaannya pada konsep keuangan syariah. Maka dari itu, untuk menciptakan jaringan keuangan syariah yang lebih terarah, dan lebih terjamin diperlukan metode dalam pengembangan jaringan keuangan syariah. Pada makalah ini akan dibahas metode pengembangan jaringan keuangan syariah, yang nantinya dapat menjadi rujukan dan pemahaman kepada pembaca tentang lembaga keuangan syariah.

D. Keuangan Syariah

Kegiatan keuangan syariah berkaitan dengan sistem muamalah di dalam Islam. Agar kegiatan muamalah sejalan dengan prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, sebagai berikut.

- a. Mubah
- b. Halal
- c. Sesuai dengan aturan syariat dan pemerintah
- d. Azas manfaat
- e. Azas kerelaan
- f. Niat
- g. Azas tolong menolong.⁸⁸

Islam sebagai agama yang sempurna yang tidak hanya berbicara pada aspek dunia saja, tetapi juga mengkaji aspek untuk kehidupan akhirat. Islam memberikan metode dalam

⁸⁸ Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*, (Hayfa Press; Padang, 2005), hlm. 4 – 8

pengelolaan keuangan syariah yang nantinya tidak tergolong kepada riba yang sudah jelas hukumnya haram di dalam Islam. Untuk itu, Islam menerapkan metode *mudharabah*.⁸⁹ *Mudharabah* adalah suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, satu pihak memberikan modal yang dibutuhkan oleh pihak lain untuk diproduktifkan, kemudian laba yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. Untuk mengembangkan jaringan keuangan syariah, maka diperlukan rencana yang nantinya akan membangun jaringan keuangan syariah yang lebih kompeten dan terukur.

Selanjutnya akan dibahas tentang perencanaan-perencanaan dalam mengolah keuangan.

“Financial planning is broadly defined as a process of determining an individual’s financial goals, financial priorities, and after considering his resources, risk profile and current lifestyle, to detail a balanced and realistic plan to meet those goals. The individual’s goals are used as guideposts to map a course of action on ‘what needs to be done’ to reach those goals.”

Artinya, perencanaan keuangan selain proses penentuan tujuan keuangan dan prioritas keuangan, juga mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, profil risiko dan gaya hidup saat ini. Agar rencana dibuat secara realistis dan seimbang untuk mencapai sasaran tersebut. Rencana inilah yang digunakan sebagai panduan dan memetakan suatu tindakan bagaimana dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Contoh kecil dari kegiatan *financial planning* adalah mengatur dan mengendalikan pengeluaran bulanan, merencanakan persiapan pendidikan anak, persiapan untuk pergi haji, persiapan pensiun, melindungi keuangan keluarga dengan asuransi, memilih alternatif investasi yang baik untuk mengembangkan kekayaan.

Jadi perencanaan keuangan bukan saja mengurus masalah sang ayah dan ibu yang dipusingkan dengan tagihan cicilan kredit dan berbagai fasilitas hidup yang terasa menjerat keuangan keluarganya, sehingga penghasilan yang didapatkan tiap bulannya seolah tak menunjukkan penampakan pada kemakmuran keluarga. Padahal setiap tahun penghasilan tersebut selalu mengalami kenaikan. Ada saja kebutuhan keuangan keluarga yang tidak diduga muncul dan harus segera dicarikan jalan keluarnya. Setiap selesai utang yang satu, datang lagi utang lainnya, atau setelah selesai tertutupi keuangan suatu kebutuhan, muncul kebutuhan baru. Tak heran bila akhirnya persiapan sekolah anakpun tak sempat terpikirkan dengan matang. Akhirnya anakpun terpaksa mendapatkan pendidikan seadanya.

⁸⁹ Rozalinda, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 199

Islam tidak membenci harta, namun mewaspadaikan keburukan perilaku manusia terhadap harta. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Qs. al-Isra: 26-27.

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Diperkuat dengan QS. Al-Furqan: 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Penegasan ini mengisyaratkan bahwa seorang muslim harus pandai mengelola uang (harta) atau cerdas finansial. Dengan demikian secara tegas dapat dikatakan Islam sebagai penggerak perencanaan keuangan. Mengapa? Al-Qur'an yang diturunkan 14 abad yang lalu, dan sudah menegaskan pentingnya merencanakan keuangan agar bisa membelanjakan di tengah-tengah antara keduanya, tidak berlebihan atau boros dan tidak pula kikir.

Mengapa Islam memberikan perhatian utama pada harta (ekonomi)? Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits hasan dan sahih yang bersumber dari Ka'ab ibnul 'Iyadh r.a, bahwa Rasulullah Saw., bersabda, "Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah. Dan fitnah umatku adalah harta."

Hal itu tentunya sejalan dengan firman Allah dalam Qs. al-Anfal: 28 dan Qs. at-Taghaabun: 15. Qs. al-Baqarah: 155, lebih menegaskan lagi dan berbunyi, "Dan sungguh akan Kami memberikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar."

Al-Qur'an telah memberikan peringatan yang tegas tentang harta, dan Rasulullah memberikan kiat praktisnya dalam hadits-hadits shahih, seperti Sahih Muslim nomor 2984 riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim.

Jika dibagi rata setiap pendapatan pada pos-posnya, Insya Allah hak dan kewajiban semua pihak akan tertunaikan. Artinya, pendapatan yang dihasilkan tidak sepenuhnya

untuk dikonsumsi, namun harus diproduktifkan sebagai modal kerja dan untuk kepentingan ibadah serta kebutuhan sosial lainnya. Hadist-hadits ini menunjukkan bahwa pendapatan yang dimiliki tidak hanya untuk dikonsumsi saja. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang baik tentang perencanaan keuangan, agar pemanfaatannya optimal dan mendapat keberkahan serta bertambah.

Manajemen dapat diartikan pula mengolah sumber daya yang ada (potensi) dengan proses planning- organization- actuating- checking (P-O-A-C) atau lebih sederhana dengan perencanaan- pelaksanaan- pengevaluasian (Plan-Do-Check) untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Perencanaan keuangan adalah istilah umum untuk manajemen keuangan pribadi dan keluarga (*Personal and Family Financial Planning*). Perencanaan sudah dianggap mewakili sebuah proses manajemen, karena langkah awal ini akan memicu proses berikutnya sehingga terbentuk sebuah siklus manajemen. Perencanaan akan melakukan adaptasi sesuai hasil pengevaluasian yang dilakukan.

Untuk mencapai tujuan perencanaan ekonomi dalam Islam, tergantung pada prinsip *shirakat* (kerja sama) yang telah diakui secara universal. Ini berarti bahwa pelaksanaan perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi sektor pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Ini terlaksana melalui prinsip *mudharabah*, di mana tenaga kerja dan pemilik modal dapat disatukan sebagai mitra. Dalam sistem perencanaan Islami, kemungkinan rugi sangat kecil karena sebagai hasil kerja sama antara sektor pemerintah dan swasta, maka adanya investasi yang sehat akan mendorong kelancaran arus kemajuan ekonomi menjadi lebih baik.⁹⁰

Pada dasarnya perbuatan muamalat yang ditujukan untuk kebaikan hubungan perekonomian sesama manusia harus mengandung ciri untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu, seharusnya kehadiran sistem syariah dalam transaksi antar individu dan lembaga harus ditempatkan dalam konteks pasar, yaitu karena adanya kebutuhan dan ketersediaan serta dipilih atas dasar pertimbangan rasional dan moral untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera lahir dan batin. Karena perekonomian syariah dilandasi atas prinsip kesempurnaan kehidupan di antara kebutuhan lahiriah dan rohaniah dalam bertransaksi sesama hamba Allah maupun lembaga yang mereka buat. Maka kerelaan menjadi fundamen dasar setiap transaksi dua pihak atau lebih.

⁹⁰ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 372

Apabila disimak secara mendalam ajaran tentang ekonomi dalam al-Quran dilandasi oleh suatu sikap bahwa tiada pemisahan antara ekonomi dan keberagamaan seseorang. Mencari nafkah adalah bagian dari ibadah dan tiada pemisahan antara agama dan kehidupan dunia. Pengembangan model ekonomi Islam harus menjadi agenda pengkajian yang terus menerus oleh ekonom dan ulama untuk menemukan prinsip-prinsip ekonomi yang baik demi kebaikan hidup umat manusia.

Fungsi perencanaan pada hakikatnya mendasari pelaksanaan semua fungsi manajerial. Perencanaan mengandung pengertian sebagai suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Fungsi perencanaan memiliki empat tujuan penting, yakni:

- a. Mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian dan perubahan-perubahan di masa mendatang.
- b. Memusatkan perhatian pada pencapaian sasaran.
- c. Mendapatkan atau menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara efisien dan efektif.
- d. Memudahkan pengawasan.

Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi syariah dalam fungsi perencanaan:

a. Perencanaan bidang SDM

Permasalahan utama pada bidang SDM adalah pada penetapan standar perekrutan SDM. Implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat profesionalisme yang harus dimiliki oleh seluruh komponen SDM perusahaan. Kriteria profesional menurut syariah adalah harus memenuhi 3 unsur, yaitu kafa'ah (ahli di bidangnya), amanah (dapat dipercaya untuk bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab), dan memiliki etos kerja yang tinggi.

b. Perencanaan bidang keuangan

Permasalahan utama pada bidang keuangan adalah pada penetapan sumber dana dan alokasi pengeluaran. Implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat kehalalan dana, baik sumber masukan maupun alokasinya.

c. Perencanaan bidang Operasi/Produksi

Implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan bahan masukan produksi dan proses yang akan dilaksanakan. Dalam dunia pendidikan, misalnya,

inputnya adalah SDM muslim dan proses pendidikannya ditetapkan dengan menggunakan kurikulum yang Islami.

d. Perencanaan bidang Pemasaran

Implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan segmentasi pasar, target dan posisinya. Dalam dunia pendidikan, misalnya, segmen yang dibidik adalah SDM muslim. Target yang ingin dicapai adalah output didik (SDM) yang profesional. Sedangkan posisi yang ditetapkan adalah sebagai lembaga yang memiliki *unique position* sebagai lembaga pendidikan manajemen syariah.⁹¹

Ada sembilan lembaga keuangan syariah di Indonesia, yaitu:

- a. Bank umum syariah: bank yang kegiatannya memberikn jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran.
- c. Unit Usaha Syariah: usaha yang hanya khusus menggunakan sistem syariah berdasarkan UU Perbankan Syariah Indonesia Nomor 21.
- d. Baitul Mal wat Tamwil (BMT): lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.
- e. Asuransi Syariah: pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, umumnya diasuransikan dengan menggunakan syariah.
- f. Pasar Modal Syariah: merupakan tempat perusahaan menerbitkan surat berharga baik berupa saham maupun obligasi agar memperoleh dana dari investor dengan sistem syariah
- g. Reksa Dana Syariah: perusahaan sekuritas yang hanya memfasilitasi investor menginventasikan dananya pada surat berharga yang memenuhi kriteria syariah.
- h. *Ar Rahnu* (Pegadaiaan Syariah): lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.
- i. Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat: yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya.

Dalam sejarah ekonomi syariah di Indonesia, sudah dapat mengembangkan berbagai macam lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah; lembaga keuangan mandiri (LKM) syariah, gadai syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah. Dalam rumpun LKM syariah yang non bank telah berkembang tiga model: BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) yang menyatukan *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*; BTM (*Baitul Tamwil*) yang menyempurnakan “Sponsored Financial Institution” dan “*sirhkah*”. Ketiga model ini telah berkembang dan kebanyakan sudah mengambil bentuk badan hukum koperasi dan hanya sebagian kecil

⁹¹ Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Manajemen Perspektif Syariah, Manajer Divisi Manajemen Syariah* (SEM Institute), hlm. 12-13

yang tidak terdaftar dalam format perizinan dan pendaftaran institusi keuangan di Indonesia.

Lembaga keuangan syariah sekarang sudah menjadi nama dari institusi keuangan, sehingga secara legal sudah terbuka untuk dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia. Bahkan perusahaan asing. Jika syariah menjadi *brand* dan orang yang percaya kepada *brand* menjadikan konsumen fanatik, maka LKM syariah adalah ladang investasi sektor keuangan yang menjanjikan.

Ekonomi syariah sangat cocok untuk bisnis yang mempunyai ketidak pastian yang tinggi dan keterbatasan informasi pasar. Apalagi jika berhasil dibangun keterpaduan antara fungsi jaminan dan usaha yang memiliki resiko. Oleh karena itu, berbagai dukungan untuk mendekatkan UKM dengan perbankan syariah adalah sangat penting dan salah satu strateginya adalah bagaimana mampu menjalin keterpaduan sistem keuangan syariah. Hal inilah yang harus dicari jawabannya. Keterpaduan sistem keuangan syariah menjadi unsur penting dalam menjadikan LKM syariah menjadi efektif, memiliki kemaslahatan tinggi terutama dalam kontek globalisasi dan otonomi daerah.

Dalam sistem keuangan syariah juga terdapat pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk perbankan. Dengan demikian kerja sama dan keterkaitan antara perbankan syariah skala besar dan bank syariah skala kecil dan menengah harus mendapatkan perhatian. Lebih jauh akan menjadi semakin produktif apabila peran lembaga keuangan syariah non-bank juga mendapat perhatian yang sama. Dari berbagai data yang disajikan oleh BPS, sektor jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan adalah sektor yang paling produktif dibandingkan sektor lainnya. Bahkan tidak ada perbedaan nilai tambah atau tenaga kerja antara LKM kecil dan besar.⁹²

Sistem perekonomian Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi objek kajian dan penelitian kalangan barat. Sistem ekonomi islam dewasa ini telah terintegrasi dan berinteraksi dengan sistem perekonomian dunia. Tidak lagi hanya dimonopoli dan diklaim sebagai sistem ekonomi di negara-negara Islam.

Masuknya sistem Ekonomi Islam, diyakini selain mengembalikan fitrah para pemeluk Islam agar mampu menjalankan syariat sesuai dengan ajaran agama Islam, namun juga akan mampu menjadi sistem yang secara holistik sempurna untuk mengembalikan kejayaan ekonomi Indonesia, yang saat ini masih belum benar-benar pulih dari krisis yang

⁹² Noer Soetrisno, *Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Menuju Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm. 4

berkepanjangan. ekonomi Islam pada dasarnya dijalankan sesuai dengan ajaran islam yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam ini sudah pasti akan sejalan dan cocok dengan berbagai jenis masyarakat, baik bagi penganut islam maupun pemeluk agama atau faham lain, karena ajaran ekonomi Islam bersifat universal dan sesuai dengan hati nurani.

Agar tergambarkan dengan jelas bagaimana kegiatan koperasi mampu mewujudkan sistem ekonomi Islam, alangkah baiknya kita menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam:

1. Menurut Muhammad Abdul Manan: Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam. Muhammad Abdul manan mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Alquran, Sunnah, Ijma dan Qiyas.
2. Hasanuz Zaman juga mengungkapkan tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan pengetahuan, aplikasi dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia. Tidak hanya itu, ekonomi Islam juga memungkinkan mereka melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat.
3. Monzer Kafh juga mengungkapkan tentang pengertian ekonomi Islam. Bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempunyai sifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi Islam ini tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya. Bagi yang lintas keilmuan termasuk di dalamnya terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis*; seperti matematika, statistik, logika, ushul fiqh.

Ketika berdiri melihat gambaran yang lebih luas tentang ekonomi Islam pada masa kekinian memang tidak banyak yang dikemukakan dalam Alquran, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al quran dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslim berperilaku dan beradab sebagai Produsen, Konsumen dan Pemilik Modal, tetapi hanya sedikit yang mengurai tentang ekonomi Islam, artinya ekonomi Islam bisa dibedakan dengan sistem ekonomi lainnya adalah melalui ciri dan sifatnya sebagaimana telah diuraikan di bab pendahuluan.

Dasar-dasar yang dimaksud dalam sistem ekonomi Islam setidaknya yang tergambar adalah:

1. Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia dan di akhirat, tercapainya pemuasan maksimal terhadap berbagai kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara seimbang, baik perorangan maupun kolektif masyarakat. Dan untuk mencapai kepuasan optimal haruslah dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan merusak alam.
2. Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk yang halal pula;
3. Dilarang menimbun harta benda yang menjadikan nya terlantar;
4. Dalam harta benda itu terdapat hak untuk mereka yang dinyatakan berhak, agar terjadi mobilisasi risiko.
5. Pada batas tertentu, hak relatif tersebut dikenakan zakat;
6. Perniagaan diperbolehkan, akan tetapi mengharamkan riba;
7. Indikator kesejahteraan dalam bekerja sama adalah prestasi kerja.

Manusia sebagai wakil (*khalifah*) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Dalam al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*

Dengan demikian, setidaknya, menurut uraian pengertian diatas, Pejurnal menyimpulkan pengertian lain sebagai berikut; Ekonomi Islam adalah segala sesuatu kepahaman tentang ajaran Allah SWT dalam menjalankan perniagaan yang meletakkan segala sesuatunya kepada aturan dan kepemilikan ada di tangan Allah SWT serta mempunyai tujuan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan umat manusia⁹³.

⁹³ <http://fahmyzone>, akses 2016

E. Perkembangan Ekonomi Islam dari Masa ke Masa

1. Sejarah Ekonomi Islam di Indonesia

Ketika Islam masuk ke Indonesia pertama kali, kita tahu bersama bahwa jalur perdaganganlah yang digunakan sebagai jalur masuknya para pedagang muslim dari Gujarat, Persia, Yaman, Cina dan beberapa negara lainnya. Kearifan akhlak dan santunnya tata dagang dan penyelesaian akad yang dilakukan para pedagang muslim memberikan referensi tersendiri bagi masyarakat pesisir kala itu.

Keterpikatan awal tersebut menghantarkan ketertarikan tersendiri bagi masyarakat untuk lebih kenal dengan ajaran Islam. Masalah-masalah ekonomi sederhana yang terjadi di masyarakat pun secara alami memperoleh solusi bijak dari para pedagang muslim perantau maupun para ulama yang menyertainya. Perselisihan dagang, hak monopoli, kesantunan dagang, bagi waris bahkan hingga masalah pembagian harta kala terjadi perceraian.

Ketika para pedagang perantau ini mulai menetap dan membaur dengan warga, secara otomatis kajian ekonomi sederhana ini menjadi kajian umum dengan sendirinya. Masalah-masalah ekonomi dan pemecahannya semakin kompleks beriring dengan berkembangnya tata dan sistem masyarakat.

2. Ekonomi Islam dan Kerajaan Islam

Runtuhnya kekuasaan Kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha memberikan sebuah kondisi anomali dalam tata kepemimpinan dan pemerintahan rakyat. Islam yang menggunakan cara santun mulai bergerak masuk dari sekitar tepian pantai (pesisir) masuk ke kota raja (pusat pemerintahan) dan mulai mengambil hati para ningrat penguasa.

Saat Islam mulai mendapat pengakuan dari penguasa setempat mulailah lahir beberapa kerajaan atau kesultanan yang bernaftaskan Islam. Dalam menyelesaikan permasalahan penggalangan upeti (pajak) atau menyangkut hal-hal penyelenggaraan ekonomi negara tentu saja raja memerlukan penasihat kebijakan. Penasihat kebijakan biasanya diampu oleh para kaum ulama, hulu balang atau seseorang yang dianggap wali. Tentu saja mereka akan memberikan bentuk nasihat yang mengarah pada ajaran-ajaran Islam.

Bukan hanya itu saja, konsep ajaran Islam hampir mempengaruhi seluruh aspek pemerintahan. Pada jaman sekarang ini akan terasa bahwa hal ini mengakibatkan banyaknya wujud pengertian masyarakat yang sudah terbaur sangat sempurna antara pengertian agamis dan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya masyarakat asli.

3. Ekonomi Islam dan Kolonialisme

Peran Islam dalam mewujudkan perlawanan terhadap kolonialisme dalam sejarah perjuangan Indonesia sangatlah nyata. Peran ulama dan tokoh keagamaan dalam menjelaskan hak-hak kepemilikan, fungsi pajak, dan pengertian atas kontrol ekonomi yang dilakukan imperialis membuka semangat baru bagi masyarakat dan penguasa lokal untuk melakukan perlawanan.

Jadi, perlawanan terhadap kaum penjajah di Indonesia bukan semata karena kafir atau tidaknya penjajah itu tetapi ada sisi lain yang benar-benar dirasakan penting dan esensial, yaitu turunnya kelas ekonomi dan derajat ekonomi masyarakat menjadi tingkatan terbawah.

Peran kaum Arab pedagang yang kebetulan menjadi kelas kedua bersama kaum Cina dan India, menjadi jembatan dalam mengangkat taraf penghidupan pedagang lokal. Mereka membuka pintu perdagangan bagi para pedagang lokal meski harus sembunyi-sembunyi. Ada pengertian baru pada diri masyarakat tentang dasar *ukhuwah islamiyah* sebagai pembentuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Di lain sisi, pembagian kaum penjajah atas wilayah pengelolaan sumberdaya ekonomi menurut ras menimbulkan masalah baru. Para pedagang Tionghoa non muslim mulai mendirikan rumah judi dan rumah pelacuran yang menyediakan candu dan merusak masyarakat. Dalam aturan dagang muslim tentu saja hal ini haram dan mendapatkan perlawanan yang serius dari para ulama dan masyarakat. Selain itu, berdiri pula rumah-rumah gadai yang memberlakukan riba dengan bunga yang teramat tinggi dan memberatkan masyarakat.

4. Ekonomi Islam dan Pergerakan Nasional

Sebenarnya aksi maupun pemikiran tentang ekonomi berdasarkan islam memiliki sejarah yang amat panjang. Pada sekitar tahun 1911 telah berdiri organisasi Syarikat Dagang Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual muslim saat itu, serta ekonomi islam ini sesuai dengan pedoman seluruh umat islam di dunia yaitu di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa jika kamu akan bermuamalah, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakannya (apa yang akan dituliskan itu), dan janganlah orang itu mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika orang yang mengutang itu lemah akalnya atau lemah keadaanya atau tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya yang mengimlakannya dengan jujur. Selain itu juga harus didatangkan dua orang saksi dari orang lelaki. Jika tidak ada maka

boleh dengan seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu kehendaki, dan janganlah saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah engkau jemu menulis utang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kau berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan (QS Al-Baqarah: 282).

Salah satu tokoh penting dalam pembentukan pandangan terhadap ekonomi Islam kala itu adalah HOS Tjokroaminoto. Konsep Kedermawanan Islam yang diajarkan Tjokroaminoto, bukanlah sebuah empati dalam wujud sosial sempit saja. Yang pertama, beliau menekankan bahwa sedekah akan menjadi sesuatu yang bernilai lebih, jika diniatkan untuk keteguhan beribadah kepada Tuhan. Jelaslah, bahwa agama selain sebagai kontrol perilaku masyarakat juga menjadi motivasi positif bagi tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi ummat. Yang kedua, zakat sebagai dasar distribusi dan pemerataan kekayaan untuk seluruh masyarakat. Luar biasa jika kita sadari, Islam mengatur zakat maal dan zakat fitrah sebagai suatu alat ukur keadaan sosial ekonomi masyarakat. Betapa tidak, jika jumlah orang yang berhak menerima zakat tinggi, berarti terjadi masalah kemiskinan di suatu tempat, demikian pula sebaliknya. Maka secara tidak langsung zakat dapat dijadikan barometer kemakmuran rakyat. Dengan dilaksanakan zakat secara proporsional, amanah, dan kontinu, tentu akan terjadi progress yang baik pada keadaan ekonomi rakyat. Yang ketiga, kemiskinan dunia bukanlah kehinaan, tapi kejahatan dunialah yang hina. Pada gagasan ini tentu saja dapat kita tafsirkan bahwa kemiskinan butuh pemahaman tersendiri untuk kemudian dicari solusinya bersama, bukan untuk dicemooh, dimusuhi atau bahkan dikelompokkan sendiri dalam tata sosial. Justru penajajahan, tirani, dan perilaku semena-mena dari penguasa dan pemilik modal lah yang mungkin menjadi salah satu sebab kemiskinan itu terjadi dan merajalela.

Konsep besar kedua yang dibawakan Tjokroaminoto adalah Persaudaraan Islam. Islam jelas mengatakan bahwa antara muslim satu dengan yang lain adalah saudara. Semua lapisan, ras, dan suku pada masyarakat adalah sejajar di mata Tuhan, di mana hanya derajat ketaqwaan yang membedakan mereka satu sama lain. Bagaimana ummat bisa membangun sendi perekonomian yang baik jika hubungan mereka hanya didasarkan pada hubungan konsumen-produsen, penguasa-rakyat, atau manajer-buruh. Maka dengan persaudaraan inilah komunikasi bisa lebih kooperatif antara semua lini pelaku ekonomi yang kemudian menghasilkan ide dan tindakan yang tidak saling merugikan satu sama lain.

5. Ekonomi Islam dan Peranannya dalam Pembentukan Ekonomi Negara

Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, tentu saja konsep-konsep ekonomi untuk mendukung penyelenggaraan negara sangat dibutuhkan. Ada beberapa faktor yang kemudian baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi cara pandang para tokoh pendiri negara dalam membentuk sistem ekonomi dan tata aturan penyelenggaraan perekonomian negara.

Beberapa tokoh nasional kala itu seperti Sukarno (yang notabene adalah murid HOS Tjokroaminoto), Hatta, Haji Agus Salim dan lain-lain tentu saja sangat tidak asing dengan dasar-dasar ekonomi Islam. Maka bentuk implementasi sistem ekonomi yang mengangkat kemaslahatan bersama dan pengelolaan sumberdaya alam untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh negara sepertinya menjadi bukti adanya muatan ekonomi Islam dalam pembentukan Ekonomi Negara.

Salah satu tokoh pendiri negara adalah Mohammad Hatta. Berbeda dengan Weber, konsep koperasi yang ia bawaan begitu mengangkat unsur kemanusiaan dan hasrat hidup orang banyak. Kita semua tahu bahwa Hatta amat taat beragama, memperlajari ilmu agama bahkan sempat menulis sebuah buku berjudul *Nuzul Qur'an*, yang diterbitkan Angkasa, tahun 1966. Pandangan Hatta tentang masalah-masalah kebangsaan, seperti loyalitasnya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keberpihakannya terhadap nasib rakyat kemudian diejawantahkan dalam bentuk pemikiran tentang ekonomi kerakyatan. Ia dikenal sebagai “Bapak Koperasi Indonesia” karena pemikiran-pemikirannya ekonominya yang pro-kerakyatan. Ketika masih belajar ekonomi di Rotterdam, ia banyak mencermati nasib ekonomi rakyat yang banyak dieksploitasi oleh pelaku ekonomi modern yang pada saat itu banyak dikendalikan oleh investor-investor Belanda, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan dengan pemilikan lahan yang sempit, teknologi sederhana, dan modal seadanya merupakan jenis usaha subsisten yang akan sangat sulit berkembang. Usaha pertanian dan perkebunan besar yang didukung dengan luas tanah ratusan ribu hektar, menggunakan teknologi unggul, dan adanya modal yang sangat besar tentu akan mudah memproduksi komoditi ekspor, berupa karet, teh, kelapa sawit, tebu, dan tembakau. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan semakin tersisihkan. Hatta bertujuan untuk bagaimana mempersatukan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha koperasi yang berbasis pada asas kekeluargaan.

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Quran dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan- alasan yang sangat tepat, al-Quran dan sunnah banyak sekali

membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi Islam menekankan empat sifat, antara lain:

- a. Kesatuan (unity)
- b. Keseimbangan (equilibrium)
- c. Kebebasan (free will)
- d. Tanggung jawab (Responsibility)

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba yang dari segi bahasa artinya “kelebihan”.

Di Barat, koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar. Perekonomian pasar yang digerakkan oleh para kapitalis dalam mengejar keuntungan pribadi tidak memberi ruang gerak untuk kaum marginal. Hal ini disebabkan karena kaum marginal tidak mempunyai akses pada (kapital) modal yang faktor kunci bagi seorang pelaku ekonomi untuk dapat berperan secara aktif dalam perekonomian pasar. Ketidakadilan pasar tersebut direspon oleh kaum marginal dengan menghimpun kekuatan bersama dalam suatu wadah yang dikenal koperasi. Di negara maju gerakan koperasi telah mampu menempatkan koperasi sebagai fenomena global yang menjadikan koperasi merupakan alternatif bagi perekonomian pasar. Bahkan, di berbagai negara, Pemerintah telah membuat peraturan perundangan untuk mengatur dan melindungi keberadaan koperasi sebagai respon atas tuntutan masyarakat.

Dengan demikian dalam penerapannya Ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari tuntutan dan aturan yang telah Allah SWT tetapkan melalui al-Quran. Dewasa ini di Indonesia sudah mengembangkan Ekonomi Islam melalui paket Lembaga Perbankan Syariah atau Islam, dimana pada prakteknya sistem lembaga keuangan syariah ini bertujuan untuk menggerakkan perekonomian Negara layaknya bank Konvensional terdahulu. Pada sebahagian masyarakat yang berpemahaman, perbankan konvensional selama ini adalah merupakan Riba (*Interest Based*). Namun patut dianalisa penggunaan pembiayaan melalui Perbankan Syariah masih rentan dimanfaatkan oleh pelaku bisnis yang berbasis kapitalis. Artinya menurut hematnya, letak penggunaan pembiayaan Perbankan Syariah tersebut belum tepat sasaran sesuai dasar-dasar Ekonomi Islam sebagaimana yang diuraikan oleh pejurnal di atas, dimana sifat individualistik yang dominan tercipta di

masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, jika si A membutuhkan modal dalam rangka membuka usaha baru melalui perbankan syariah, karena si A berpemahaman menghindari praktek Riba dengan menggunakan bank konvensional. Namun ketika dalam praktek usahanya si A lebih cenderung individualis dan kehilangan ciri Islam lainnya dalam menjalankan perniagaannya, sebab hasrat untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya serta keabsolutan dalam usaha tersebut sangat dominan. Padahal dalam uraian di atas menggambarkan bahwa manusia tidak boleh absolut dalam menguasai kekayaan tersebut sebab sebagai khalifah dimuka bumi ini, manusia hanya di haruskan untuk mengelola kekayaan tersebut.

Kesempatan ekonomi Islam bisa tumbuh dalam kegiatan ekonomi yang berbasis koperasi sangatlah tepat di Indonesia, pasalnya perangkat lembaga keuangan yang berbasis syariah juga tumbuh subur dewasa ini menggiring paravstakeholder mengembangkan arah yang lebih luas tentang ekonomi Islam sebagai ruhnya kesejahteraan masyarakat. Namun, hal tersebut bisa menjadi keniscayaan apabila pemerintah tidak pro terhadap koperasi dan korporasi sebagai mitra utama dari pembangunan bangsa.

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi Islam ?
3. Jelaskan potensi zakat sebagai pendukung utama kegiatan pemberdayaan ekonomi umat ?
4. Bagaimanakah implementasi syariah pada proses perencanaan keuangan syariah ?

BAB XV

KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

A. Ulama Pewaris Nabi

Ulama berasal dari bahasa Arab, yaitu merupakan bentuk jamak dari kata ‘*alim*, yang berarti orang yang mengetahui. QS. Fathir: 28.

“...Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Istilah ulama dalam ayat di atas, menurut ahli tafsir menyebutkan bahwa ulama adalah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Ulama dikenal dalam masyarakat Islam sebagai orang yang ahli dalam bidang agama. Dalam konteks ulama sebagai pewaris nabi, maka di dalam QS. al- Ahzab: 45-46, ditegaskan fungsi dan kewajiban para nabi itu sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi".

Berdasarkan ayat di atas, ada lima tugas pokok yang menjadi kewajiban nabi yang pada saat ini terpikul di atas pundak para ulama. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir *The Holy Quran*⁹⁴ memberikan ulasan tentang tugas ulama tersebut:

1. Sebagai saksi kepada semua umat manusia tentang kebenaran yang hakiki, perintis jalan dari kebodohan, ketahyulan, kekotoran dan silang sengketa.
2. Pembawa kabar gembira tentang karunia Ilahi. Walau seberapa jauh manusia tersesat tetapi berkat keimanannya, dia selalu mempunyai pengharapan dan berusaha supaya dapat menempuh dan menghayati kehidupan yang lebih baik.
3. Memberi peringatan kepada umat manusia bahwa kehidupan yang sekarang (dunia) bukanlah akhir dari kehidupan, tapi masih ada lagi kehidupan akhirat yang lebih penting.
4. Penyeru kepada jalan kebenaran dan menunjukan jalan-jalan untuk memperoleh karunia dan ampunan Ilahi.
5. Sebagai obor yang menerangi seluruh alam sebab Islam yang dikembangkannya itu adalah satu agama yang sifatnya universal dan memancarkan cahayanya kemana-mana ke seluruh jagat raya.

⁹⁴ Yunan Nasution, *Islam dan Problem-Problem Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 182

B. Pemimpin atau Umara

Istilah pemimpin dalam Islam banyak sekali, seperti *al-Imamah* berasal dari kata *imam* (bahasa Arab) artinya “*ikutan bagi kaum, baik dalam kebaikan maupun dalam kesesatan*”.⁹⁵ Kata *Imam* (dalam agama) disebut juga dengan “*orang yang berdiri di depan jama'ah dan memimpin ibadah*”. Dalam wilayah politik di sebut kepala Negara, dan lembaganya disebut *al-Imamat*.⁹⁶ *Al-Imamat* yang dimaksud adalah “*Kepemimpinan setelah Nabi Muhammad Saw untuk menjaga agama dan memimpin keduniaan*”.⁹⁷ Dalam sejarah Islam bahwa gelar kepala Negara disebut *Khalifah, Imam* dan *Amir*, sedangkan jabatannya disebut dengan *Khilafah, Imamat* dan *Imarat*, namun dalam hal ini istilah tersebut menunjukan kepada satu pengertian, walaupun berbeda istilah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pemimpin adalah orang-orang yang menjadi ikutan, panutan, tauladan kepada jalan kebaikan untuk menjaga agama dan memimpin keduniaan. Apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, sebagai Rasul Allah dalam mendakwahkan agama (mengajak manusia kepada jalan Allah) dan juga sebagai pemimpin/kepala Negara maupun pemimpin dalam peperangan.

Kepemimpinan (*Leadership*) adalah kemampuan dari seorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya), sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan ada yang bersifat resmi (*formal Leadership*) yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan, dan ada pula kepemimpinan karena pengakuan dari masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan. Kepemimpinan yang tidak resmi (*informal leadership*) mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi, oleh karena kepemimpinan tersebut didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat.⁹⁸

Kepemimpinan menurut Hadari dapat dilihat dari dua konteks, yaitu struktural dan non-struktural, ia menjelaskan kedua konteks tersebut secara jelas sebagai berikut: dalam konteks struktural, kepemimpinan diartikan sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga berarti usaha mengarahkan, membimbing, dan

⁹⁵ Ibn Muzhur, *Lisan al-Arab, Darl al-Mishr, al-Qahirah*, Juz.14, tt, hlm. 287, Lihat Salmadani, *Da'i dan Kepemimpinan*, hlm. 42

⁹⁶ Muhammad Diya' al-Din al-Rayes, *Al-Nazhariyat al-Siyasiyat al-Islamiyah*, (Maktabat al-Anjara al-Mishriyat, 1960), hlm. 98, Lihat. Salmadani, *Da'i dan Kepemimpinan*, hlm. 42

⁹⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Suthaniyat*, (Matba' al-Musthafa al-Bab al-Halb, Mesir, 1960, hlm. 5, Lihat. Salmadani, *Da'i dan Kepemimpinan*, hlm. 42

⁹⁸ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 113

mempengaruhi orang lain, agar pikiran dan kegiatannya tidak menyimpang dari tugas pokok masing-masing. Adapun dalam konteks non-struktural, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengarahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.⁹⁹

Dalam al-Qur'an disebut juga dengan "*Istikhlaf*" (janji mengangkat menjadi khalifah) artinya *istikhlaf* di sini ialah (penguasaan) bumi, hal ini bukan hanya semata-mata kerajaan, kekuasaan, kewibawaan dan pemerintahan; tetapi ini semua dengan ketentuan harus mempergunakan untuk membuat istilah, kemakmuran dan pembangunan; untuk membuktikan apa yang telah digariskan Allah untuk manusia agar mereka berjalan di atasnya menuju tingkat kesempurnaan yang telah ditetapkan, yang layak baginya sebagai makhluk yang telah dimuliakan Allah.¹⁰⁰

Penguasaan bumi ialah kesanggupan memakmurkan dan memperbaikinya, bukan meruntuh dan merusak; kesanggupan untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman, bukan untuk melaksanakan kezaliman dan tangan besi; kesanggupan untuk meninggikan martabat dan organisasi manusia, bukan untuk menjerumuskan manusia, baik pribadi maupun jama'ah ke lembah kebinatangan.¹⁰¹ Jadi *istikhlaf* (penguasaan) bumi yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, seperti janji yang dijanjikan Allah kepada orang-orang mukmin sebelumnya dengan maksud agar membina jalan Allah di atas bumi. Inilah hakikat *istikhlaf* yang telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam QS. an-Nuur: 55, "*Agar mengukuhkan kedudukan agama mereka yang telah mendapat kerelaan Allah*".

Dalam terminologi syari'at, *al-Imamat* ialah "orang yang mempunyai otoritas kepada masyarakat dan juga kepada urusan-urusan mereka".¹⁰² Pengertian di atas menunjukkan adanya lembaga-lembaga al-imamat dalam urusan kenegaraan untuk mencapai tujuannya, baik tujuan keduniaan sekaligus juga tujuan agama yang menyatu dalam diri seorang imam/pemimpin. Al Mawardi menjelaskan bahwa *al-imamat* dilembagakan untuk menggantikan kenabian, guna melindungi agama dan mengatur dunia.¹⁰³ Al Maududi mengatakan bahwa khilafah atau al-Imamat ialah jabatan tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasulullah.

⁹⁹ Kadar Nurjaman dan Khaerul Umam, *Komunikasi & Public Relation*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 194

¹⁰⁰ A. Hasjmy, *Dustur Dakwah menurut Al-Qur'a*, ... hlm. 117

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 117

¹⁰² Salmadani, *Da'i dan Kepemimpinan*, hlm. 43

¹⁰³ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyat*, ... hlm. 5, Lihat, Salmadani, *Da'i dan Kepemimpinan*, hlm. 43

Kedua kekuasaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari diri seorang imam/ pemimpin yang telah mendapat mandat sebagai khilafah. Khilafah artinya pemimpin atau pemakmur, makanya seorang pemimpin sebagai pemakmur baik secara mental spiritual (agama) maupun dalam kehidupan keduniaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, baik secara pribadi maupun masyarakat, dan sebagainya.

Ada dua mandat kepemimpinan, yaitu mandat umum dan mandat khusus. Mandat umum, yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam sesuai yang dijelaskan Allah SWT dalam QS. 24.An-Nuur : 55, *“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di Bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”*. Yaitu kekuasaan yang diberikan oleh Allah Swt kepada umat Islam sebagai pemimpin, sebagai penguasa dunia, kepemimpinannya berdasarkan iman dan amal shaleh, sebagai jiwa dan batang tubuh tiap-tiap kepemimpinan yang sehat dan mendapat kerelaan/ keridhaan Allah Swt. Jadi mandat kepemimpinan yang dapat dipahami dari QS. an- Nuur: 55, tersebut diberikan kepada umat Islam yang beriman dan beramal shaleh, juga berarti pemberian mandat dalam bidang dakwah, karena *“Kekhilafahan”* atau *“kepemimpinan dunia”* tidak akan berjalan tanpa ada dakwah yang mendukungnya.¹⁰⁴ Sehingga kepemimpinan dalam Islam mengandung pengertian yaitu pemimpin dalam segala ukuran menjadi juru dakwah Islamiyah. Para rasul yang membawa risalah, pada hakikatnya juga juru dakwah agung yang mendakwahkan risalah kepada umat manusia.¹⁰⁵

Syarat berdirinya khilafah atau kepemimpinan dunia Islam, maka demikian pula syarat-syarat yang menjadi syarat berdirinya kepemimpinan dakwah Islamiyah; yaitu syarat keimanan dan amal shaleh, sebagai penyiapan diri untuk memikul amanah besar di atas bumi yaitu amanah istikhlaf/ dakwah.

Allah juga memberikan mandat khusus kepada tiap-tiap pribadi muslimin untuk menjadi pemimpin, termasuk pemimpin dakwah atau juru dakwah, dengan syarat-syarat

¹⁰⁴ A. Hasjmy, *Dustur Dakwah menurut Al-Qur'an*, ... hlm. 116

¹⁰⁵ *Ibid*

tertentu pula.¹⁰⁶ QS. al- Anbiya': 73 menjelaskan syarat sebagai berikut, *“Dan Kami jadikan mereka sebagai pemimpin, yang memimpin dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebajikan, mendirikan shalat, membayar zakat dan mereka hanya beribadah kepada Kami”*. Kemudian, Allah menjelaskan di QS. as- Sajadah: 24, *“Dan Kami angkat dari kalangan mereka para pemimpin, yang memimpin dengan perintah Kami, yaitu ketika mereka sabar dan meyakini ayat-ayat Kami”*.

Dari kedua ayat tersebut Allah menyatakan bahwa dari kalangan orang-orang yang beriman atau muslimin, yang akan mengangkat para pemimpin, untuk menjadi pemimpin umat haruslah berpedoman kepada perintah atau ajaran Allah, artinya mereka memimpin harus memakai dasar kepemimpinan Islam.

C. Syarat-syarat seorang pemimpin

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pada umumnya sebagai berikut:

1. Berakhlak dan taqwa (QS. al-Anfal: 34) terutama dalam shalat dan zakat (QS. al-Maidah: 54-55).
2. Berkemampuan memimpin sesuai dengan posisi/ jabatannya (HR. Bukhari).
3. Orang yang mampu dalam jabatan tersebut (HR. Hakim).
4. Mendapat dukungan dan kecintaan dari bawahannya (HR. Muslim).

Menurut QS. an- Nuur: 55, QS. al- Anbiya': 73 dan QS. as- Sajadah: 24, bahwa ciri-ciri kepemimpinan Islam yaitu:

1. Keimanan yang murni kepada Allah.
2. Pengabdian sejati kepada Allah,
3. Keyakinan teguh akan kebenaran ajaran Allah.
4. Kesabaran yang membaja dalam menghadapi cobaan.

Toto Tasmara berpendapat tentang syarat-syarat seorang pemimpin, harus memenuhi kriteria atau kekuatan di atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Seorang pemimpin harus memiliki kekuatan akidah yang konsisten.
2. Seorang pemimpin harus mampu menjabarkan dan menyatakan gagasannya dalam realitas melalui bentuk amal shaleh.
3. Seorang pemimpin adalah dia yang gandrung atau cinta kebenaran serta memiliki kekuatan serta daya nalar yang dinamis.

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 119

4. Seorang pemimpin memiliki kesabaran yang tinggi (*emotional stability*) sehingga tidak mudah terjebak dalam situasi yang merugikan dirinya maupun kelompok.¹⁰⁷

Lebih khusus Toto Tasmara menegaskan bahwa bagi pemimpin Islam itu harus memiliki kriteria-kriteria yang lebih dari pemimpin yang lain, di antaranya disebutkan syarat-syarat pemimpin Islam itu sebagai berikut:

1. Dia mampu mendayagunakan waktu secara efisien dan efektif (*wal'ashr*).
2. Dia memiliki kesadaran yang tinggi atas posisinya sebagai manusia dengan relasinya dengan sang pencipta dan relasinya dengan manusia serta alam semesta (*innal insana lafii khusrin*).
3. Dia memiliki kecintaan serta keyakinan yang mendalam atas misinya (*amanuu*).
4. Dia mampu menyatakan dan mewujudkan misinya tersebut dalam bentuk action (*wa'amilush-shalihah*),
5. Dia gandrung akan ilmu dan kebenaran serta mampu mengkomunikasikan kebenaran tersebut (*watawasau bil haq*),
6. Dia memiliki kesabaran yang tinggi (*watawasau bishshabr*).¹⁰⁸

Abd Jabbar¹⁰⁹ lebih merinci syarat-syarat pemimpin, yaitu:

1. Harus mempunyai ilmu tentang syara'
2. Harus adil dalam ilmu tauhid dan keadilan Ilahi.
3. Mempunyai sifat-sifat yang pantas dan menghindari sifat-sifat yang tidak layak baginya.
4. Harus piawai tentang Nabi Muhammad Saw.
5. Harus lebih wara'.
6. Konsisten dengan tindakannya.
7. Mempunyai fisik yang prima.
8. Mempunyai jiwa yang mantap.
9. Bertanggung jawab dengan urusannya.
10. Harus mampu apa yang diserahkan kepadanya dengan baik.
11. Harus mengetahui cara mengerjakan yang ditugaskan kepadanya.
12. Harus amanah sehingga senang (tentaram) hati orang.
13. Didahulukan orang yang berkelebihan.
14. Harus merdeka, berakal dan beragama.

Adapun yang menjadi dasar atau tujuan kepemimpinan dalam Islam dari QS. al-Anbiya': 73 dan QS. as-Sajadah: 24 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mengerjakan segala kebajikan dalam segala bidang: politik, ekonomi, sosial, akhlak dan sebagainya.

¹⁰⁷ Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Kedua, 1997), hlm. 104.

¹⁰⁸ Toto Tasmara..., hlm. 108

¹⁰⁹ Salmadani, *Da'i dan Kepemimpinan*, hlm. 47-48

2. Mengerjakan segala jenis ibadah, yang paling utama adalah ibadah shalat (induk ibadah).
3. Membina sosial ekonomi seperti zakat.

Adapun sikap hidup para pemimpin tersebut benar-benar beribadah hanya kepada Allah artinya dengan tauhid yang murni dengan sikap sebagai berikut:

1. Jiwa raganya selalu berhubungan dengan Allah.
2. Jiwa raganya bersih dari segala macam syirik.
3. Pengabdian hanya semata-mata karena dan hanya untuk Allah.
4. Tidak suatu kekuasaanpun di dunia yang mematahkan watak dan sifat-sifat kepemimpinannya.¹¹⁰

Apabila kita telah memilih pemimpin sesuai dengan kriteria tersebut, maka setiap orang wajib untuk patuh kepada pemimpin tersebut (HR Bukhari dan HR Muslim).

D. Kelompok yang tidak boleh jadi pemimpin umat Islam

Kelompok orang yang tidak boleh jadi pemimpin dalam masyarakat yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, sebagai berikut:

1. Musuh Allah dan musuh orang mukmin (QS. al-Mumtahanah: 1).
2. Orang yang mempermainkan agama atau mempermainkan shalat (QS. al-Maidah: 56-57).
3. Orang yang lebih mencintai kekufuran daripada keimanan (QS. at-Taubah: 23).
4. Kelompok orang di luar golongan orang mukmin (QS. Ali-Imran: 118).
5. Orang yang beragama Yahudi dan Nasrani (QS. al-Maidah: 51-53).
6. Kafir (QS. al-Anfal: 73, QS. an-Nisa: 138, 139 dan 144, dan QS. al-A'raf: 3-4).

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dan bagaimanakah kepemimpinan menurut Islam ?
2. Jelaskan pentingnya kepemimpinan dalam gerakan dakwah dan pengembangan masyarakat Islam ?
3. Jelaskan hubungan ulama dengan umara dalam kepemimpinan Islam ?
4. Jelaskanlah syarat-syarat untuk menjadi pemimpin menurut Islam ?

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 120

BAB XVI

TENAGA PENDAMPING DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

A. Definisi Fasilitator

Secara umum, seorang yang melakukan kerja untuk masyarakat (*society*) yang profesional dikenal dengan pekerja sosial. Pekerja sosial disebut juga dengan *social worker*, menurut Zastrow¹¹¹, merupakan aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka, agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang mendukung untuk mencapai tujuan.

Menurut *International Federation of Social Worker* sebagaimana dikutip Abu Huraerah,¹¹² mengartikan bahwa pekerjaan sosial adalah *the social profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well being. Utilizing theories of human behavior and social system, social work intervenes at the points where people interact with their invironments. Principle of human rights and social justice are fundamental to social work.* Definisi di atas bermaksud bahwa profesi pekerjaan sosial adalah untuk mendorong perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan kemanusiaan, pemberdayaan serta kebebasan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Menggunakan teori-teori perilaku manusia, dan sistem sosial, pekerjaan sosial mengintervensi pada titik-titik dimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial adalah hal yang penting bagi pekerjaan sosial.

Soetarso dalam Abu Huraerah¹¹³ menyebutkan, pekerja sosial adalah suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal-balik yang saling menguntungkan antara orang dengan lingkungan sosialnya untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai satu kesatuan harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan demikian, profesi pekerjaan sosial memiliki batasan definisi sebagai berikut:

1. Berlandaskan prinsip dan metode ilmu pengetahuan
2. Berinti pemberian bantuan
3. Menggunakan hubungan antar manusia sebagai alat

¹¹¹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 38

¹¹² Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 38

¹¹³ Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 39

4. Ditujukan untuk pengembangan personal dan sosial sebagai satu kesatuan
5. Mencakup juga pengembangan kualitas lingkungan sosial sebagai fisik (lingkungan hidup).
6. Demi terciptanya kesejahteraan sosial yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.¹¹⁴

Akan tetapi, pemberdayaan biasanya menggunakan istilah fasilitator untuk orang yang bekerja melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan. Istilah fasilitator adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat. Lippit dan Rogers dalam Mardikanto dan Poerwoko¹¹⁵ menyebutnya sebagai agen perubahan (agent of change), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Oleh karena itu, fasilitator haruslah profesional dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.

B. Bentuk-bentuk Tenaga Pendamping Sosial

Adapun penyuluh atau fasilitator pemberdayaan masyarakat itu, dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu:

1. Pegawai negeri sipil, adalah pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai penyuluh/ fasilitator. Tenaga pemberdayaan masyarakat berstatus pegawai negeri sipil mulai dikenal sejak tahun 1970 seiring dengan dikembangkannya konsep catur sarana unit desa dalam program bimbingan masyarakat, sedangkan jabatan fungsional penyuluh mulai dibicarakan sejak pelaksanaan proyek penyuluh tanaman pangan tahun 1976.
2. Fasilitator swasta, fasilitator pemberdaya masyarakat yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta dan termasuk fasilitator swasta kelompok fasilitator yang berasal dari lembaga swadaya.
3. Fasilitator yang berasal dari masyarakat yang secara sukarela melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya, dan termasuk padanya fasilitator yang diangkat oleh masyarakat dan ia mendapatkan imbalan dari masyarakat itu.

¹¹⁴ Abu Huraerah, *Pengorganisasian...*, hlm. 39

¹¹⁵ Totok Mardikanto dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 139

Jim Ife,¹¹⁶ menyebutkan bahwa kerja pendampingan masyarakat tidaklah mudah dan bukan tugas yang sederhana. Banyak konflik, dilema, dan masalah yang akan dihadapi oleh seorang pekerja masyarakat dan sifat kerjanya seringkali mendapatkan berbagai jawaban dan tanggapan yang tidak mudah juga. Jim Ife melanjutkan, kerja seorang pekerja masyarakat juga dipengaruhi oleh konteks organisasi yang memperkerjakannya. Ada lima jenis pekerja masyarakat (fasilitator), yakni pekerja masyarakat yang diperkerjakan, pekerja sektoral yang diperkerjakan, profesional berfokus masyarakat, aktivis yang diperkerjakan, aktivis masyarakat yang tidak dibayar.

Pekerja masyarakat yang diperkerjakan adalah pekerja yang dibayar untuk melakukan kerja masyarakat yang dikenal pekerja masyarakat atau pegawai pengembangan masyarakat, yang diperkerjakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi non pemerintahan. Pekerja masyarakat yang jenis ini terikat oleh aturan ketat dari organisasi yang membayarnya sehingga gerak kreativitas pendamping masyarakat tidak bebas. Di sisi lain, banyak juga fasilitator yang diperkerjakan ini memiliki otoritas yang tinggi karena jauh dari pantauan pimpinan instansi yang memperkerjakannya. Akan tetapi, sebaiknya pekerja sosial ini bernegosiasi untuk mendapatkan otonomi dalam menyelesaikan kerja pengembangan masyarakat.

Pekerja sektoral yang diperkerjakan adalah seorang yang diperkerjakan bukan untuk sebuah fungsi yang digeneralisasi dan tidak jelas dari pengembangan masyarakat namun lebih pada melakukan kerja masyarakat dalam sebuah isu spesifik atau suatu kelompok populasi yang sudah ditentukan. Kerjanya difokuskan pada sektor khusus yang bisa jadi tidak bertepatan dengan berbagai kepentingan masyarakat, membutuhkan fleksibilitas dan perspektif yang menyeluruh.

Profesional berfokus masyarakat merupakan pekerja yang mencari sebuah basis masyarakat bagi praktik profesional bisa jadi terpinggirkan dalam profesi, dan cirinya pekerja profesional ini ialah menggunakan pengembangan masyarakat untuk mengantarkan sebuah layanan profesional.

Aktivis yang diperkerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan untuk sebuah organisasi aktivis, atau persatuan dagang dan partai, dan menggunakan pengembangan masyarakat untuk memperoleh hasil politik dan aksi.

Aktivis masyarakat yang tidak dibayar adalah anggota masyarakat dengan tanpa status diperkerjakan sebagai seorang pekerja masyarakat, dapat memiliki tingkatan

¹¹⁶ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development...*, hlm. 634-642

otonomi tinggi namun berpotensi menimbulkan berbagai masalah tanggungjawab dan koordinasi.

C. Peran fasilitator

Pada konvensional peran penyuluh dibatasi pada penyampaian inovasi atau mempengaruhi penerima manfaat pemberdayaan melalui metoda dan teknik tertentu sampai penerima manfaat itu dengan kesadarannya sendiri mampu mengadopsi inovasi yang disampaikan. Akan tetapi dalam perkembangannya, peran fasilitator tidak hanya terbatas pada penyampaian inovasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima manfaat, tetapi ia harus mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang diwakili dengan masyarakat penerima manfaat, baik dalam hal menyampaikan inovasi, kebijakan yang harus diterima, maupun untuk menyampaikan tanggapan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga. Fasilitator yang menempatkan diri sebagai penengah atau menjembatani pemerintah dan lembaga pemberdayaan dengan masyarakat penerima manfaat, maka dia akan memenuhi unsur agen pembaharuan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Levin dalam Mardikanto dan Poerwoko, menyebutkan ada tiga peran fasilitator. Yakni, pencairan diri (membaur) dengan masyarakat sasaran, menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan, dan pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran. Ketiga peran yang dikemukakan oleh Levin, dikembangkan lagi oleh Lippit, sebagai berikut:

1. Pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan. Dalam tahapan ini, setiap fasilitator harus mampu memainkan perannya pada kegiatan-kegiatan:
 - a. Diagnosa masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar diperlukan (*real need*) masyarakat penerima manfaat.
 - b. Analisis tentang motivasi dan kemampuan masyarakat sasaran untuk melakukan perubahan sehingga upaya perubahan yang direncanakan mudah diterima dan dilaksanakan sesuai dengan sumberdaya yang telah dimiliki oleh masyarakat sasaran.
 - c. Pemilihan objek perubahan yang tepat dengan kegiatan awal yang benar-benar diyakini pasti berhasil dan memiliki arti yang sangat strategis bagi berlangsungnya perubahan-perubahan lanjutan di masa berikutnya.
 - d. Analisis sumberdaya yang tersedia atau dapat digunakan fasilitator yang bersama-sama penerima manfaatnya untuk perubahan seperti yang direncanakan.

- e. Pemilihan peran bantuan yang paling tepat yang akan dilakukan oleh fasilitator baik berupa bantuan keahlian, dukungan untuk melakukan perubahan, pembentukan kelembagaan atau memperkuat kerjasama masyarakat atau menciptakan suasana tertentu bagi terciptanya perubahan.
2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan

Dalam tahapan ini, kegiatan yang harus dilakukan fasilitator adalah:

 - a. Menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat penerima manfaat.
 - b. Menunjukkan kepada masyarakat penerima manfaat tentang pentingnya perubahan-perubahan yang harus dilakukan dengan menunjukkan masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang belum dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat.
 - c. Bersama-sama masyarakat menentukan prioritas program, memobilisasi sumberdaya, dan memimpin perubahan yang direncanakan.
3. Memantapkan hubungan dengan masyarakat penerima manfaat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Terus-menerus menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan masyarakat penerima manfaat, terutama tokoh-tokohnya yang formal dan informal.
 - b. Bersama-sama tokoh masyarakat memantapkan upaya-upaya perubahan dan merancang tahapan-tahapan perubahan yang perlu dilaksanakan dalam jangka panjang.
 - c. Terus-menerus memberikan sumbangan terhadap perubahan yang profesional melalui kegiatan penelitian dan rumusan konsep perubahan yang akan ditawarkan.

Peran fasilitator menurut Mosher adalah sebagai guru, penganalisis, penasehat, dan organisator. Sementara Mardikanto, mengembangkan peran fasilitator meliputi; peran edukasi, peran diseminasi inovasi, peran fasilitasi, peran konsultasi, peran advokasi, peran supervisi dan peran pemantauan, monitoring dan pengawasan.

D. Kualifikasi Fasilitator

Kualifikasi fasilitator maksudnya sejumlah kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator, meliputi kemampuan berkomunikasi, memiliki sikap menjiwai pekerjaan, memiliki kemampuan pengetahuan, dan memiliki karakteristik sosial budaya yang jelas.

Terkait dengan kualifikasi fasilitator, Tim Persiapan Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama British Council pada tahun 2009 merumuskan bakuan kompetensi yang

merupakan kebutuhan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan yang cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan. Pengelompokan unit-unit kompetensi meliputi kompetensi umum, kompetensi inti, dan kompetensi khusus.

1. Kompetensi umum fasilitator
 - a. Membangun relasi sosial
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya masyarakat
 - c. Menyadarkan kebutuhan masyarakat
 - d. Melaksanakan fasilitasi pembelajaran
 - e. Meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan
 - f. Membangun visi dan kepemimpinan.
2. Kompetensi inti
 - a. Membangun jejaring dan kemitraan
 - b. Membangun modal sosial
 - c. Membangun kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan
 - d. Memperkuat posisi tawar
 - e. Merancang perubahan
 - f. Mendesain proses pembelajaran
 - g. Menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat
 - h. Mengembangkan kemandirian masyarakat
 - i. Meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan
 - j. Mengelola konflik
 - k. Mengembangkan sistem sanksi (*reward and punishment*)
3. Kompetensi khusus
 - a. Mengembangkan ide, metoda, produk baru di sektor kegiatan tertentu.
 - b. Memfasilitasi penerapan ide, metoda, produk baru di sektor kegiatan tertentu.

E. Etika Pendamping Sosial

Kerja masyarakat secara alamiah tidak dapat menjadi suatu yang bebas nilai aktivitas teknis. Aksi dari kerja masyarakat mengimplikasikan berbagai nilai tertentu seperti masyarakat itu sendiri dan berbagai nilai demokrasi, partisipasi, otonomi diri dan lain sebagainya.

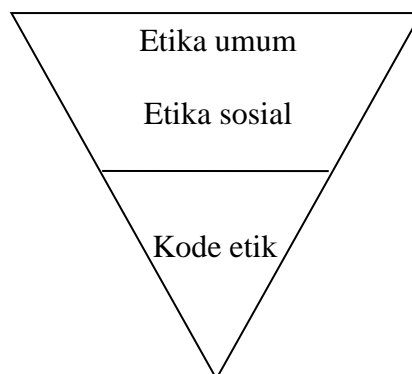
Menurut Abu Huraerah, untuk mengatur tata hubungan dengan masyarakat, maka diperlukan etika sosial. Etika sosial ini sangat penting karena (a) pola hidup masyarakat yang pluralistik termasuk juga dalam bidang moralistik, (b) masyarakat saat ini hidup

dalam masa transformasi yang tanpa tanding dan perubahan selalu terjadi di bawah hantaman kekuatan pada semua segi kehidupan dan gelombang modernisasi, dan (c) tidak mustahil bahwa perubahan sosial yang ada selalu merangsang pihak-pihak lain untuk menawarkan cara-cara lain sebagai pola pemenuhan lainnya yang kadang-kadang di luar konteks moral yang ada. Karena itu, etika sangat penting untuk membatasi intervensi tersebut, (d) bahwa etika juga diperlukan oleh kaum agama untuk memantapkan sikap partisipasi mereka dalam konteks kehidupan masyarakat yang tengah berubah.

Bagi pekerjaan sosial, etika juga sangat penting untuk mendorong para pekerja sosial untuk *conformity* terhadap etika sosial, etika profesi dan hukum formal yang ada. Teori etika untuk profesi pekerjaan sosial merupakan penggabungan dari nilai-nilai etika yang sudah ada, maka dikenal dengan meta etika. Meta etika merupakan suatu analitis terhadap disiplin etika, yang secara khusus menyelidiki dan menetapkan arti atau makna istilah-istilah normatif yang diungkapkan melalui pernyataan-pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan, yang biasanya berisi keharusan, baik dan buruk, benar atau salah, terpuji dan tidak terpuji, yang adil, yang semestinya dan lain-lainnya.

Dengan demikian pernyataan mengapa pekerjaan sosial harus disumpah sebelum menjalankan profesinya, mengapa perlu sanksi profesi, mengapa perlu jenjang karir, dan penghargaan dalam profesi, dapat dijawab melalui pemahaman terhadap meta etika dalam pekerjaan sosial. Oleh karena itu, meta etika mendorong pekerja sosial untuk memahami ruang etika secara keseluruhan sebelum menentukan sikap dalam tugas-tugasnya.

Gambar 16.1
Ruang Etika Peraturan, Hukum Formal



Meta etika memberi moral terhadap pekerja sosial sehingga pekerja sosial harus dapat memahami meta etika dari ruang etika yang dipahami itu. Pekerja sosial harus memiliki kehendak yang baik dalam menjalankan tugas-tugas profesi. Karenanya, pekerja sosial harus memiliki dan memahami tujuan setiap tindakan. Pemilihan terhadap metode yang digunakan menjadi pertimbangan yang serius. Dalam arti bahwa metode pelayanan harus metode yang baik berdasarkan etika keilmuan. Pertimbangan tersebut perlu dilakukan karena pekerja sosial harus bertanggungjawab terhadap akibat (*result*) dari tindakannya itu. Dalam konteks ini, pekerja sosial harus memiliki pilihan-pilihan dalam tindakannya dan memberikan tindakan pilihan bagi klien/ masyarakat sasarnya.

SOAL-SOAL EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan tenaga pendamping sosial masyarakat ?
2. Uraikanlah peran tenaga pendamping sosial masyarakat !
3. Jelaskanlah jenis-jenis tenaga pendamping sosial masyarakat !
4. Uraikanlah syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendamping sosial !
5. Jelaskanlah etika yang harus ditaati oleh tenaga pendamping sosial masyarakat dalam menjalankan profesi !

DAFTAR PUSTAKA

1. Bolton, Kristin W., J. Christopher Hall, and Peter Lehmann, eds. *Theoretical Perspectives for Direct Social Work Practice*. 4th ed. New York: Springer, 2022.
2. Canda, Edward R., dan Leola Dyrud Furman. *Spiritual Diversity in Social Work Practice The Heart of Helping*. 2nd ed. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2010.
3. Cox, David, dan Manohar Pawar. *The SAGE Handbook of International Social Work: Issues, Strategies and Programs*. 2 ed. London: SAGE Publications Ltd, 2012. <https://doi.org/10.4135/9781446247594>.
4. Crabtree, Sara Ashencaen, Fatima Husain, dan Basia Spalek. *Islam and Social Work: Culturally Sensitive Practice in a Diverse World*. Policy Press, 2016.
5. ———. *Islam and Social Work: Debating Values, Transforming Practice*. Inggris: Policy Press, 2008.
6. Day, Jane. *Interprofessional Working: An Essential Guide for Health and Social Care Professionals*. Expanding Nursing and Health Care Practice. Cheltenham, U.K: Nelson Thornes, 2006.
7. D'Cruz, Heather, dan Martyn Jones. *Social Work Research: Ethical and Political Contexts*. London ; Thousand Oaks, Calif: SAGE, 2004.
8. DeFilippis, James, dan Susan Saegert. *The Community Development Reader*. 2 ed. New York and London: Routledge, 2012.
9. Figueira-McDonough, Josefina. *Community Analysis and Practice: Toward a Grounded Civil Society*. Philadelphia: Routledge, 2001.
10. Fisher, Robert, dan Howard Jacob Karger. *Social Work and Community in a Private World: Getting out in Public*. New York: Longman, 1997.
11. Gray, Mel, John Coates, dan Michael Yellow Bird. *Indigenous Social Work Around the World: Towards Culturally Relevant Education and Practice*. United Kingdom: Ashgate Publishing, 2008.
12. Gray, Mel, John Coates, dan Michael Yellow Bird. *Indigenous Social Work Around the World: Towards Culturally Relevant Education and Practice*. Contemporary Social Work Studies. Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT: Ashgate, 2008.
13. Gray, Mel, James Midgley, dan Stephen A. Webb. *The SAGE Handbook of Social Work*. London & New York: SAGE Publications Ltd,

2012. <http://dx.doi.org/10.4135/9781446247648>.
14. Harahap, Syahrin. *Islam: Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*. 1 ed. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999.
 15. Healy, Lynne M. *International Social Work: Professional Action in an Interdependent World*. New York: Oxford University Press, 2001.
 16. Healy, Lynne Moore, dan Rebecca Leela Thomas. *International Social Work: Professional Action in an Interdependent World*. 3 ed. New York: Oxford University Press, 2020.
 17. Hoefer, Richard, dan James Midgley. *International Perspectives on Welfare to Work Policy*. 5 ed. New York and London: Routledge, 2006.
 18. Hokenstad, M.G, S.K Khinduka, dan James Midgley. *Hokenstad, M.G., & J. Midgley (Eds) (1992). Profiles in International Social Work*. Washington, DC: NASW Press. Washington DC: NASW Press, 1992.
 19. Holloway, Margaret, dan Bernard Moss. *Spirituality and Social Work*. UK & New York: Palgrave Macmillan, 2010.
 20. Ife, Jim. *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Second edition. Port Melbourne, VIC, Australia: Cambridge University Press, 2016.
 21. Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Penerjemah: Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Syahid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
 22. Jabali, Fuad dan Jamhari, ed. *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
 23. Jahidin, Asep. *Epistemologi Ilmu Kesejahteraan Sosial: Perjalanan Dialektika Memahami Anatomi Pekerjaan Sosial Profesional*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2016.
 24. Kirst-Ashman, Karen K. *Introduction to Social Work & Social Welfare: Critical Thinking Perspectives*. 3 ed. USA: Change Learning, 2010.
 25. Kirst-Ashman, Karen K. dan Grafton H. Hull. *Generalist Practice with Organizations and Communities*. 7 ed. USA: Change Learning, 2018.
 26. Kusmana (ed). *Bunga Rampai Islam dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
 27. Loue, Sana. *Handbook of Religion and Spirituality in Social Work Practice and*

- Research*. New York, NY: Springer New York, 2017. <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7039-1>.
28. Lyons, Karen, Terry Hokenstad, Manohar Pawar, Nathalie Huegler, dan Nigel Hall. *The SAGE Handbook of International Social Work*. London: SAGE Publications Ltd, 2012. <http://dx.doi.org/10.4135/9781446247594>.
 29. Mapp, Susan C. *Human Rights and Social Justice in a Global Perspective: An Introduction to International Social Work*. New York: Oxford University Press, 2008.
 30. Midgley, James. *Social Development: Theory and Practice*. London ; Thousand Oaks, Calif: Sage, 2014.
 31. Midgley, James. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London ; Thousand Oaks, Calif: Sage, 1995.
 32. Midgley, James. *Social Welfare in Global Context*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1997.
 33. Midgley, James dan Livermore, Michelle. *The Handbook of Social Policy*. 2 ed. Thousand Oaks: SAGE Publication Inc, 2009. <http://dx.doi.org/10.4135/9781452204024>.
 34. Midgley, James, dan Manohar Pawar. *Future Directions in Social Development*. New York: Palgrave Macmillan, 2017.
 35. Pawar, Manohar. *Social and Community Development Practice*. London, Thousand Oaks & India: SAGE Publication, 2014.
 36. Pawar, Manohar. *Social and Community Development Practice*. London, Thousand Oaks & India: SAGE, 2014.
 37. Payne, Malcolm. *Modern Social Work Theory*. 4 ed. Oxford University Press, 2014.
 38. Payne, Malcolm, dan Gurid Aga Askeland. *Globalization and International Social Work: Postmodern Change and Challenge*. Contemporary Social Work Studies. Aldershot, England ; Burlington, VT: Ashgate, 2008.
 39. ———. *Globalization and International Social Work: Postmodern Change and Challenge*. Contemporary Social Work Studies. England & Burlington USA: Ashgate Publishing, 2008.
 40. Mel Gray, James Midgley & Stephen A. Webb (Eds). *The SAGE Handbook of Social Work*. London & New York: SAGE Publications Ltd, 2012.
 41. Robinson, Jerry W., dan Gary P. Green, ed. *Introduction to Community*

- Development: Theory, Practice, and Service-Learning*. Los Angeles: SAGE, 2011.
42. Rothman, Jack dan Tropman, John E. "Models of Community Organization and Macro Practice Perspectives: Their Mixing and Phasing." Dalam *Strategies of Community Organization*, 4 ed. Itasca IL: F.E. Peacock, 1987.
 43. Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama, 2005.
 44. Todd, Sarah dan Julie L. Drolet. *Community Practice and Social Development in SocialWork*. Singapore: Springer, 2020.
 45. Walzer, Norman, Rhonda Phillips, and Robert Blair, eds. *50 Years of Community Development Vol I: A History of Its Evolution and Application in North America*. London& New York: Routledge, 2021.
 46. Weil, Marie. *The Handbook of Community Practice*. Thousand Oaks, California: SAGEPublications, Inc, 2005.
 47. Zastrow, Charles. *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering people*. 10 ed. Belmont, USA: Brookscole, 2010.
 48. ———. *Social Work with Groups: A Comprehensive Workbook*. 9 ed. Delmar: CengageLearning, 2015.
 49. ———. *The Practice of Social Work: A Comprehensive Worktext*. 8 ed. USA: COLE Publishing, 2007.
 50. Zastrow, Charles, dan Karen K. Kirst-Ashman. *Understanding Human Behavior and TheSocial Environment*. 10 ed. Empowerment Series. UK: Cengage Learning, 2009.
 51. Rochajat Harun dan Elvinaro Ardianto. 2012. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial Cetakan Ke-2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
 52. Isbandi Rukminto Adi. 2008. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
 53. Alfitri. 2011. *Community Development; Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 54. Jim Ife dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Edisi Bahasa Indonesia Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 55. Indra Maipita. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

56. Agus Sjafari. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
57. Aprilia Theresia, *et al.* 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
58. Nanang Martono. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Press
59. Parsudi Suparlan. 1984. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
60. Abu Huraerah. 1997. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
61. Robert Chambers. 1987. *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
62. Suprihatin Guhardja, *et al*, 1993. *Pengembangan Sumber Daya Keluarga*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
63. Moh. Ali Aziz, Rr Suhartini, A. Halim. 2005. *Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Surabaya: Pustaka Pesantren.
64. Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafei. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.